



MAJALAH **Parlamentaria**

EDISI 152 TH. XLVII 2017



**PERLU SINERGITAS DPR-PEMERINTAH
LAKSANAKAN PROLEGNAS**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH

 Achmad Djuned, S.H., M.Hum
(Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

 Dra. Damayanti, M.Si
(Deputi Pesisdangan)

PIMPINAN PELAKSANA

 Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
(Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

 Drs. Mohammad Djazuli, M.Si
(Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

 Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
(Kasubag Media Cetak)

Ahyar Tibi, S.H

(Kasubag Media Analisis)

Nita Juwila, S.Sos

(Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,

Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Iwan Armanias, Eka Hindra

FOTOGRAFER

Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusanlara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto - Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341

email : dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Mujiono

FOTOGRAHER ART

Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,

Ifan, Izzi Fauzul Umam

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)
ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

IKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI
Follow, Like & Subscribe


DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

mediasos@dpr.go.id | www.dpr.go.id

Pengantar Redaksi



Salah satu catatan penting yang patut diungkapkan dalam memperingati HUT ke 72 DPR-RI tanggal 29 Agustus 2017, adalah menggeser target legislasi tidak berorientasi pada jumlah, melainkan pada kualitas. Pada tahun ketiga pengabdian DPR periode 2014-2019 ini, fungsi legislasi tidak hanya didasarkan pada pencapaian target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetapi terus berupaya agar undang-undang yang dihasilkan dapat diimplementasikan seefektif mungkin dan memiliki visi jauh ke depan.

Seperti ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto, sebuah RUU tidak harus mengatur secara komprehensif dari hulu hingga hilir, melainkan dapat dilakukan secara parsial sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan energi yang besar untuk menyelesaikannya.

Sebagaimana praktek di negara demokrasi yang telah mapan, over regulated sangat dihindari. Ke depan perencanaan legislasi di DPR hendaknya tidak hanya bertumpu pada sejumlah RUU yang ditargetkan. Oleh karena itu, DPR bersama Pemerintah perlu mengevaluasi bentuk Prolegnas yang selama ini masih menitikberatkan pada jumlah.

Selama tahun ketiga masa baktinya atau tahun sidang 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sidang sebelumnya yang menyelesaikan 16 (enam belas) RUU.

Tekad para wakil rakyat yang mengubah target pembahasan RUU yang implementatif patut diapresiasi. Saatnya kualitas lebih dikedepankan bahkan sebuah UU bisa efektif dan segera dirasakan manfaatnya karena memiliki visi jauh ke depan. Dengan demikian akan terhindar pembahasan RUU yang tambal sulam, sebab pembahasannya lebih komprehensif dengan waktu pemberlakuan yang cukup panjang.

Pada momen peringatan HUT ke-72 DPR kali ini saatnya melakukan evaluasi. Usia 72 tahun sebagaimana seorang manusia, sudah dewasa dan matang. Untuk itu pula DPR kita ini akan makin dewasa dan matang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang muaranya terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dirgahayu 72 tahun DPR-RI.

Daftar Isi



PERLU SINERGITAS DPR-PEMERINTAH LAKSANAKAN PROLEGNAS

4 Aspirasi

6 Prolog

Perlu Sinergitas DPR-Pemerintah
Laksanakan Prolegnas

Laporan Utama

8 DPR Terus Berupaya
Hasilkan UU Yang Implementatif

10 Sudah Banyak yang Dilakukan DPR,
Meski Masih Bisa Terus
Dimaksimalkan

12 Ulah DPR RI ke 72
Target Legislasi Harus Ditingkatkan

14 Masyarakat Diharapkan
Tidak Apriori kepada DPR

16 Memperkuat Parlemen
Sebagai Daulat Rakyat

18 Kuantitas Legislasi Bukan Satu-
satunya Tolak Ukur Kinerja DPR

20 DPR Sudah Bekerja Untuk
Kepentingan
Bangsa dan Negara

22 Mensejahterakan Rakyat Lewat
Diplomasi Parlemen

24 Melalui Politik Anggaran
Banggar Upayakan APBN Untuk
Kesejahteraan Rakyat

Sumbang Saran

26 Memakna Ulang Parlemen Modern

28 Parlemen Membangun Negeri
Kinerja DPR RI Tahun Ketiga
2016 - 2017



ULTAH DPR RI KE 72 TARGET LEGISLASI HARUS DITINGKATKAN

30 Pendapat
Masyarakat

34 Foto Berita

42 Profil
Karya Nyata Sang Juara Kelas

46 Kunker

56 Liputan Khusus
Perkuat Kerja Sama Kelautan,
DPR Gelar AIPA Caucus

58 Dapil

Pernik

68 Keceriaan Lomba
Mewarnai Gambar

69 Menggapai Merah Putih di Puncak
Bambu

72 Parlemen Dunia
Menenal sistem pemilu
Selandia Baru

74 Kiat Sehat
Mulutku Sehat Tubuhku Kuat

76 Wisata
Menikmati Eksotisnya Labuan Bajo
Kunjungi Komodo, Berlanjut
ke Kanawa

78 Hobby
Menikmati Kicauan Perkutut dan
Memberi Pakan Koi dan Arwana

79 Pojok Parle
Bisikan Halus Lebih Mujarab
Ketimbang Teriak



KARYA NYATA SANG JUARA KELAS



MENGGAPAI MERAH PUTIH DI PUNCAK BAMBU



MENGENAL SISTEM PEMILU SELANDIA BARU



Menikmati Eksotisnya Labuan Bajo

KUNJUNGI KOMODO, BERLANJUT KE KANAWA



MENIKMATI KICAUAN PERKUTUT DAN MEMBERI PAKAN KOI DAN ARWANA



SARAN KE KPK

Surat ini ditujukan kepada Ketua DPR RI, perihal mengenai penyampaian saran untuk perbaikan kinerja KPK sebagai berikut :

1. Bahwa KPK hendaknya tidak arogan dan menjadi aparat hukum yang terkontrol dan tidak sewenang-wenang.

2. Bahwa meskipun mendukung keberadaan KPK, namun kinerja KPK dalam penanganan korupsi masih mengecewakan dan tidak proporsional baik yang dilakukan oleh Penyidik dan unsur Polisi, Kejaksaan, Penyidik PPNS KPK.

3. Adapun hal-hal yang

yang perlu diperbaiki antara lain:

- a. Penyidik KPK hendaknya melaporkan ke Pimpinan KPK atas hasil pemeriksaan tersangka bukan dari hasil penyelidikan.
- b. Apabila belum ditemukan bukti, hendaknya Juru bicara KPK tidak asal bicara.
- c. Hendaknya Juru bicara KPK diberi teguran apabila berbicara tidak berdasarkan fakta.
- d. Pembicaraan Sdr. Nazarudin hendaknya jangan jadi patokan 100% (dipercaya) karena sudah banyak korban contohnya

Sdr. Anas Urbaningrum, Sutan Batugana (Alm), dan Andi Malarangeng.

e. Bahkan masih banyak yang diduga “ bisa diatur “ oleh aparat hukum, sebagai contoh adalah :

- Kasus Munir
- Kasus Antasari
- Kasus semburan Lumpur Lapindo.
- Kasus Bank Century ■

Edi Purnomo, Madiun, Jawa Timur

KEMBALI KE PANCA TERTIB

Saya ingin menyampaikan kepada DPR dan seluruh masyarakat untuk kembali kepada Panca Tertib, yaitu Ketertiban Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan Negara (IPOLEK SOSBUD HANKAMNEG) sebagai berikut :

- a. Agar Bangsa Indonesia kembali ke Panca Tertib (IPOLEK SOSBUD HANKAMNEG) yang tertuang dalam Pancasila dan pelanggaran terhadap Pancasila merupakan ancaman terhadap keamanan.
- b. Demi tertib politik maka diusulkan agar parpol di NKRI paling banyak 3 Partai. Partai-partai yang saat ini sudah ada diusulkan untuk berkoalisi.
- c. Perlunya tertib ekonomi yaitu tertib dalam proses keluar masuknya keuangan Negara. Penghambat pemasukan uang negara adalah para koruptor, sehingga hendaknya pemerintah memperbaiki 3 institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung) agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Diharapkan DPR RI mempertimbangkan aspirasi tersebut. ■

Supardi, Ngawi, Jawa Timur

KANDIDAT CALON WAKIL PRESIDEN RI

Saya ingin menyampaikan kepada Ketua DPR RI, bahwa setelah Presiden Joko Widodo berakhirnya masa tugasnya, maka saya berharap bisa diberikan kesempatan untuk

maju sebagai calon Wakil Presiden RI, baik dari kalangan intelektual Militer maupun sipil dan sebagai calon Presiden RI pada periode 2019 – 2024, bersedia untuk mendampingi. ■

*Teuku Fakhrizal, Langsa,
Nanggroe Aceh Darussalam*

SARI SILA 1 PANCASILA

Bahwa Sila I dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, telah mengajarkan kepada rakyat Indonesia sebagai berikut :

- Dalam penyelenggaraan Negara RI pertama harus Tuhan yang mengetahui segalanya di atas segala pengetahuan dan gerakan manusia.
- Bahwa seluruh rakyat Indonesia hendaknya benar-benar percaya kepada Tuhan dan Kebenaran Tuhan, akan memberikan jawaban atas badai masalah atas Negeri.
- Ketika percaya kepada Tuhan maka akan tercipta kedamaian namun harus diimbangi dengan kerja keras dan benar.

Diharapkan DPR RI mempertimbangkan masukan ini. ■

Rustian Sirait, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

KESIMPULAN UNJUK RASA

Kami ingin menyampaikan hasil unjuk rasa Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (FBD) sebagai berikut :

Bahwa FBD menyampaikan aspirasi dari aksi bela rakyat yang melakukan unjuk rasa pada hari Kamis 10 Januari 2017 di Kantor DPRD DIY dengan tuntutan:

- Mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Retribusi Penerimaan

Negara Bukan Pajak (pada Polri, SKCK, dan lain-lain)

- Tolak Kenaikan BBM Non subsidi
- Naikkan upah buruh dan cabut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Taun 2015.
- Kembalikan pendidikan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31
- Pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi

di negeri ini dan hentikan sikap lempar tanggung jawab antar instansi negara.

Bahwa tuntutan dan pernyataan sikap tersebut diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam menyikapi kebijakan pemerintah. ■

*Yoeke Ineke Agung
Laksana, D.I.Yogyakarta*



PERLU SINERGITAS DPR-PEMERINTAH LAKSANAKAN PROLEGNAS

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 tanggal 29 Agustus lalu, DPR menjadikan momentum refleksi tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Pada layaknya setiap peringatan ulang tahun, evaluasi dan koreksi perjalanan sejarahnya perlu dikedepankan, sehingga prestasi dan kinerjanya bisa dirasakan masyarakat.

Suatu tradisi menarik dilakukan DPR, setiap memperingati HUT DPR digelar acara khusus diantaranya Rapat Paripurna dengan pidato Ketua DPR melaporkan kinerja setahun sebelumnya. Khususnya terhadap tiga tugas pokok di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan disampaikan catatan penting hasil capaiannya.

Khususnya di bidang legislasi, pada masa yang akan datang DPR

bersama Pemerintah harus semakin meningkatkan kerja bersama di bidang legislasi, baik melalui komitmen untuk melakukan pembahasan secara efektif dan efisien maupun komitmen untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas.

Menurut Ketua DPR Setya Novanto, aspek kualitas ini akan menjadi perhatian DPR, agar UU yang dihasilkan tidak saja bisa menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi

oleh masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa substansi UU tersebut sejalan dengan jiwa dan semangat ideologi Pancasila dan Konstitusi, UUD 1945.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Ketiga 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sidang

sebelumnya yang menyelesaikan 16 (enam belas) RUU.

Meskipun meningkat, Ketua DPR meminta Dewan dituntut untuk terus bekerja keras agar target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tercapai. Kinerja legislasi DPR juga dipengaruhi oleh politik legislasi pemerintah dan semangat dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara DPR dan Pemerintah dalam melaksanakan Prolegnas sehingga capaian kinerja legislasi akan meningkat setiap tahun, baik kuantitas maupun kualitas.

Kekuasaan membentuk undang-undang memang berada di tangan DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Tahun 1945. Namun dalam pembahasannya dilakukan bersama-sama antara DPR dan Pemerintah. Sejauh ini, RUU yang kita selesaikan menjadi undang-undang selalu membawa amanat rakyat, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Sikap yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, masih banyak kekuarangan bahkan ketinggalan khususnya bidang legislasi. Karena itu dia mengajak semua anggota Dewan dan pemerintah untuk mendorong peningkatan capaian target legislasi bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Banyak prestasi yang kita capai, begitu juga kekurangannya. Fungsi pengawasan dan budgeting sudah cukup bagus, sedangkan bidang legislasi memang mengalami penurunan target UU,” jelasnya.

Menurut Pimpinan Dewan Kordinator Industri dan Pembangunan

mestinya mengukur kinerja Dewan jangan melihat UU yang diterbitkan sebab usulan UU diajukan tiga pihak yaitu DPR, Pemerintah dan DPD. Sehingga tidak ada benchmark karena DPR bukan pabrik undang-undang.

ini, target legislasi yang diketok dan diproduksi DPR masih minim. “Untuk bidang legislasi keberpihakannya tidak hanya di DPR tetapi juga harus disetujui atau diketok Bersama Pemerintah,” ujarnya.

Keinginan Pemerintah, kata Agus Hermanto, mengharapkan agar target legislasi tidak terlalu banyak, padahal target Prolegnas DPR yang diketok banyak. Karena itu pula ke depan pihaknya akan membahas bersama pemerintah mana saja yang prioritas dan dikedepankan sehingga target tercapai.

Era Parlemen Modern

Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, menginjak usia ke 72 ini menjadi tonggak sejarah bagi DPR semakin dewasa menuju era Parlemen Modern Pasca reformasi. DPR sekarang juga dinilai paling legitimate, karena di dua periode DPR terakhir telah menjalani proses pemilihan dengan system electoral terbuka. Dimana satu orang pemilih mempunyai satu nilai suara dan di tangan masyarakatlah arah dan masa depan bangsa ditentukan.

Pimpinan DPR Korinbang ini

mengatakan, dengan adanya berbagai media sosial, informasi dapat tersebar dengan cepat. Kemajuan demokrasi di tengah-tengah proses electoral yang terbuka ditambah kemajuan teknologi informasi yang dahsyat, tentunya menjadi navigasi.

“Navigasi kepada setiap parlemen di dunia ini untuk tetap *on the track* berkaitan institusi. Ini menjadi hal yang patut dicermati bersama-sama. Sehingga dalam refleksi 72 tahun DPR sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi, sedemikian mudah orang menyampaikan pendapat maupun aspirasi serta pemikiran politiknya,” jelas Taufik.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti kritik masyarakat kepada DPR tentang minimnya UU yang dihasilkan. Dijelaskan Pimpinan DPR Korpolkam ini, mestinya mengukur kinerja Dewan jangan melihat UU yang diterbitkan sebab usulan UU diajukan tiga pihak yaitu DPR, Pemerintah dan DPD. Sehingga tidak ada benchmark karena DPR bukan pabrik undang-undang.

Bahkan lanjutnya, Presiden sempat memberi pernyataan hanya akan mengajukan 4-5 RUU, tetapi ironisnya yang diajukan masih cukup banyak 10 hingga 12 RUU. Ditambahkan bahwa DPR Bersama pemerintah menyusun perencanaan program pembentukan UU yang biasa disebut Prolegnas.

Ada prolegnas 5 tahun, ada prolegnas prioritas dalam kurun waktu satu tahun. Namun karena sarat dengan berbagai kepentingan, maka pembuatan UU tidak bisa langsung jadi seperti pembuatan paper. Contohnya UU KUHP yang telah disusun sejak tahun 1960 diharapkan periode ini selesai, juga banyak UU lain yang tarik menariknya sangat alot seperti UU Pemilu. ■ *(tim parle)*

DPR TERUS BERUPAYA HASILKAN UU YANG IMPLEMENTATIF

Memasuki tahun ketiga periode keanggotaan 2014-2019, pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya didasarkan pada pencapaian target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DPR terus berupaya agar undang-undang yang dihasilkan dapat diimplementasikan seefektif mungkin dan memiliki visi jauh ke depan.



foto: jtkd/inn

Ketua DPR RI, Setya Novanto

dilakukan secara parsial sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan energi yang besar untuk menyelesaikannya.

Di masa yang akan datang DPR bersama Pemerintah harus semakin meningkatkan kerja bersama di bidang legislasi, baik melalui komitmen untuk melakukan pembahasan secara efektif dan efisien maupun komitmen untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas.

Aspek kualitas ini akan menjadi perhatian DPR, agar UU yang dihasilkan tidak saja bisa menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa substansi UU tersebut sejalan dengan jiwa dan semangat ideologi Pancasila dan Konstitusi, UUD 1945.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Ketiga 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sidang sebelumnya yang menyelesaikan 16 (enam belas) RUU.

Meskipun meningkat, Ketua DPR meminta Dewan dituntut untuk terus bekerja keras agar target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tercapai. Kinerja legislasi DPR juga dipengaruhi oleh politik legislasi pemerintah dan semangat dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara DPR dan Pemerintah dalam melaksanakan Prolegnas sehingga capaian kinerja legislasi akan meningkat setiap tahun, baik kuantitas maupun kualitas. Kekuasaan membentuk undang-undang memang berada di tangan DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Tahun 1945. Namun dalam pembahasannya dilakukan bersama-sama antara DPR dan Pemerintah. Sejauh ini, RUU yang kita selesaikan menjadi undang-undang selalu membawa amanat rakyat, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, DPR RI juga melakukan penyempurnaan dan penguatan demokrasi substansial

Sebagaimana praktek di negara demokrasi yang telah mapan, over regulated sangat dihindari. Ke depan perencanaan legislasi di DPR hendaknya tidak hanya bertumpu pada sejumlah RUU yang ditargetkan. Karena itu, DPR bersama Pemerintah perlu mengevaluasi bentuk Prolegnas yang selama ini masih menitikberatkan pada jumlah.

Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto menyambut HUT DPR ke 72, atau pengabdian tahun ketiga DPR periode 2014-2019. Menurut Novanto, secara substansial, sebuah RUU tidak harus mengatur secara komprehensif dari hulu hingga hilir, melainkan dapat

melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peningkatan Kesejahteraan

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Novanto menyebutkan, DPR sudah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU tentang APBN Tahun 2017, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016, RUU tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017, Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2018, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

Dalam setiap pembahasan APBN bersama dengan pemerintah, DPR berpedoman dan berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui alokasi dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, meningkat 188,93 persen dibandingkan tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa.

Upaya lain adalah peningkatan porsi alokasi transfer ke daerah dalam anggaran belanja negara. Sejak tahun 2015, rata-rata porsi alokasi transfer ke daerah mencapai 36,32 persen setiap tahunnya. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 5 tahun lalu yang hanya 32,09 persen. Pilihan politik anggaran ini didasarkan pada keyakinan DPR bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia hanya dapat dicapai dengan mempercepat proses pembangunan di seluruh daerah, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR pada Tahun Sidang 2016-2017 dilakukan melalui rapat dan kunjungan kerja, baik pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik berdasarkan isu yang berkembang. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sangat dinamis sesuai dengan

perkembangan dan kondisi di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan DPR merupakan bagian dari prinsip checks and balances dalam sistem kekuasaan dan ketatanegaraan.

Selama Tahun Sidang 2016-2017, DPR telah membentuk 2 (dua) Panitia Khusus (Pansus) non-RUU, yaitu Panitia Angket DPR RI terhadap Pelindo II dan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK. Selain itu, DPR juga telah membentuk 7 (tujuh) Tim Pengawas, antara lain Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tim Pengawas DPR RI tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Aktivitas diplomasi parlemen juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR. Di berbagai kesempatan, baik dalam sidang-sidang fora antarparlemen dan non-parlemen, serta melalui aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral, DPR secara aktif dan konsisten memperjuangkan kepentingan nasional dan menaruh perhatian pada isu-isu internasional. Bahkan DPR juga diberi kepercayaan untuk memimpin jabatan penting di beberapa organisasi parlemen internasional seperti di IPU dan GOPAC.

Hingga Tahun Sidang 2016-2017, penguatan kelembagaan DPR sebagai lembaga legislatif terus dilakukan. Seluruh kegiatan penguatan kelembagaan DPR ini dapat dilihat berdasarkan implementasi kebijakan kerumahaan dan anggaran



Ketua DPR RI, Setya Novanto

DPR. Selain itu, Pimpinan DPR turut aktif memastikan seluruh kegiatan prioritas untuk menunjang peningkatan kinerja DPR melalui penyusunan blue print reformasi DPR yang disusun oleh Tim Implementasi Reformasi DPR. Dalam rangka penguatan kelembagaan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terus berusaha mewujudkan integritas dan akuntabilitas Anggota DPR melalui penegakan Kode Etik DPR. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kehormatan Anggota DPR.

Seiring dengan semangat DPR untuk melakukan reformasi dan dinamika kerja yang sangat tinggi, sistem pendukung DPR yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR turut meningkatkan kinerjanya. Salah satu upaya perbaikan kinerja dituangkan dalam rencana reformasi birokrasi yang komprehensif, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, tata kelola, sarana dan prasarana, serta anggaran.

Upaya serius DPR untuk menjadi lembaga yang mudah diakses oleh publik telah membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya penilaian objektif dari sebuah lembaga penyedia jasa pengembangan teknologi di Jerman (GIZ) untuk AIPA bahwa DPR menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan di antara parlemen se-Asia Tenggara. ■ (mp)

SUDAH BANYAK YANG DILAKUKAN DPR TAPI MASIH BISA TERUS DIMAKSIMALKAN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM, Fadli Zon menilai dalam HUT DPR RI ke-72 tahun menjadi saat yang tepat untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi DPR sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang.

Berbicara tentang amanah Undang-undang (UU) tentang tugas dan fungsi DPR, tepatnya dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD) disebutkan bahwa tugas DPR RI itu adalah membuat undang-undang bersama dengan pemerintah, pengawasan, dan budgeting, serta ditambah dua fungsi lainnya, yakni representasi dan fungsi diplomasi parlemen.

Dipaparkan Fadli, mengingat DPR tempat berkumpulnya banyak kepentingan yang ada (dari sepuluh fraksi atau partai), hal itu membuat DPR berbeda dengan eksekutif. Kalau eksekutif ada program, lalu dilaksanakan, tidak ada perdebatan didalamnya. Sedangkan DPR (bukan eksekutif), sehingga ketika membuat Undang-Undang harus dengan mekanisme persetujuan sepuluh fraksi (atau melalui tata cara voting), itu pun kemudian harus dibahas bersamaan dengan pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, menurut Fadli, selama ini masyarakat kerap mengkritik DPR dari jumlah undang-undang (UU) yang dihasilkan. Padahal UU itu bukan dilihat hanya dari jumlahnya, karena usulan UU itu berasal dari DPR, pemerintah dan DPD. Sehingga tidak ada *benchmark*, karena DPR bukan pabrik Undang-Undang. Bahkan



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Fadli Zon

Presiden sempat memberi pernyataan hanya ingin membuat 4 atau 5 undang-undang saja. Tapi ironisnya pemerintah sendiri mengusulkan 10, 12, hingga 13 undang undang.

DPR bersama pemerintah menyusun perencanaan program pembentukan undang-undang yang biasa disebut Prolegnas (Program legislasi nasional). Ada Prolegnas 5 tahun dan prolegnas prioritas dalam kurun waktu satu tahun. Namun karena sarat dengan kepentingan tadi, sehingga pembuatan undang-undang tidak bisa langsung jadi seperti membuat paper atau makalah. Sebut saja UU KUHP yang telah disusun

sejak tahun 60-an (kita harapkan periode ini selesai). Begitu juga dengan UU lain yang tarik menariknya alot, seperti UU pemilu.

Namun jika Undang-undang tersebut menyangkut kepentingan umum, seperti disabilitas yang merupakan Usulan DPR, Fadli meyakini akan cepat terselesaikan. "Sejauh ini tidak sedikit undang-undang yang berasal dari usulan DPR yang berhasil disusun. Mungkin ke depan kita bisa melihat revisi atau pembuatan UU baru yang lebih cepat lagi. Tapi kita tidak ingin semua hal diregulasi, nanti jika semua hal diregulasi yang sulit masyarakat

“Ada plus minusnya, kalau kita terlibat sampai satuan tiga, kita bisa mengawasinya, tapi kalau tidak tahu maka kita tidak bisa mengawasi secara utuh. Sementara kalau kita terlibat dalam satuan tiga maka akan memunculkan peluang untuk melakukan kongkalikong, dan korupsi akan muncul,”

juga. Ada hal-hal yang harus diatur menyangkut kepentingan umum, tapi ada hal-hal yang tidak perlu diatur,” ungkap Fadli.

Terkait adanya *Judicial review* produk undang-undang yang sudah dihasilkan DPR bersama pemerintah, menurut Fadli itu adalah hal yang biasa untuk sebuah Negara demokrasi. Negara demokrasi ada mekanisme orang yang tidak puas dengan sebuah undang-undang, maka ia bisa mengajukan *Judicial review*. Karena mungkin dia berbeda dalam substansi. Misalnya UU itu memiliki substansi liberal, maka orang-orang yang tidak suka dengan liberalisme tentu melakukan *Judicial Review*. Disinilah peran lembaga konstitusi untuk menentukan apakah

undang-undang tersebut sudah sesuai konstitusi atau tidak.

Dari sisi pengawasan, Politisi dari Fraksi Gerinda ini menilai Komisi, AKD maupun Pimpinan DPR sudah cukup baik menjalankannya (meskipun masih bisa lebih dimaksimalkan). Sementara fungsi budgeting, ia melihat sudah sesuai dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi yang ada di DPR. Walaupun DPR tidak terlibat dalam satuan tiga, sehingga tidak mengetahui secara pasti penggunaannya. Namun masih banyak yang harus diawasi supaya tidak ada penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang.

“Ada plus minusnya, kalau kita terlibat sampai satuan tiga, kita bisa mengawasinya, tapi kalau tidak tahu maka kita tidak bisa mengawasi secara utuh. Sementara kalau kita terlibat dalam satuan tiga maka akan memunculkan peluang untuk melakukan kongkalikong, dan korupsi akan muncul,” ujar Fadli.

Selain ketiga fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, DPR juga memiliki dua fungsi tambahan, yakni fungsi diplomasi parlemen dan representasi. Fungsi

diplomasi parlemen misalnya, DPR mendukung diplomasi pemerintah untuk kepentingan nasional. Sedangkan dalam fungsi representasi, Fadli melihat DPR semakin dekat dengan masyarakat di konstituennya, hal itu salah satunya karena ada mekanisme dan peningkatan intensitas untuk reses dan menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam fungsi diplomasi parlemen dimana Fadli Zon menjadi ketua Tim Penguatan diplomasi Parlemen, ia mengaku bahwa sejauh ini DPR telah melakukan hal itu dengan baik. Itu terbukti dengan keterlibatan DPR secara aktif diberbagai forum internasional, seperti IPU, AIPA, APPF, APA, PUIC dan beberapa forum konferensi internasional lain. Bahkan DPR juga memiliki group kerjasama bilateral dengan Negara-negara lain.

Di hari lahir DPR yang ke-72 tahun ini, Fadli juga menyesalkan masih adanya anggota DPR yang tersandung kasus hukum, baik itu tindak pidana korupsi atau lainnya. Meskipun sebenarnya oknum di semua lembaga Negara sempat terkena kasus itu, tidak hanya legislative, melainkan juga eksekutif dan yudikatif. ■ (Ayu)



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Fadli Zon didampingi sejumlah Anggota DPR RI di Kampung Bayam, Jakarta Utara

ULTAH DPR RI KE 72

TARGET LEGISLASI HARUS DITINGKATKAN

Baru saja, DPR RI berulangtahun yang ke-72, tepatnya tanggal 29 Agustus 1945 lalu. Mengulang kilas balik, DPR resmi terbentuk dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Saat itu KNIP beranggotakan 137 orang dan dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Total terdapat 18 periode keanggotaan yang telah dilalui oleh DPR sejak era KNIP, yaitu DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat, DPRS, DPR hasil Pemilu Pertama, DPR setelah Dekrit Presiden, DPR Gotong Royong (DPR-GR), DPR-GR minus PKI, DPR-GR Orde Baru, dan DPR hasil Pemilu ke-2 hingga ke-11 saat ini.

Meninggung Ultah kali ini, memang masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPR RI khususnya penguatan sektor energi, perdagangan dan ekonomi, dimana semuanya membutuhkan kerja keras dan konsisten untuk bangsa dan negara.

“Kita ketahui untuk sektor energi pemerintah juga telah menargetkan renewable energy (energi terbarukan) sampai 23 persen tahun 2020. Dimana harus didorong oleh energi angin, sebagai tambahan energi yang sudah ada,” ujar Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto kepada Parlementaria.

Selain itu, Agus juga menyoroti perlu dilibatkannya industri lokal dalam perakitan komponen energi baru terbarukan tersebut, jangan dirakit diluar negeri. “perakitan seharusnya juga dibuat di Indonesia jangan di luar negeri,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia lambat laun akan menuju energi baru terbarukan percepatan energi Geothermal di Indonesia. Karena saat ini energi tersebut baru 5 persen karena itu perlu langkah bersama



Wakil Ketua DPR RI Korinbang, Agus Hermanto

mendorong percepatan energi tersebut. “Target pemerintah itu sebesar 35 MW bisa terpenuhi apabila kita fokus, dan berjuang bersama mencapai target tersebut,” ujarnya.

Selain Geothermal, dampak langsungnya juga bisa dimanfaatkan seperti air panasnya yang dapat dipergunakan sebagai terapi kesehatan atau relaksasi. “Seperti yang ada di Islandia, Bluelagoon dapat juga dibuat di Indonesia.

Padahal di Islandia itu hanya 35 MW, sementara Lahendong mencapai 100 MW,” terangnya. Dia melanjutkan, dengan adanya Blue Lagoon, Pemerintah Islandia dapat meningkatkan industri pariwisatanya mencapai delapan kali lipat di dunia.

Dia menambahkan, selain air panas, dapat juga dikembangkan industri perikanan. Karena buangan dari Geothermal dapat dimanfaatkan untuk industri perikanan, seperti

Indonesia lambat laun akan menuju energi baru terbarukan percepatan energi Geothermal di Indonesia. Karena saat ini energi tersebut baru 5 persen karena itu perlu langkah bersama mendorong percepatan energi tersebut. "Target pemerintah itu sebesar 35 MW bisa terpenuhi apabila kita fokus, dan berjuang bersama mencapai target tersebut,"



Pembangkit Energi Panas Bumi Istandia

<http://www.savingjceland.org>

udang dan ikan. "kita mengharapkan Indonesia dapat berkembang jangan hanya menerima pasar begitu saja, ini adalah hal yang sangat penting. Kami akan mendorong kebijakan energi yang lebih jelas dan transparansi serta harga untuk energi terbarukan dapat lebih ekonomis,"paparnya.

Agus menilai, saat ini pemerintah Indonesia belum berpihak kepada energi baru terbarukan, karena itu Parlemen harus mendorong peningkatan pencapaian penggunaan energi baru dan terbarukan.

Legislasi minim

Berbicara mengenai capaian DPR saat ini, Agus mengakui masih banyak kekurangan dan ketinggalan. Karena itu, kita semua harus mendorong peningkatan capaian target DPR untuk kemajuan bangsa dan negara. "Banyak prestasi yang kita capai begitu juga kekurangannya, fungsi budgeting dan pengawasan sudah cukup bagus, sedangkan untuk legislasi memang mengalami penurunan target UU,"ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini target legislasi yang diketok dan diproduksi DPR masih minim. "Untuk legislasi keberpihakannya tidak hanya di DPR saja tetapi juga harus disetujui atau diketok bersama dengan Pemerintah,"katanya.

Menurutnya, keinginan Pemerintah saat ini yaitu agar target legislasi tidak terlalu banyak, padahal target Prolegnas DPR yang diketok itu banyak. "Kedepan kita ingin membahas bersama dengan pemerintah mana saja yang prioritas dan dikedepankan sehingga target dapat tercapai,"jelasnya. ■ (si)



foto: Eka/inv

Kunjungan Wakil Ketua DPR RI Korinbang, Agus Hermanto ke PT. Pertamina Geothermal Energi di Bandung

MASYARAKAT DIHARAPKAN TIDAK APRIORI KEPADA DPR

Peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat RI ke-72 menjadi momentum Dewan untuk terus meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, juga menjadi momentum DPR untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, terutama pernyataan pribadi, yang berimbas kepada citra DPR.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan kepada seluruh Anggota Dewan untuk lebih menyaring dalam memberikan pernyataan kepada publik. Pasalnya, jika pernyataan itu membentuk opini di masyarakat, dan akhirnya membentuk fakta, itu sangat membahayakan DPR. Citra DPR dapat tergerus terus - menerus dengan adanya opini yang tidak tepat.

“Ayo kita bersama-sama membuat masyarakat agar tidak apriori terhadap DPR. Mari kita syukuri, DPR di umur 72 tahun ini harapannya semakin lebih banyak proaktif dan produktif,” kata Taufik, saat ditemui Reporter Sofyan dan Fotografer Jaka dari Parleментарia di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Terkait produktivitas Dewan dalam menjalankan kinerja, Taufik juga mengimbau kepada seluruh Anggota Dewan untuk meningkatkan kehadiran di Rapat Paripurna. Pasalnya, Paripurna dinilai menjadi etalase politik DPR dan sorotan seluruh lapisan masyarakat. Pun kerap kali media menyoroti absen kehadiran Anggota Dewan saat Paripurna.

“Kami ingatkan kepada fraksi, khusus untuk paripurna untuk hadir semua. Ketika ada paripurna tidak boleh ada kegiatan lain. Karena terlepas dari agenda

politiknya agak sedikit melelahkan, ikon DPR ada di Paripurna. Saya sangat sedih kalau kemudian pada saat paripurna yang ditonjolkan kehadiran. Tapi itu juga menjadi cambuk tersendiri bagi DPR,” kata Taufik.

Politisi Partai Amanat Nasional itu pun mencermati isu pembangunan Gedung DPR RI yang santer beredar di masyarakat. Menurutnya, antara pembangunan gedung dengan kinerja tidak bisa disandingkan secara langsung. Pasalnya, gedung yang dibangun menggunakan keuangan negara, merupakan fasilitas negara. Ada beberapa hal yang harus diluruskan terkait isu di masyarakat.

“Sekarang ini mau bangun Gedung

DPR orang-orang ribut, padahal tugas DPR itu bukan membangun gedung. Ada hal yang harus diluruskan kepada masyarakat, kalau gedung itu milik negara. Membangun gedung tidak ada hubungannya jika disandingkan dengan hasil kinerja,” imbuh Taufik.

Semakin Dewasa

Menginjak usia ke-72 ini pun menjadi tonggak sejarah bagi DPR yang semakin dewasa dan semakin menuju era parlemen modern pasca reformasi. Taufik pun melihat, DPR saat ini pun dinilai paling legitimate, karena DPR di dua periode terakhir, telah menjalani seluruh proses pemilihan dengan sistem elektoral terbuka. Sehingga, satu pemilih mempunyai satu nilai suara, dan di tangan masyarakatlah, arah dan bangsa ini ditentukan.

“Kalau kemudian DPR selalu dikritisi terus menerus, menjadi kesannya kurang baik di masyarakat. Padahal di sisi lain kita setiap lima tahun ada ritual rutin demokrasi, bagaimana mungkin yang sudah menjadi pilihan masyarakat, terlepas apapun, ini tetap menjadi parlemen yang betul-betul harus kita hormati dan hargai bersama-sama,” kata Taufik.

Taufik juga melihat, DPR pada dua periode terakhir ini, bukan hanya terlihat bagaimana DPR mendapat kritik dari



Wakil Ketua DPR RI Korekku, Taufik Kurniawan

masyarakat, namun juga ada semacam pendidikan politik untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga ia mengajak masyarakat yang selalu mengkritisi, untuk menjadi Anggota DPR, dengan pilihan partai politik masing-masing.

“Artinya ini milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terlepas dari hal-hal lain, tentunya kita mengharapkan animo seluruh masyarakat untuk menjadi Anggota DPR itu suatu ketika berjalan seimbang dengan proses elektoral terbuka yang sudah menjadi tradisi pada dua periode terakhir ini,” harap Taufik.

Dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, Taufik melihat bahwa hal itu turut menjadi pilar penentu dari poin yang menentukan demokrasi Indonesia. Dengan adanya berbagai media sosial, informasi dapat tersebar dengan cepat. Kemajuan demokrasi ditengah-tengah proses elektoral yang terbuka, ditambah kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat, tentunya menjadi navigasi.

“Navigasi kepada setiap parlemen di dunia ini, untuk bisa tetap on the track berkaitan institusi. Ini menjadi hal yang patut kita cermati bersama-sama. Sehingga dalam refleksi 72 tahun yang sekarang ini, dalam kaitan demokrasi kita, bahwa dengan kemajuan teknologi informasi ini,

sedemikian mudah orang menyampaikan pendapat maupun aspirasi-aspirasi pemikiran politiknya,” tambah Taufik.

DPR Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Over Optimis

Khusus untuk kinerja di fungsi anggaran, Taufik memastikan pihaknya selalu mengingatkan pemerintah terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. DPR pun selalu mengingatkan, hasil audit dari lembaga audit negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan RAPBN tahun berikutnya.

Misalnya pada RAPBN 2018, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu mengaku pihaknya telah mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu over optimis, khususnya terkait laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen, dinilai masih terlalu over optimis. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen.

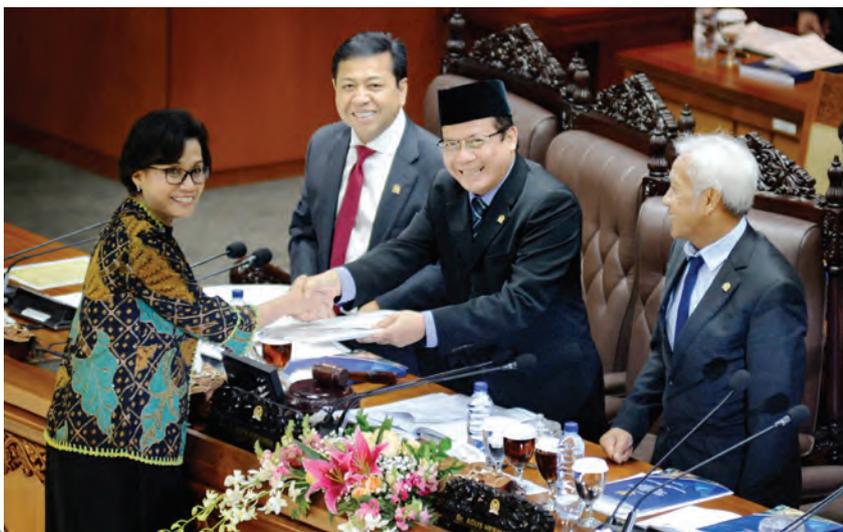
“Semua fraksi mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu. Mengingat, situasi

“Artinya ini milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terlepas dari hal-hal lain, tentunya kita mengharapkan animo seluruh masyarakat untuk menjadi Anggota DPR itu suatu ketika berjalan seimbang dengan proses elektoral terbuka yang sudah menjadi tradisi pada dua periode terakhir ini,”

global belum membaik dan kurang bersahabat dengan kondisi ekonomi Indonesia,” jelas Taufik.

Ia pun berharap, aspek pembangunan manusia dan berbagai program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan pekerjaan pun turut disinggung beberapa fraksi. Program yang sifatnya padat karya harus didukung penuh. Termasuk program yang menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan.

“Dukungan spirit dari DPR itu pada prinsipnya juga mengarah pada aspek kehati-hatian agar anggaran juga dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■⁽⁹⁾



Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menerima keterangan pemerintah atas KEM dan PPKF 2018

MEMPERKUAT PARLEMEN SEBAGAI DAULAT RAKYAT

Pada 17 Agustus tahun 1945, Republik Indonesia diproklamkan, demokrasi menjadi kesepakatan sistem pemerintahan yang dipakai, maka konsekuensi dari itu rakyat memegang daulat atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di bulan yang sama, dibentuklah lembaga perwakilan rakyat, yang saat ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal peresmian KNIP 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai dan hari lahir DPR RI.

Dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945 ditegaskan bahwa “... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,... Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan ... “. Hal ini jelas memberikan penegasan

bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 di atas juga bermakna bahwa

rakyat adalah pemegang Kedaulatan tertinggi di republik ini. Artinya, setiap individu rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan dan atau kalau boleh dikatakan adalah para “pemegang saham” Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini pada Agustus 2017 Indonesia dan dan Dewan Perwakilan Rakyatnya memasuki usia ke 72. Dalam Refleksi 72 tahun DPR RI Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan kembali tentang daulat rakyat yang direpresentasikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menjadi penegasannya saat acara refleksi di hadapan para awak media yang bertugas di kompleks parlemen adalah memperkuat parlemen sebagai daulat rakyat. “Ini Indonesia, negara besar, negara demokrasi ini mesti dijaga, maka parlemen ini sebagai wujud dari daulat rakyat, kita bikin sekuat mungkin,” tandasnya.

Bagi Fahri memperkuat daulat



Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah

Namun dia masih menyangkan sampai saat ini keleluasaan DPR tidak sebanding dengan keleluasaan pemerintah.

“Kekuasaan di bidang legislasi masih dikontrol oleh eksekutif, kekuasaan di bidang anggaran hampir mutlak oleh eksekutif, saya mau bertanya berapa persen yang bisa diintervensi oleh legislatif keuangan eksekutif, kan berat itu mengubahnya susah,”

rakyat lewat parlemen dengan cara memberikan keleluasaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga ini. DPR mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan



Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah menghadiri konferensi besar dewan adat di Biak, Papua

undang-undang dan APBN.

Namun dia masih menyangkan sampai saat ini keleluasaan DPR tidak sebanding dengan keleluasaan pemerintah. “Kekuasaan di bidang legislasi masih dikontrol oleh eksekutif, kekuasaan di bidang anggaran hampir mutlak oleh eksekutif, saya mau bertanya berapa persen yang bisa diintervensi oleh legislatif keuangan eksekutif, kan berat itu mengubahnya susah,” papar Fahri.

Dia mencontohkan waktu pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, DPR melarang PMN namun tidak bisa. Bahkan sampai saat ini pertanggungjawaban PMN belum diketahui. “Kita mau melarang mereka, pakai waktu itu PMN saja, kan tidak bisa, habis PMN disahkan, menterinya gak diajak rapat sampai sekarang, sehingga pertanggungjawaban PMN sekarang kita gak tau, padahal itu duit gede dan kita gak ribut soal duit ini,” ungkap Fahri.

Dalam kondisi seperti itu fokus perhatian masyarakat tidak peka,

dan tidak banyak yang mengkritisi hal tersebut kepada pemerintah. Malah anggaran yang tidak sebanding dengan PMN, yang akan digunakan DPR untuk perbaikan fasilitas gedung, contohnya toilet diributkan oleh beberapa kalangan sehingga mempengaruhi kepercayaan rakyat pada DPR, Fahri menyangkan hal tersebut. “Sedangkan uang DPR yang kecil-kecil soal perbakan toilet, parfum ruangan, mesin cuci, AC yang kita ributkan oleh Formapi dan Fitra,” ujar Fahri.

Oleh sebab itu dalam refleksi ke 72 Tahun DPR RI ini, Fahri menggugah kesadaran rakyat bahwa mewujudkan perlemen moderen yang kuat juga membutuhkan kesadaran rakyat. Rakyat yang peka pada keseimbangan kewenangan di cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena negara adalah wujud simbolik manifestasi dari daulat rakyat, daulat rakyat adalah kumpulan manusia individu berdaulat yang meletakkan kedaulatannya dalam bentuk negara. ■ (eko)

KUANTITAS LEGISLASI BUKAN SATU-SATUNYA TOLAK UKUR KINERJA DPR

Kuantitas undang-undang yang dihasilkan DPR sering kali menjadi tolak ukur kinerja dewan, padahal kalau dicermati lebih lanjut, tidak selamanya itu bisa menjadi barometer keberhasilan. Menginjak usia Dewan Perwakilan Rakyatnya yang ke 72 Badan Legislasi DPR berusaha memberikan pemahaman kepada publik tentang kerja-kerja legislasi DPR.



Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas

Pada priode masa jabatan DPR saat ini, jangka waktu Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 telah memasuki paruh waktu (semester) kedua. Dalam semester pertama yang telah dilalui, capaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 masih menunjukkan hasil yang belum optimal, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Padahal jika dibandingkan dengan jumlah Prolegnas RUU prioritas tahun sebelumnya, jumlah Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017 sudah cukup realistis untuk dapat dilaksanakan, serta sesuai dengan alokasi waktu dan beban

kerja yang ada.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan, Prolegnas selain sebagai instrumen perencanaan juga sekaligus instrumen pengendalian dalam pembentukan undang-undang. Di dalam Prolegnas dimuat gambaran obyektif mengenai kebutuhan undang-undang yang diperlukan dan nama lembaga yang mengusulkannya.

Dia menjelaskan, ada dua jenis Prolegnas yang disusun berdasarkan jangka waktunya. Pertama, Prolegnas RUU Jangka Menengah lima tahunan. Kedua, Prolegnas RUU Prioritas

Tahunan. Setiap RUU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahunan harus terdaftar dahulu dalam Prolegnas RUU Jangka Menengah lima tahunan.

Dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 ditetapkan sebanyak 182 RUU dan 5 RUU Daftar Kumulatif Terbuka. Berdasarkan ke-49 RUU Proegnas Prioritas Tahun 2017 tersebut, sebanyak 31 RUU diusulkan oleh DPR, sebanyak 15 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan sebanyak 3 RUU diusulkan oleh DPD.

“Ke-49 RUU Prolegnas prioritas tahun 2017 tersebut merupakan bentuk Komitmen DPR, Pemerintah dan DPD sebagai lembaga pembentuk undang-undang dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional sebagaimana diuraikan di atas,” papar Supratman.

Dia juga melaporkan, berdasarkan ke-31 RUU usul DPR, sebanyak 3 RUU sudah diundangkan menjadi UU, sebanyak 11 RUU sudah dalam tahap pembicaraan tingkat satu di DPR, sebanyak 1 RUU menunggu surat Presiden, sebanyak 1 RUU menunggu dijadwalkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk diputuskan sebagai RUU usul DPR, sebanyak 5 RUU sedang diharmonisasi di Badan Legislasi,

“DPR, Pemerintah dan DPD juga harus saling menghormati terhadap RUU yang menjadi usulan masing-masing. DPR tidak boleh menghambat penyelesaian RUU yang menjadi usulan Pemerintah atau DPD. Demikian juga Pemerintah dan DPD tidak boleh menghambat penyelesaian RUU yang menjadi usulan DPR,”

dan sebanya 10 RUU dalam tahap penyusunan oleh komisi atau anggota DPR.

Supratman juga mengungkapkan, saat ini DPR, Pemerintah, dan DPD telah berkomitmen. Ketiganya bersepakat bersama-sama untuk melaksanakan kehendak rakyat melalui program pembentukan undang-undang guna mewujudkan tujuan dari pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Membangun komitmen bersama bermakna membangun kesepakatan antara para pembentuk undang-undang. Komitmen untuk taat dan konsisten menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 yang menjadi kesepakatannya. DPR harus taat dan konsisten dengan RUU yang

menjadi usulannya. Pemerintah harus taat dan konsisten dengan RUU yang menjadi usulannya. Demikian juga DPD harus taat dan konsisten terhadap RUU yang menjadi usulannya.

“DPR, Pemerintah dan DPD juga harus saling menghormati terhadap RUU yang menjadi usulan masing-masing. DPR tidak boleh menghambat penyelesaian RUU yang menjadi usulan Pemerintah atau DPD. Demikian juga Pemerintah dan DPD tidak boleh menghambat penyelesaian RUU yang menjadi usulan DPR,” ujar Supratman.

Segala permasalahan yang ada terkait Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 harus dikomunikasikan secara baik dan dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme dan tahapan dalam pembentukan undang-undang. Tidak boleh ada upaya apapun yang dapat menghentikan proses pembentukan undang-undang tanpa persetujuan dari para pembentuk undang-undang itu sendiri.

Menurut Supratman, semua ada prosedurnya dan hal itu juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komitmen bersama ini penting untuk dilaksanakan agar pembentukan undang-undang dapat terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Peraturan yang banyak di sebuah negara tidak selamanya baik, karena jumlah aturan yang banyak belum tentu efektif dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu kualitas undang-undang harus menjadi perhatian para perancang undang-undang. Maka dari itu DPR, DPD dan Pemerintah berkomitmen akan fokus menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan publik.

“Baleg kemarin dalam melakukan raker bersama Menteri Hukum dan HAM mengambil sebuah garis yang

baik dengan DPR. Akan kita batasi jumlah prolegnas di tahun yang akan datang. Mana undang-undang yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka itu akan kita prioritaskan,” ungkap Supratman.

Selain itu, dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang secara komprehensif juga perlu memperhatikan tiga dimensi waktu yang ada, yaitu: dimensi masa lalu, dimensi masa sekarang, dan dimensi masa yang akan datang. Dimensi masa lalu terkait dengan nilai-nilai perjuangan bangsa. Dimensi masa sekarang terkait dengan kondisi obyektif yang ada dengan lingkungan strategisnya.

Dimensi yang akan datang terkait dengan upaya optimal untuk mewujudkan keinginan bersama yang telah dicita-citakan. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut maka proses transformasi hukum dari hukum positif (*ius constitutum*) menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dapat dilakukan.

Program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai bagian pembangunan hukum nasional merupakan instrumen perencanaan dalam program pembentukan undang-undang. Prolegnas disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu. Prolegnas, secara operasional memuat daftar rancangan undang-undang yang disusun berdasarkan skala prioritas serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional.

Penyusunan prolegnas secara operasional senantiasa mendasarkan pada kebutuhan hukum yang ada, landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. ■ (eka)

DPR SUDAH BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA

29 Agustus 2017 ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia genap berusia 72 tahun. DPR sudah bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Ke depan dalam rangka menuju parlemen modern, kinerja dewan perlu ditingkatkan. Selain harus meningkatkan kinerjanya, sarana dan prasarana pendukung pun harus ditingkatkan. Disamping itu fraksi akan diminta bekerja atau berupaya semaksimal mungkin, agar anggota-anggota fraksi bekerja lebih maksimal.

Hal tersebut dipaparkan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Capt. Anthon Sihombing dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Terwujudnya DPR sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa, dan Kredibel menjadi visi dalam Rencana Strategis (Renstra) DPR tahun 2015-2019. Sebagai lembaga yang modern pun harus didukung oleh teknologi informasi yang tepat. Hal itu guna menunjang tiga fungsi DPR, yakni pengawasan, anggaran dan legislasi.

Saat ini, kata Anthon, ruang kerja anggota dewan sudah tidak layak dan sudah banyak anggota dewan yang tidak mau tinggal di ruangan tersebut. Karena gedung tempat ruang kerjanya tersebut dibangun untuk beberapa ratus orang saja, sementara saat ini sudah dihuni oleh 4000 lebih orang sehingga keamanan, kenyamanan dan keselamatannya terganggu.

“Oleh karena itu, rencana pembangunan gedung baru DPR dilakukan untuk menunjang kinerja dewan karena saat ini Gedung Nusantara I yang menjadi tempat bagi 560 ruang

anggota dewan sudah tidak layak pakai karena over kapasitas,” katanya.

Dari hasil uji kelayakan yang dilakukan Kementerian PUPR, disebutkan bahwa gedung DPR sudah tidak layak pakai dengan ditandainya adanya pergeseran dan retak. “Hasil *assesment* yang dilakukan PUPR pun menyebutkan bahwa ada pergeseran dan retak. Kita meminta gedung baru itu adalah kebutuhan yang realitas, bukan mengada-ngada, Karena kita ingin anggota DPR nyaman bekerja di ruang kerjanya,” tutur Anthon.

Nantinya, rencana pembangunan gedung baru ini adalah multiyears

karena akan memakan waktu yang cukup panjang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembangunan gedung baru ini bukan untuk kepentingan anggota DPR periode 2014-2019 saja, namun untuk kepentingan anggota DPR periode selanjutnya. Dan anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp 320 miliar.

Nantinya pun, lanjut Anthon yang juga anggota Komisi V DPR ini, pemerintah yang akan membangun pembangunan gedung baru tersebut. Bukan dari DPR. Terkait lelang pun akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, bukan DPR. “Itu yang kerjakan pemerintah, bukan DPR. Urusan lelang itu dilakukan Sekjen. Yang kerjakan itu bukan DPR,” terangnya.

“Walaupun DPR adalah lembaga politik. Wajar sebagai BURT untuk memikirkan kepentingan seluruh anggota dewan. Karena anggota itu maunya nyaman kerja di ruangan, menerima tamu di ruang kerjanya,” sambungnya.



Ketua BURT DPR RI, Anthon Sihombing

Beberapa waktu lalu, Anthon bersama Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned mengunjungi kantor BPK dan MK untuk membandingkan situasi lingkungan kerja lembaga tinggi negara. Ruang kerja di kedua lembaga tersebut sangat berbeda dengan kondisi ruang kerja anggota DPR.

Di MK misalnya, satu lantai secara khusus diisi oleh 3 hakim anggota yang dibantu oleh 2 peneliti dan 2 sekretaris administrasi. Kondisi ruang kerja yang layak tersebut sangat berbeda dengan ruang kerja anggota DPR yang memiliki total 7 staf untuk setiap anggota DPR.

“Kita ingin bandingkan dengan di DPR. Di DPR, ruangnya sudah tidak memadai karena over kapasitas. Gedung itu dibangun dulu untuk maksimal 800 orang. Tapi sekarang yang mengunjungi DPR mencapai 5 ribu orang tiap hari,” ujar Anthon.

Ia menegaskan tidak ada rencana membangun apartemen DPR, melainkan adalah rencana pembangunan gedung untuk mendukung kerja dewan.

“Kita tidak pernah bicara apartemen. Yang kita rencanakan adalah pembangunan gedung untuk ruang kerja pengganti Gedung Nusantara I karena sudah tidak layak,” ujar Anthon.

DPR Harus Mudah Diakses Masyarakat

Menuju terwujudnya parlemen modern, selain harus didukung dengan teknologi yang baik, DPR juga harus mudah diakses oleh masyarakat dimanapun berada. “Sebagai lembaga yang berwibawa, DPR juga harus mempunyai kewibawaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan DPR sebagai lembaga yang kredibel, semakin hari DPR semakin dipercaya rakyat, sebagai lembaga tumpuan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya,” tegas Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso.

Ke depan, sambungnya, diharapkan DPR RI mampu menjadi lembaga yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. “Saya menilai pelaksanaan fungsi DPR semakin baik. Untuk mendukung fungsi legislasi, Kesetjengan DPR RI membentuk Badan Keahlian Dewan (BKD). Dengan adanya BKD, diharapkan akan memberikan bantuan secara substansi kepada produk-produk DPR,” papar politisi Partai Demokrat ini.

Artinya dengan adanya badan itu, diharapkan produk yang dikeluarkan DPR, baik itu Undang-Undang ataupun produk lainnya menjadi lebih berkualitas. Terkait fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah pun mencanangkan APBN tahun berlangsung, juga mendapat bantuan dari BKD untuk bisa merumuskan agar APBN tepat guna untuk pembangunan masyarakat di Indonesia.

“Dan pada fungsi pengawasan, kita lihat bahwa DPR RI sekarang jauh lebih maju dalam menerima aspirasi. Pengawasan itu dimulainya dari aspirasi dari masyarakat yang diterima DPR,” tambah anggota dewan dapil Jawa Barat ini.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat, ditampung secara tertulis maupun surat elektronik, termasuk melalui situs DPR atau media sosial, dan bertemu dengan masyarakat ketika anggota dewan di dapil, itu menjadi salah satu langkah awal pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

“Dengan demikian, apabila nanti ada yang disampaikan masyarakat terhadap persoalan-persoalan di daerah, tentu kita akan mengawasi, menyelidiki



Wakil Ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso

dan memberikan solusi agar hal itu diselesaikan dengan baik,” pungkas Agung.

Menanggapi penilaian objektif dari sebuah lembaga penyedia jasa pengembangan teknologi di Jerman (GIZ) untuk AIPA bahwa DPR menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan di antara parlemen se-Asia Tenggara, Agung menilai bahwa DPR selangkah lebih maju dibanding parlemen lain.

“Transparan kan artinya bagaimana kita memberikan pelaporan atas segala hal yang dilakukan DPR. Kalau laporan itu mudah diakses, jelas itulah lembaga transparan. Kita lebih maju daripada parlemen negara di Asia Tenggara, karena kita terbuka kepada publik,” jelas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Agung pun memastikan, publik dapat mengakses sebanyak-banyaknya tentang DPR, baik melalui situs DPR hingga media sosial DPR. Media daring dan media sosial DPR aktif menyebarkan informasi mengenai kegiatan dewan, baik di Kompleks Parlemen Senayan, maupun kegiatan di daerah dalam rangka kunjungan kerja.

■ (tim)

MENSEJAHTERAKAN RAKYAT LEWAT DIPLOMASI PARLEMEN

Diplomasi parlemen merupakan hal penting yang dilakukan oleh negara manapun dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tugas diplomasi itu juga terus dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang merupakan ujung tombak dalam menjalankan diplomasi.

BKSAP memang bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas konstitusi DPR. Tugas BKSAP tertera pada Pasal 75 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR, salah satunya yaitu untuk mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen dari negara lain, baik bilateral maupun multilateral.

Di usia DPR yang ke-72 tahun ini, sudah banyak resolusi yang telah dan masih dilakukan BKSAP demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf,

menjelaskan beberapa bulan yang lalu, DPR telah menggelar sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9. Pelaksanaan sidang AIPA itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kerja sama parlemen se-Asia Tenggara dalam menangani potensi konflik kawasan.

“Bulan Juli kemarin, DPR menjadi tuan rumah untuk caucus meeting AIPA. Acara ini dihadiri oleh 35 anggota parlemen dari sepuluh negara anggota ASEAN. Tema yang diangkat mengenai Maritime Cooperation dan Peace and Civility di ASEAN. Dari persidangan itu, kita menghasilkan 9 rekomendasi,” jelas Nurhayati saat ditemui Parlementaria di

ruang kerjanya beberapa pekan lalu.

Selain itu, lanjut Nurhayati, ada beberapa isu internasional yang menjadi perhatian BKSAP, antara lain mengenai pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim perdagangan internasional, keamanan maritim, keamanan kawasan, penegakan HAM, perdamaian di Timur Tengah, serta isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sementara dalam mendukung penguatan kerja sama bilateral, selama tahun sidang 2016-2017 BKSAP telah mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat, antara lain menerima kunjungan Parlemen Republik Korea, Ketua Parlemen Arab Saudi, Ketua Parlemen Thailand, dan Ketua Parlemen Bahrain.

“Di berbagai kesempatan baik dalam sidang-sidang fora antarparlemen dan non-parlemen serta melalui aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral, baik dalam pertemuan internasional maupun perorangan, kita secara aktif dan konsisten terus memperjuangkan kepentingan nasional serta menaruh perhatian pada isu-isu internasional,” tandasnya.

Terlebih, lanjut Nurhayati, delegasi Indonesia memiliki posisi penting di setiap forum internasional, yang membuat peran BKSAP begitu strategis. Saat ini, Nurhayati tengah diamanahkan menjadi Presiden Internasional Humanitarian Law (IHL). IHL merupakan komite untuk memajukan hukum humaniter dan akses bagi orang-orang di pengungsian akibat bencana alam dan konflik.

Menurut dia, semua negara termasuk Indonesia harus memiliki komitmen untuk memberikan kepedulian bagi pengungsi, khususnya yang berada di kawasan Irak, Suriah, serta daerah lain. “Pengungsi tidak hanya disebabkan oleh peperangan, namun juga bencana alam. Maka dari itu saya mendorong kepedulian masyarakat terhadap nasib pengungsi,



Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf

dan untuk mencegah adanya pengungsi akibat peperangan, saya memiliki tugas menjaga perdamaian dunia bekerja sama dengan PBB,” tuturnya.

Selain menjadi Presiden IHL, politisi dari Partai Demokrat itu juga pernah menjadi Presiden Komite Koordinator Perempuan Periode 2010-2012 dan 2012-2014. Selama diberikan amanah itu, pihaknya aktif menyuarakan kesetaraan gender serta keterwakilan perempuan pada setiap forum.

“Saya terus menyuarakan mengenai keterwakilan perempuan. Bahkan, saya juga membuat aturan apabila suatu negara hadir tanpa ada keterwakilan perempuan, akan mendapat hukuman sosial. Atas usaha itu, saat ini di setiap persidangan internasional selalu hadir perempuan yang mewakili negaranya,”

Kepada Parlemantaira, dia menjelaskan, terlepas dari jabatannya sebagai Presiden Komite Koordinator Perempuan, BKSAP tetap menyerukan kepada organisasi parlemen dunia untuk mendesak *World Trade Organization* (WTO), agar memberikan porsi lebih bagi keterwakilan perempuan baik dalam proses negosiasi maupun dalam kesepakatan yang dihasilkan.

“Itu kami sampaikan pada setiap sidang parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada tanggal 13-14 Juni 2016 lalu,” serunya, seraya menegaskan, dalam pertemuan yang dihadiri oleh 58 parlemen itu, Indonesia meneruskan agar isu gender ditempatkan sebagai konsideran saat juru runding WTO melakukan proses negosiasi sehingga keputusan yang diratifikasi memberikan dampak yang seimbang bagi setiap komponen masyarakat.

Usaha mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan terus dilakukan BKSAP. Bahkan, BKSAP menggelar *World Parliamentary*

Forum (WPF) on *Sustainable Development Goals* di Nusa Dua Bali. Ini merupakan forum pertama antarparlemen sedunia yang merupakan inisiatif DPR untuk membahas berbagai isu global, terutama tentang SDGs. Ada 45 negara hadir dalam forum internasional itu.

“Ini menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI, karena sejak dideklarasikan, ini menjadi kali pertama mengajak berkumpulnya seluruh delegasi untuk membahas progres agenda 2030 tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan dalam sidang itu ada tiga sesi pembahasan, yakni *Leave no One Behind*. Sesi itu membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Sesi kedua mengangkat topik *Ending Violence Sustaining Peace*, bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian. Terakhir, pada sesi ketiga membahas *Climate Action*, melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti *Paris Agreement*. Indonesia menekankan pentingnya mempromosikan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

“Nantinya outcome dari sidang itu akan menghasilkan Bali Declaration. Dan harapannya WPF akan terus berlanjut sebagai *legacy* di Indonesia. Kesuksesan acara ini menjadi penting, karena merupakan kali pertama dan inisiatif DPR dalam mendukung pemerintah mencapai agenda 2030,” tandasnya.

Selain tiga agenda itu, juga dibahas mengenai resolusi Uni Eropa (UE) yang bertajuk *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Resolusi itu dikeluarkan UE karena dua hal, pertama, soal pengurangan luas areal hutan atau deforestasi. Kedua, soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Delegasi Indonesia memiliki posisi penting di setiap forum internasional, yang membuat peran BKSAP begitu strategis. Saat ini, Nurhayati tengah diamanahkan menjadi Presiden Internasional Humanitarian Law (IHL). IHL merupakan komite untuk memajukan hukum humaniter dan akses bagi orang-orang di pengungsian akibat bencana alam dan konflik.

“Parlemen UE menuding pendirian dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit di banyak negara terkait dengan pelanggaran HAM, di antaranya pengusuran paksa, kekerasan bersenjata, penjeratan utang, dan diskriminasi terhadap masyarakat adat,” jelasnya.

Kehadiran UE sangat penting dalam WPF, karena akan membahas lebih lanjut resolusi sawit. Sebab, menurutnya, UE selalu memperlakukan sustainable palm oil dan isu ini dibawa pada forum tersebut. Sebagaimana diketahui, resolusi tersebut menuding kelapa sawit asal Indonesia sebagai pemicu deforestasi.

■ (rnm)

MELALUI POLITIK ANGGARAN BANGGAR UPAYAKAN APBN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tepat 29 Agustus 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasuki usia yang ke 72, di usia yang semakin tua ini, DPR telah menunjukkan upaya baik dalam menjalankan fungsi legislasi dalam tata negara trias politica.



Foto: Iyadhifin

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Azis Syamsudin

Sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, DPR selalu menunjukkan sikap kritis agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui, terdapat 3 fungsi pokok DPR yakni pengawasan, legislasi dan anggaran.

Badan Anggaran DPR (Banggar) adalah salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas pokok dalam menjalankan fungsi DPR yakni

politik anggaran. Di HUT DPR ke 72 ini, Banggar telah melakukan beberapa capaian guna mendukung preogram pemerintah

Ketua Banggar Azis Syamsudin pun turut bersuka cita atas HUT DPR ke 72 yang dalam pelaksanaan tugasnya sudah banyak yang bisa diapresiasi. Ia pun berharap kinerja DPR pun semakin dapat ditingkatkan.

“Saya ucapkan selamat pada seluruh stakeholder DPR, MPR dan DPD atas ulang tahunnya ke 72 dalam hal ini Pak Setya Novanto, Pak Oesman Sapta dan Pak Zulkifli Hasan. Di usia yang ke 72 ini sudah banyak hal yang bisa dilakukan,” terang Azis.

Politisi Golkar ini menyatakan saat ini anggota DPR semakin giat dalam menyerap aspirasi ke daerah dan memperjuangkan aspirasi tersebut saat rapat-rapat dengan pemerintah. Tentunya ini adalah satu hal yang perlu diteruskan

“Dari temen-temen anggota sudah banyak menyerap aspirasi ke daerah dan hambatan di daerah itu

diperjuangkan saat rapat dengan pemerintah,” tegas Azis.

Meskipun ia mengakui bahwa seluruh hambatan daerah belum diakomodasi secara maksimal, namun ia menyadari untuk mencapai tingkat maksimal dibutuhkan waktu yang bertahap (multi-years). “Dan pembahasan itu belum secara terpenuhi semua masukan dari masyarakat. Tapi itu secara bertahap dan berkelanjutan bagaimana pendekatan kepada masyarakat,” sambung Azis.

Beberapa perhatian yang didorong Banggar yakni kesediaan tabung gas 3 kg, penyediaan buku dan bibit serta penyediaan kesehatan untuk dapat ditingkatkan disetiap tahunnya. “Contoh dalam hal tabung gas 3 kg, subsidi listrik itu kita perhatikan. Lalu bagaimana penyediaan buku dan subsidi buku yang terkait program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat itu kita dukung,” terang Azis.

Azis pun juga menegaskan bahwa Banggar akan terus mendukung program pemerintah selama itu dalam rangka percepatan pembangunan. “Kita dukung dari parlemen untuk program pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan,” ujarnya.

Banggar juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah

Ia menegaskan akan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui politik anggaran sehingga program pemerintah agar dapat terkontrol dengan baik. “Kita tidak melakukan kebijakan teknis tapi kita melakukan kebijakan politik anggaran. Di Banggar kita mensupport program pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi, pengelolaan nilai kurs, dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas harga kita bantu

yang masih terisolasi, hal lain seperti peningkatan infrastruktur di daerah agar semakin berkembang kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Disamping itu percepatan di dalam infrastruktur untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah yang masih terisolasi. Agar daerah itu menjadi berkembang dan

ada kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan daerah setempat,” ujar Azis.

Ia menegaskan akan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui politik anggaran sehingga program pemerintah agar dapat terkontrol dengan baik. “Kita tidak melakukan kebijakan teknis tapi kita melakukan kebijakan politik anggaran. Di Banggar kita mensupport program pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi, pengelolaan nilai kurs, dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas harga kita bantu,” terangnya.

Banggar sebagai alat kelengkapan dewan yang fokus dalam pembahasan APBN disetiap tahunnya telah berupaya semaksimal mungkin agar postur anggaran yang disepakati mampu dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam RAPBN 2018 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4 persen, ia pun meminta pemerintah agar mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar target itu tercapai. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi diharapkan pemerintah mampu melakukan pendekatan pada masyarakat dari sisi kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan lain

sebagaimnya,” tukas Azis

Ia mengaku mendukung proyeksi pertumbuhan tersebut, meskipun ia menyadari untuk menggapainya banyak dipengaruhi berbagai faktor mikro dan makro. “Proyeksi Menkeu pertumbuhan ekonomi 5,4 itu didukung oleh banyak faktor baik mikro dan makro. Baik dari kebutuhan kepada masyarakat, kesehatan, pendidikan. Untuk menjaga itu perlu stabilitas nilai kurs, politik, hukum sehingga bisa terjaga stabilitasnya.” sambungnya.

Sinergitas yang baik antara Banggar dan Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan RAPBN disetiap tahunnya diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan kesejahteraan rakyat tidak saja menjadi tanggung jawab eksekutif saja, legislatif sebagai corong aspirasi rakyat juga memiliki andil penting dalam menciptakan fondasi keuangan yang mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.

Di HUT DPR ke 72, semestinya menjadi momentum untuk terus meningkatkan komitmen tersebut. Sehingga HUT tidak saja menjadi ajang *ceremony* saja, tetapi juga menjadi alasan untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan RAPBN yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. ■ (hs)



<http://www.terseponginiis.com>

MEMAKNA ULANG PARLEMEN MODERN

Pada Agustus 2017 ini, kita tertegun sejenak. Di tengah terpaan prinsip *bad news is good news* terhadap DPR, ada sebuah kabar menggembirakan datang dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Lembaga yang juga membantu Pemerintah Jerman dalam menjalankan keterbukaan itu menyatakan bahwa DPR RI adalah parlemen paling terbuka se-Asia Tenggara. Sebuah kado indah bagi DPR, di hari ulang tahunnya yang ke 72 ini.

DPR RI memang menetapkan transparansi sebagai salah satu indikator parlemen modern dalam Rencana Strategis DPR RI 2015 – 2019. Indikator lainnya adalah, peningkatan representasi, dan penggunaan teknologi informasi. Menurut hemat kami, indikator modern mengacu pada sarana (termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi), tools, metode, dan manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR serta respon kelembagaan terhadap inisiatif-inisiatif global. Sementara transparansi dan representasi merupakan prinsip dasar pengelolaan lembaga perwakilan. Jadi, bisa saja sebuah lembaga perwakilan telah transparan dan representatif, tapi tidak modern. Pun sebaliknya.

Ukuran modernitas sendiri tergantung pada perkembangan zaman. Sebagai contoh, hari ini menggunakan situs (web), belum dikatakan modern jika belum menyajikan format data terbuka (open data) berbasis web 2.0 atau transisi web 3.0, atau jika informasi yang dicari tidak dapat ditemukan dalam 13 detik. Nah, idealnya, kita beranjak pada tahap modernisasi

sarana itu, jika telah membenahi kearsipan, keterbukaan informasi, dan tata kelola aparatur (birokrasi).

Mengapa partisipasi dan representasi disebut prinsip dasar? Secara teori, ini konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Secara praktik, sejak abad pertengahan, sudah ada prinsip-prinsip representasi seperti “quod omnes tangit” (apapun yang menyentuh kepentingan dan hak-hak semua orang haruslah disetujui oleh bersama, melalui wakil-wakilnya). Sementara, gagasan parlemen sebagai miniatur perwujudan politik dari sebuah “realm” (wilayah) muncul pada abad keenambelas oleh Thomas Smith. (Nuri Suseno: 2013).

Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, maka prinsip “quod omnes tangit”, perlu melibatkan masyarakat secara lebih luas. Secara regulasi, ada banyak UU yang menjamin transparansi dan partisipasi dalam pembahasan kebijakan, peraturan perundangan, dan penganggaran, antara lain UU: No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun sidang ketiga 2016-2017, DPR telah mengalami sejumlah kemajuan dalam transparansi legislasi secara pro-aktif (pro-active disclosure). Mengacu pada situs DPR RI, ada sejumlah RUU yang dokumen pembahasannya telah diumumkan secara pro-aktif, seperti RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan RUU tentang Arsitek, dan lain-lain.

Pada tahun sidang berikutnya, DPR perlu mengupayakan agar keterbukaan legislasi dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif, mencakup berbagai kategori informasi dan pada semua RUU. Kami menemukan dari 49 RUU prioritas tahun 2017 ini, ada 28 RUU tanpa publikasi Naskah Akademik, 29 RUU tanpa publikasi Rancangan UU, 41 RUU tanpa pengumuman laporan singkat pembahasan, dan sejumlah temuan lainnya.

Menurut kami, dalam proses legislasi setidaknya dibutuhkan



Gedung DPR-MPR RI

foto: frederick manubek/penerbitan

5 kategori informasi yang wajib diumumkan secara pro-aktif (pro-active disclosure):

1. Informasi terkait proses pembahasan (misalnya: jadwal rapat legislasi dalam satu masa sidang, mingguan, dan harian);
2. Informasi terkait dokumen-dokumen legislasi (naskah akademik, RUU, laporan singkat, dll);
3. Informasi tentang mekanisme dan sarana partisipasi (misalnya mekanisme audiensi dan sarana-sarana yang disediakan);
4. Informasi tentang alat kelengkapan, Badan Keahlian, Tenaga Ahli, atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam perumusan UU.
5. Informasi tentang Anggaran pembahasan RUU.

Selain dipandang dalam perspektif hak publik, transparansi sebagai titik awal untuk membangun partisipasi publik, baik di tingkat pusat maupun di daerah sehingga representasi dapat tercapai. Dengan transparansi, berbagai kelompok dan komunitas di masyarakat

dapat mengetahui urgensi sebuah RUU, mengetahui perkembangan penyusunan RUU serta mengetahui bagaimana berpartisipasi dalam setiap tahap penyusunan RUU.

Sebagai contoh, pada 2017, IPC mencatat terdapat 15 RUU dari 49 RUU prioritas yang terkait masyarakat adat. Demikian pula dengan kelompok masyarakat lainnya, tentu ada sejumlah RUU yang terkait dengan kehidupan mereka. Bukankah tidak adil, jika masyarakat dihadapkan pada azas legalitas, sementara pada proses penyusunannya mereka tidak mendapatkan informasi dan kesempatan partisipasi yang memadai? Bagaimana membangun sarana, tools, metode yang menguatkan relasi DPR dan rakyat, disinilah unsur modern diperankan.

Dalam mewujudkan transparansi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seharusnya dijadikan garda terdepan. PPID dimandatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik untuk mengelola dan melayani informasi publik. Kolaborasi PPID dan pengelola arsip di DPR merupakan pondasi untuk membangun dan meningkatkan level keterbukaan DPR.

Unsur modernitas lainnya, terletak sikap terhadap inisiatif-inisiatif positif yang berkembang dalam dunia internasional. Antara lain inisiatif Open Legislative. Ini adalah inisiatif transparansi yang mengkolaborasikan antara parlemen dengan masyarakat untuk menyusun serangkaian rencana aksi keterbukaan. Parlemen modern, dengan demikian adalah upaya DPR untuk mengintegrasikan antara penggunaan sarana teknologi informasi berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan negara yang transparan, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih representatif. ■

Oleh: Ahmad Hanafi
(Direktur Indonesian Parliamentary Center)

PARLEMEN MEMBANGUN NEGERI

KINERJA DPR RI TAHUN KETIGA 2016-2017

Oleh Juli Panglima Saragih
Peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Alamat email: julipsaragih@gmail.com



Juli Panglima Saragih

Setiap lembaga negara sebenarnya harus “mempertanggungjawabkan kinerjanya” kepada masyarakat, walaupun keharusan tersebut ada yang diatur dan tidak diatur dalam undang-undang. DPR RI sebagai lembaga negara selalu melaporkan kinerjanya baik kinerja fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan setiap tahun karena diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketiga fungsi DPR tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 UUD Negara tahun 1945. Pencapaian kinerja DPR sebagai lembaga negara tentu harus diukur dari dua sisi yakni sisi kuantitas dan kualitas dari proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR tersebut.

Jika ada sebagian masyarakat yang menilai kinerja DPR belum memuaskan rakyat, tetapi di sisi lain masih cukup banyak masyarakat yang menilai kinerja DPR cukup baik seperti dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran. Tidak hanya ketiga fungsi di atas, tugas DPR memilih dan menetapkan beberapa pejabat publik sebagai salah satu kewenangannya merupakan suatu bentuk peran politik DPR dalam menilai integritas, kompetensi, dan kredibilitas

setiap pejabat publik yang harus mendapat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tests) dari DPR sebelum melaksanakan tugas. Pejabat publik baik di lembaga eksekutif maupun yudikatif adalah bagian dari penyelenggara negara yang penting dalam manajemen pemerintahan dan kenegaraan.

Urgensi Laporan Kinerja

Pada 29 Agustus 2017, DPR melaporkan kinerjanya tahun ketiga

Tahun Sidang 2016-2017 kepada publik dalam Rapat Paripurna—sekaligus memperingati HUT MPR dan DPR yang ke-72. Dalam dinamika politik paska Pemilu 2014 lalu sejak dilantik 1 Oktober 2014, tentu banyak sudah yang dikerjakan dan diselesaikan DPR sampai saat ini.

Dalam konteks legislasi, program legislasi nasional (Prolegnas) yang dibuat DPR bersama Pemerintah tidak hanya sebagai dasar penataan hukum nasional tetapi dari aspek penilaian suatu kinerja dapat menjadi suatu “jebakan” bagi DPR dalam mengukur kinerja legislasinya. Padahal pembahasan dan penyelesaian suatu undang-undang juga melibatkan Pemerintah sehingga kinerja legislasi pasti dipengaruhi oleh politik pemerintah terhadap RUU yang akan dibuat dan dihasilkan. Sebagian masyarakat menilai tidak tepat jika sukses tidaknya DPR hanya tergantung kepada pencapaian legislasi dari aspek kuantitas UU. Di sisi lain, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR juga sangat penting yang juga adalah sebagai wujud dari kinerja DPR terutama dalam konteks pengawasan kebijakan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Tahun 1945.

Pada tahun 2015-2016, misalnya, DPR dapat menyelesaikan 13 UU di luar tiga UU APBN. Namun jika dilihat dari proses dan urgensinya seluruh undang-undang yang telah diselesaikan sangat penting bagi masyarakat, bangsa, dan negara ke depan antara lain seperti UU Pengampunan Pajak; UU Tabungan Perumahan Rakyat; UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan UU Penyandang Disabilitas.

Sedangkan pada tahun sidang 2016-2017, DPR dapat menyelesaikan 13 UU di luar empat UU APBN. Beberapa UU yang juga sangat strategis dan penting bagi DPR adalah UU Pemilihan Umum; UU Informasi dan Transaksi Elektronik; dan UU Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dari sisi jumlah memang relatif sedikit yang dihasilkan, namun sebagian besar sangat dibutuhkan masyarakat dan negara sebagai landasan dan kepastian hukum. Informasi keuangan nasabah di sektor perbankan sangat penting bagi kepentingan perpajakan paska implementasi UU Pengampunan Pajak. DPR menilai bahwa perlu suatu undang-undang sebagai payung hukum sehingga dapat mendukung kebijakan perpajakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio, dan sebagainya.

Pelaksanaan fungsi anggaran selama tiga tahun kinerja DPR juga sangat dinamis yang membutuhkan waktu, keseriusan, dan kesungguhan Anggota, baik dalam proses penyusunan maupun pembahasannya. RAPBN yang diajukan Pemerintah tidaklah serta-merta langsung disetujui DPR tetapi selalu ada perdebatan dan masukan dari DPR yang hal ini dapat dilihat dari pandangan fraksi-fraksi sebagai sikap dan pandangan politik DPR, khususnya pada setiap

pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN. Sikap politik DPR melalui pandangan fraksi-fraksi tersebut merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata kinerja DPR dalam proses pembahasan anggaran negara setiap tahun, termasuk dalam pengambilan putusan akhir. Hasil kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah merupakan solusi dan putusan penting dalam konteks politik anggaran DPR satu tahun ke depan.

Kinerja DPR bidang anggaran tidak berhenti pada penyusunan, pembahasan, dan persetujuan terhadap RAPBN yang diajukan Pemerintah, tetapi dengan melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan APBN yang sedang berjalan



PARLEMEN MEMBANGUN NEGERI

dan kewajiban Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dimaksud kepada DPR. Sebab setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah baik pusat dan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada DPR setiap saat.

Banyak cara yang dilakukan DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengapai kinerja yang lebih baik. Dan yang tidak kalah penting adalah kegiatan kunjungan kerja baik sebagai Anggota maupun komisi/badan ke lapangan sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemerintah baik kebijakan pusat maupun daerah. Hak bertanya, hak meminta keterangan, dan lain-lain merupakan hak politik DPR sebagai lembaga representasi rakyat.

Oleh karena itu setiap Anggota DPR bertanggungjawab kepada rakyat yang diwakilinya dari seluruh Indonesia, termasuk di daerah pemilihan masing-masing Anggota.

Banyaknya permasalahan yang masih muncul di masyarakat merupakan tantangan bagi DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan ke depan. DPR harus dapat menangkap dan mewujudkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Tujuan akhir dari fungsi-fungsi DPR tersebut adalah tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat-banyak. Oleh karena itu dalam fungsi pengawasan terhadap Pemerintah, DPR harus selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai.

Plus-minus atas pencapaian kinerja DPR selama tiga tahun, terlebih pada Tahun Ketiga Kinerja DPR 2016-2017 merupakan bahan renungan dalam meningkatkan kinerja DPR ke depan. Sepak-terjang DPR dalam tugas sehari-hari akan menentukan sejauhmana keberhasilan peran yang diambil dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Usia 72 tahun bagi DPR merupakan waktu yang cukup panjang dengan segala dinamika politik yang mewarnainya. Jika dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, DPR selalu berpegang pada amanat konstitusi UUD Negara Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, maka apapun yang dilakukan oleh DPR pasti bermanfaat dan berdampak positif bagi bangsa dan negara ke depan dalam rangka membangun bangsa dan negara Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, dan bermartabat. ■

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat individu penulis.



PERHATIKAN NASIB GURU



Muhammad Fuad, Guru

foto: dok ppi/in

Guru jadi entitas penting di tengah bangsa ini dalam membangun kecerdasan rakyatnya. Lewat peran gurulah, para anak bangsa dididik dan diperkaya pengetahuannya di sekolah-sekolah

formil maupun non formil di semua level pendidikan. Tanggung jawab guru begitu berat di tengah tuntutan zaman yang kian kompetitif. Para guru harus menghasilkan generasi penakluk zaman tanpa kehilangan kearifannya sebagai anak bangsa ini.

Di sinilah, saya berharap DPR RI memberi perhatian lebih pada profesi guru di Tanah Air. Kisah “Oemar Bakri” seperti dilantunkan Iwan Fals masih jadi ironi di negeri ini. Di daerah terpencil, di ujung negeri, banyak guru jauh untuk dikatakan sejahtera. Gaji yang minim dan fasilitas sekolah yang apa adanya, membuat kehidupan para guru di

daerah kian berat. Para anggota dewan perlu berdialog langsung dengan para guru di daerah, agar bisa mendengar keluh kesahnya.

Di HUT DPR RI yang ke-72 tahun ini, jadi momentum reflektif bagi parlemen untuk memperhatikan sektor pendidikan. Anggaran 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan, mestinya sudah mampu merubah wajah dunia pendidikan. Kita tak ingin ada banyak anak usia sekolah masih berkeliaran di tengah jalan. Kita tak ingin mendengar gaji dan sertifikasi guru telat disampaikan. Dan kita juga tak mau melihat lagi ada sekolah yang roboh. ■ (mb)

APRESIASI PRODUK KEBIJAKAN



Um Rochmat Hidayat, Camat

foto: dok ppi/in

Pertama-tama saya ucapkan Selamat Ulang Tahun DPR RI ke-72 tahun. Saya selaku Camat

Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR RI atas segala yang telah dicapai dan menghasilkan produk-produk kebijakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.

Hanya saja saya berharap, apa yang telah dihasilkan ini tidak menjadikan masyarakat bingung dan menjadi kehilangan arah, akan dibawa ke mana Indonesia ini. Saya berharap, produk-produk kebijakan di lembaga legislatif mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bangsa Indonesia

harus menjadi baldatun toyyibatun wa robbun ghofuur. Bangsa yang tidak saja besar, tapi juga menciptakan kemakmuran bagi penduduknya.

Untuk mengarah ke sana, butuh dukungan produk perundang-undangan yang memadai. Misalnya, UU menyangkut desa, perumahan, infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan, semuanya harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan bangsa yang besar. DPR RI punya andil dan peran strategis untuk itu. ■ (mb)

SENSITIVITAS DEWAN MASIH RENDAH



Moh. Soleh, Pengacara

foto: dok ppi/in

Saya menilai, sensitivitas para anggota dewan yang bertugas di gedung DPR RI masih

rendah. Kepentingan pribadi, partai, dan golongan masih terlalu dominan mewarnai kerja 560 anggota DPR

RI. Ini kritik yang wajar dari warga bangsa yang peduli pada perbaikan negeri ini.

Pada hal, ada beban tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat di pundak para anggota dewan yang terhormat. Lewat tiga fungsi yang dimilikinya (fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran), DPR punya peran penting untuk ikut membangun bangsa ini. Untuk

itulah, kepentingan rakyat harus didahulukan di atas kepentingan lainnya.

Belum lagi, fakta lain memperlihatkan, sebagian anggota DPR masih banyak yang tersandung kasus korupsi. Media massa nasional selalu diramaikan oleh berita tangkap tangan anggota dewan oleh KPK. Dari sinilah sensitivitas para anggota dewan bisa dinilai. Betapa

kepentingan pribadi dan kelompok masih selalu dominan dalam bekerja. Padahal, sebelum bekerja mereka sudah disumpah dan mengucap janji di hadapan rakyat yang diwakilinya.

Rakyat kecil pun skeptis. Nawaitu para anggota dewan harus diluruskan kembali sebelum menjabat. Momentum HUT DPR ini jadi sangat penting untuk merenungkan kembali peran dan fungsi DPR ke depan. ■ (mb)

KAWAL KEBIJAKAN PRO RAKYAT



foto: dak.prf/ir

Lazuardi El Ghiffary, Mahasiswa Pascasarjana

Di ulang tahunnya yang ke-72 tahun, DPR RI tentu semakin dinamis dan modern. Banyak harapan digantungkan

pada pundak 560 anggota dewan yang berkantor di Senayan. Rakyat selalu menanti berbagai produk kebijakan para wakilnya. DPR diharapkan mengawal kebijakan pro rakyat.

Dengan tiga fungsi yang dimilikinya, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran, DPR tentu mampu mengidentifikasi mana produk kebijakan strategis menyangkut nasib rakyat. Dengan fungsi legislasi, tentu DPR mampu menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) yang bersentuhan langsung

dengan nasib rakyat. Angka kemiskinan yang relatif tinggi perlu ditekan. Salah satunya adalah dengan produk undang-undang yang disahkan DPR.

Rakyat kecil jangan hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara saat Pemilu. Rakyat kecil bukan komoditas politik. Mereka butuh perhatian para wakilnya untuk diberi kemudahan akses menuju hidup yang lebih sejahtera. Dengan menyejahterakan rakyat, berarti juga mengangkat harga diri bangsa ini di mata dunia. ■ (mb)

BUKAN SEKADAR LEMBAGA LEGISLATIF



foto: dak.prf/ir

Rana Andita, Tenaga Ahli

DPR RI di mata saya bukan sekadar lembaga legislatif. Begitu juga anggota DPR RI tidak hanya seorang legislator. Lebih

dari itu, jabatan yang diembannya merupakan tanggung jawab besar yang diamanatkan ratusan juta masyarakat di seluruh Indonesia. Saya atas nama masyarakat berharap banyak pada DPR.

Berharap ada perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Misalnya, perbaikan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, pengawasan penegakan hukum, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta berbagai bidang

lainnya yang menjadi tupoksi para anggota DPR. Ini penting menjadi perhatian DPR yang kini sudah memasuki usia ke-72 tahun.

Saya yakin DPR RI saat ini dapat mengubah stigma masyarakat terhadap DPR. Saya percaya masih banyak anggota DPR yang amanah, berkerja untuk rakyat, berjuang untuk kesejahteraan, bahkan berani memperjuangkan kebenaran. Sekali lagi selamat ulang tahun DPR RI. ■ (mb)



DPR TEMPAT RAKYAT BERSANDAR



Meikel Triwijaya, Pelajar

foto: dok pfi/in

Menurut saya, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat bertugas menyerap,

menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Mereka yang menjadi anggota dewan adalah sosok pribadi yang handal, terpercaya, tempat rakyat bersandar, dan mempercayakan masalahnya untuk dibantu dicarikan solusinya.

Sebagai lembaga tinggi negara, DPR berperan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Para anggotanya harus mendahulukan kepentingan negara di atas

kepentingan pribadi dan kelompoknya. Memperjuangkan kesejahteraan masyarakat jadi peran penting lainnya dari DPR RI.

Selain itu DPR juga memperjuangkan aspirasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harapan saya, DPR ke depan, agar lebih memperhatikan masyarakat dan lebih banyak lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat secara merata. ■ (mb)

HARUS PEKA MENDENGAR ASPIRASI



Mega Safitri, Mahasiswa

foto: dok pfi/in

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR harus peka mendengar aspirasi yang disuarakan rakyat. Menyerap aspirasi lalu mencarikan solusi, begitulah idealnya kerja para

wakil rakyat di Senayan. Dalam sistem ketatanegaraan kita, DPR RI adalah lembaga tinggi negara yang bertugas menyerap, menampung, dan menindaklanjuti semua aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Mungkin banyak suara dan aspirasi rakyat tak terdengar, bahkan tak ditindaklanjuti. Di sinilah DPR perlu mengoreksi dan mengevaluasi diri, agar di masa depan DPR semakin representatif. Tingkat kepercayaan publik pada DPR sempat turun. Kini,

dengan mengusung parlemen modern, DPR perlu belajar dari kegagalan sebelumnya dalam mengawal aspirasi rakyat.

Kinerja yang dinilai masih kurang perlu ditingkatkan. Kini, kepercayaan publik pun perlahan meningkat. Sebagai lembaga politik, DPR juga harus menjadi penyambung lidah bangsa Indonesia. Bersamaan dengan HUT DPR ke-72 tahun, saatnya berbenah diri meraih simpati dan kepercayaan rakyat. ■ (mb)

PROFESIONALISME DPR KIAN MATANG



Lydia Pratiwi Angelina, Ibu Rumah Tangga

foto: dok pfi/in

Berdasarkan apa yang saya lihat saat ini, sikap kritis terhadap kinerja pemerintah

dan memberikan informasi secara lebih terbuka kepada rakyat sebagai pemilihnya, menjadikan profesionalisme DPR semakin matang dalam menjalankan tugasnya.

Masyarakat butuh peran aktif DPR dalam mengawasi kerja pemerintah, supaya tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang dirasa masyarakat lebih memihak dan

menguntungkan golongan tertentu saja. Saya sebagai ibu rumah tangga terkadang merasa keberatan dengan aturan dan kebijakan yang kami anggap memberatkan rakyat kecil.

Dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang serba tinggi, membuat kita semakin sulit untuk mengatur keuangan keluarga. Penghasilan yang ada setidaknya harus bisa mencukupi

seluruh keperluan selama sebulan. Menjabat sebagai anggota dewan memang bukan tugas yang mudah, tetapi kewajiban menjalankan amanah rakyat untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, harus

jadi prioritas utama di atas segala kepentingan.

Semoga dengan bertambahnya usia lembaga DPR, diikuti pula dengan peningkatan mutu dan kualitas kerja para anggotanya. Rakyat Indonesia butuh wakil-wakil

yang mampu mewujudkan cita-cita perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, makmur, dan bebas dari kemiskinan. ■^(dep)

KINERJA DPR SEMAKIN MENINGKAT



iswandri, pedagang

meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan harga-harga sembako.

Kinerja DPR yang sekarang ini sudah ada peningkatan dalam melayani masyarakat, terbukti dengan aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang terasa memberatkan rakyat kecil. DPR juga diharapkan lebih memperhatikan kehidupan masyarakat kecil. Salah satunya dengan mendesak pemerintah, agar mempermudah pemberian pinjaman modal usaha bagi para pedagang dan pengusaha kecil lainnya.

DPR harus membantu mempermudah akses permodalan

bagi para pedagang. Harga-harga kebutuhan pokok juga harus disabilkan, tidak naik turun. Kenaikan harga garam, sangat berdampak bagi para pedagang makanan. Biasanya untuk keperluan dagang, pedagang cukup membeli garam seharga Rp5000. Namun, sekarang jadi tiga kali lipatnya, mencapai Rp15 ribu.

Awasi kinerja pemerintah dengan sebaik-baiknya supaya rakyat bisa menikmati hasil pembangunan yang adil dan merata. DPR dipilih oleh rakyat. Jadi, DPR harus bisa mendukung terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. ■^(dep)

Diusianya yang ke-72, tahun, peran dan kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dinilai sebagian masyarakat semakin meningkat. Di pundak para legislator itulah rakyat Indonesia menumpukan berbagai harapannya. Salah satunya, DPR harus

CIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN



Noli Catur Wibowo, Sopir

masyarakat. Janji-janji kampanye harus mampu direalisasikan. Rakyat butuh bukti bukan janji. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan status pendidikan yang saya tempuh, memaksa saya menjadi seorang sopir.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus ikut memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan lapangan kerja tersebut. Saat ini seorang lulusan S1 tidak kalah sulitnya dengan lulusan SMA dalam mencari kerja. Ini sudah jadi masalah sosial yang meluas di

tengah masyarakat kita.

Masalah penting ini yang harus segera diselesaikan secara sinergis oleh semua elemen bangsa. Pemerintah dan DPR harus bersinergi menemukan formula yang tepat guna menyelesaikan persoalan ini. Di ulang tahunnya yang ke-72, saya berharap DPR mampu meningkatkan kinerjanya dalam segala aspek. Semoga kedepan Indonesia akan memiliki sebuah lembaga parlemen yang modern, transparan, jujur dan amanah demi kejayaan bangsa Indonesia. ■^(dep)

Sebagai rakyat biasa, saya berharap DPR mendesak pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi

[FOTO BERITA]



Pidato Presiden RI, Joko Widodo saat Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 dan Pengantar/Keterangan Presiden RI atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya.
(Foto:Iwan,Jaka,Arief,Andri, Odjie/Iw)





Momen Sidang Paripurna DPR memperingati HUT DPR ke 72, diawali dengan pidato penyampaian kinerja DPR oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Dilanjutkan dengan penyerahan buku kinerja DPR kepada para mantan pimpinan DPR.
(Foto: Iwan, Jaka, Andri, Kresno, Runi, Arief/Iw)





Pimpinan DPR didampingi sejumlah Anggota DPR, merayakan HUT DPR ke 72 dengan pemotongan tumpeng, usai melaksanakan Sidang Paripurna.
(Foto: Odjie, Jaka, Kresno, Runi/Iw)





Pimpinan DPR didampingi Pimpinan BURT
DPR membuka acara Pameran Foto Jurnalistik,
Warna Warni Parlemen ke 6 tahun 2017 di
Gedung Nusantara II.
(Foto : Iwan, Andri, Jaka, Azka, Odjie, Runi/Iw)





Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Pimpinan BURT DPR meresmikan pergantian nama ruang Operation Room menjadi ruang Abdul Muis, dilanjutkan dengan peninjauan ruangan yang telah di renovasi. (Foto : Jaka/Iw)





Pimpinan DPR dan Pimpinan BURT didampingi sejumlah pejabat di Lingkungan Setjen dan BKD DPR menanam pohon dalam rangkaian Hari Ulang Tahun DPR RI ke 72. (Foto:Andri,Jaka/Iw)



[FOTO BERITA]



Tim Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI, dipimpin Ketua Komisi Dede Yusuf Macan Effendi meninjau Embarkasi Asrama Haji Banda Aceh. (Foto:Iwan Armanias/Iw)





Tim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Desmond Junaidi Mahesa mengunjungi Lapas Kelas IIA Ambon, dan Kantor Polda Maluku.
(Foto:Andri/Iw).





Marwan Cik Asan

KARYA NYATA SANG JUARA KELAS

Melewati masa kecil di kampung, dan merantau ke kota, membuat sosoknya begitu tangguh menghadapi berbagai tantangan. Menjalani karir dari tingkat daerah hingga tingkat nasional, telah dijalannya. Berbagai karya nyata bagi masyarakat terus diwujudkan, demi kemaslahatan bersama. Inilah sekilas kisah hidup Marwan Cik Asan, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Marwan melewati masa kecilnya di sebuah kampung, bernama Kampung Way Tuba. Di kampung yang terletak di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Lampung itu, Marwan menjalani masa-masa sebagai pelajar Sekolah Dasar Inpres. Sebagai anak pedesaan, Marwan

sangat menikmati menjalani masa kecilnya, termasuk menjalani berbagai hobinya di kampung.

“Kalau zaman dulu, kalau kita membuat permainan mesti buat sendiri. Enggak ada gadget (gawai, RED) seperti saat ini. Jadi kita bisa buat mobil dari bambu, mercon jadi kita buat

dari selongsong bambu, bedil-bedilan (mainan pistol, RED) itu kita buat pelurunya dari lada. Era-era itu kreatifitas kita tinggi. Kemudian karena sungainya besar-besar, jadi kita sepulang sekolah itu berenang,” kata Marwan.

‘Kenakalan’ masa kecil pun tak luput dilalui Marwan, namun tentu masih

dalam batas yang wajar. Seperti misalnya berenang di sungai terlalu lama, sehingga membuat mata merah dan muka pucat. Imbasnya, ia mendapat 'hukuman' cubit dari ibunda. Bahkan, akibat bermain prosotan, hingga menyebabkan celananya menjadi berlubang. 'Hukuman' pun harus kembali diterima Marwan. Namun menurutnya hal itu menjadi masa kecil yang mengasyikkan.

Menjalani sekolah di kampung dengan fasilitas yang cukup minim, tak membuat pria kelahiran Way Tuba, 18 Maret 1976 itu patah arang. Bahkan Marwan mengaku, selama menjalani sekolah tingkat dasar hingga menengah,

Lulus dari Fakultas Teknik UI, Marwan bergabung dengan salah satu perusahaan energizer dari Amerika. Namun tak lama kemudian, Marwan pun merintis usaha sendiri seperti katering, agen beras, dan beberapa usaha lainnya. Mayoritas keluarga besarnya yang memiliki kebun karet dan industri pengolahan di Way Kanan, Lampung, juga turut memantik semangat Marwan untuk berkecimpung di dunia usaha.

gelar juara kelas selalu diraihnya. Namun jika tidak menjadi juara 1, paling rendah juara 3 di kelas. Selain semangat dari murid-murid, guru-guru pun tak menyerah dengan keterbatasan fasilitas yang ada.

"Dulu, buku hanya dari PN Balai Pustaka. Enggak sebanyak buku sekarang. Bukupun terbatas hanya ada di perpustakaan. Tapi semangat kita luar biasa, ditambah dengan guru-guru pada era itu guru yang militan yang dikirim oleh pemerintah saat itu ke sekolah-sekolah Inpres itu yang mendorong kita luar biasa belajarnya. Kemudian kita selalu mencontoh ke kakak, yang kebetulan kakak-kakak saya juga juara di sekolah," ungkap Marwan.

Memasuki jenjang sekolah menengah, Marwan 'terpaksa' melanjutkan pendidikannya di ibukota provinsi, Bandar Lampung. Ia pun terdaftar di SMP Negeri 6 Bandar Lampung, dan kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Melanjutkan sekolah di ibukota provinsi diakui Marwan menjadi tradisi di keluarganya, termasuk pada saudara kandung Marwan. Karena kala itu, sekolah-sekolah menengah terbaik ada di ibu kota provinsi.

"Kami berasal dari keluarga petani, yang artinya kehiduan di kota besar tentu untuk ukuran seorang petani seperti ayah saya itu bukan hal yang ringan untuk membiayai enam anak. Tetapi karena semangat untuk memperoleh pendidikan terbaik, kami dikirim oleh orang tua kami setiap setelah lulus SD, untuk sekolah di ibukota provinsi," kenang anak keempat dari enam bersaudara itu.

Pindah ke ibukota provinsi, Marwan mengaku membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Bahkan, Marwan sempat mengalami masa-masa kuper (kurang pergaulan, RED). Namun, ada hikmah



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Hasan Asan memimpin rapat

tersendiri dari hal itu, yang menyebabkan dirinya memiliki banyak waktu untuk belajar. Sehingga gelar juara kelas pun selalu diraihnya. Dukungan dari kakak-kakak yang juga merantau, turut membuat Marwan semakin semangat.

Menurutnya, 'dikirimnya' ia dan saudara-saudaranya ke kota, selain mendapat pendidikan yang lebih baik, merupakan misi ayahnya agar anak-anak belajar kemandirian. Karena dengan merantau itulah, ia dan seluruh saudaranya belajar mengelola tugas bersama maupun pribadi.

Kemandirian dan semangat belajar Marwan, mengantarkan dirinya masuk ke Fakultas Teknik Mesin, Universitas Indonesia, Depok melalui jalur undangan PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). Merantau ke kota besar, Marwan dihadapkan pada penyesuaian lagi. Masa karantina atau matrikulasi selama satu bulan, membuat Marwan kenal dengan banyak mahasiswa dari berbagai daerah.

"Sebagai mahasiswa dari daerah, tentu bagi saya pengalaman yang berkesan adalah bisa ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia. Selama masa karantina, kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Nah itulah kita mengenal berbagai suku di Indonesia. Kita belajar nasionalisme, kebangsaan dan persiapan diri untuk memasuki kuliah," ujar Marwan.

Masa kuliah di UI dijalani dengan padatnya berbagai kegiatan. Selain

kesibukan di kelas, Marwan bergabung dengan Senat Mahasiswa UI, Ikatan Mahasiswa Lampung, Ikatan Mahasiswa Teknik Mesin UI, maupun kegiatan keagamaan. Di senat mahasiswa, Marwan bertemu dengan Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI.

“Mungkin benih-benih aktif itulah, yang membuat saya menjadi politisi karena biasa berorganisasi dan mempunyai relasi yang banyak. Itu manfaat lain yang saya peroleh waktu menjadi mahasiswa. Yang saya nikmati atau peroleh sekarang ini karena keaktifan saya pada mahasiswa dulu,” kata Marwan sambil menerawang.

Lulus dari Fakultas Teknik UI, Marwan bergabung dengan salah satu perusahaan energizer dari Amerika. Namun tak lama kemudian, Marwan pun merintis usaha sendiri seperti katering, agen beras, dan beberapa usaha lainnya. Mayoritas keluarga besarnya yang memiliki kebun karet dan industri pengolahan di Way Kanan, Lampung, juga turut memantik semangat Marwan untuk berkecimpung di dunia usaha.

“Kemudian usaha saya terus berkembang. Yang tadinya hanya berdagang beras, buka kantin dan lainnya, saya dan teman-teman

mendirikan pabrik dan mengelola pengelolaan plastik. Itulah usaha yang saya jalani sampai sekarang ini, selain usaha kecil-kecilan yang banyak dikelola oleh keluarga,” jelas Marwan.

Sembari menjalankan usaha, Marwan pun mengambil Magister Manajemen di UI. Menginjak usia 25 tahun, Marwan menikahi Raden Ayu Asliah. Dari pernikahan keduanya, berbuah dua anak. Marwan pun sempat menjalani karir sebagai Dosen di Universitas Indonesia dan menjabat sebagai General Manager dan Direktur di beberapa perusahaan.

Memulai Karir Politik

Ketertarikan Marwan terhadap dunia politik pun terlihat saat menjalani kuliah di UI. Sekitar tahun 1996, ia pernah menghadiri sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Kasospol Letjen TNI Syarwan Hamid, dimana salah satu pembicaranya adalah Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Marwan mengaku kagum dengan pemikiran SBY tentang Indonesia, dan mengikuti sepak terjangnya di berbagai bidang, termasuk pencalonan Presiden RI ke-6.

“Saat beliau mencalonkan diri sebagai Presiden RI ke-6, meskipun tidak masuk dalam struktur secara nasional tapi setidaknya saya bersama

keluarga dan teman-teman berjuang sebagai simpatisan pendukung SBY. Alhamdulillah beliau menang, kemudian pada tahun 2007, saya mendaftar sebagai Anggota Partai Demokrat,” jelas Marwan.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009 Marwan mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif untuk DPRD Provinsi Lampung. Berkat kerja kerasnya, Marwan pun terpilih sebagai Anggota DPRD Lampung periode 2009-2014, dan meninggalkan dunia bisnis yang digelutinya. Bahkan, ia pun langsung terpilih menjadi Ketua DPRD Lampung.

“Menurut saya, itu sebuah kepercayaan luar biasa. Waktu itu dengan 12 Anggota Dewan dari Partai Demokrat, otomatis hak menjadi Ketua DPRD itu menjadi milik Partai Demokrat. Dari 12 calon itu, dilakukan fit and proper test oleh Pak SBY lewat DPP. Alhamdulillah, rekomendasinya turun kepada saya, itu amanah yang saya jaga selama tahun 2009-2014,” cerita Marwan.

Menjabat sebagai Ketua DPRD Lampung, Marwan bersinergi dengan Anggota DPRD dan Gubernur Lampung beserta jajaran untuk membangun Lampung. Menurutnya, banyak keberhasilan yang diraih, termasuk meningkatkan jumlah APBD, menyalurkan Perda-perda yang produktif, hingga mendorong Pemerintah Provinsi mendapatkan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Lima tahun saya menjadi Ketua DPRD, 90 Perda kami sahkan. Rata-rata 10 Perda tiap tahunnya. Kemudian APBD kita meningkat dari Rp 1,6 triliun hampir menjadi Rp 5 triliun. Dalam perjalanan itu, hampir tidak ada konflik yang signifikan baik intern maupun dengan eksekutif. Kalau pun ada, itu hanya dinamika di dunia politik. Tapi alhamdulillah tidak sampai menghambat atau mengganggu kinerja DPRD,” ungkap Marwan.



Marwan Cik Asan menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya

“Sampai sekarang orang selalu menganggap dunia politik itu miring. Tapi saya katakan, ada hal dalam diri saya yang ingin saya wujudkan kepada masyarakat. Namun hal itu tidak mungkin terwujud tanpa perjuangan dan kekuatan kolektif di jalur politik.”

Langkah politik Marwan berlanjut pada tahun 2014, dengan mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Lampung II, yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Terpilih sebagai Anggota DPR RI menjadi tantangan tersendiri bagi Marwan. Bahkan, ia sendiri diberi kejutan, ketika mendapat perintah untuk duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

“Itu surprise, tidak disangka-sangka saya diperintah oleh pimpinan untuk menjadi Wakil Ketua Komisi XI DPR periode 2014 - 2019. Bagi saya, ini luar biasa. Apalagi di Komisi XI DPR diisi oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Tokoh-tokoh nasional itu jadi kesempatan saya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para senior yang ada di Komisi XI,” kata Marwan sambil berbincang-bincang.

Marwan mengaku, darah politik mengalir dari kedua orang tuanya.

Kendati ayah dan ibunya tidak terjun ke politik praktis, namun nuansa ketokohan di kampung itu sangat terlihat. Menurutnya, meskipun sang ayah tidak pernah menduduki jabatan formal, tapi untuk di lingkungan tempat tinggalnya, ketokohnya diakui oleh masyarakat.

“Saya sering melihat ayah saya menyelesaikan banyak hal. Seperti menyelesaikan banyak persoalan kemasyarakatan, apakah itu konflik antara pendatang dengan penduduk lokal. Sedangkan ibu saya, senang menolong orang. Guru-guru yang baru datang ke kampung kami, disiapkan tempat tinggalnya. Hingga akhirnya betah tinggal di kampung kami,” lanjut Marwan.

Kemaslahatan Bersama

Misi untuk menyejahterakan masyarakat dan kemaslahatan bersama, turut mendorong Marwan untuk terjun di bidang politik. Politik menjadi jalan untuk memberikan kemaslahatan untuk masyarakat luas. Hal itu pun sudah dibuktikannya. Kala itu, kampungnya belum mendapat aliran listrik, namun setelah ia menjabat Ketua DPRD Lampung, dengan adanya dorongan politik, kini sudah dialiri listrik. Termasuk adanya pembangunan dari tingkat SD hingga SMA. Politik menjadi alat perjuangan.

“Karena untuk mewujudkan hal itu membutuhkan regulasi dan *power of politic*. Nah, itulah saya bilang politik itu alat perjuangan kita untuk mewujudkan kemaslahatan yang tidak bisa diwujudkan oleh kekuatan-kekuatan personal, walau kita mempunyai uang banyak. Jalan yang tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita masuk ke politik,” imbuh Marwan.

Kesibukan di dunia politik, tentulah berpengaruh kepada kehidupan pribadi Marwan bersama keluarga. Bahkan ketika pertama kali terjun ke politik, sang istri sempat merasa keberatan. Keberatan itu dalam artian, Marwan

dan keluarga sudah berada fase yang nyaman, namun terjun ke dunia politik yang dianggap miring. Namun, Marwan selalu memberikan pemahaman bahwa ini bagian dari perjuangan dan tugas sebagai seorang politisi

“Sampai sekarang orang selalu menganggap dunia politik itu miring. Tapi saya katakan, ada hal dalam diri saya yang ingin saya wujudkan kepada masyarakat. Namun hal itu tidak mungkin terwujud tanpa perjuangan dan kekuatan kolektif di jalur politik. Kegiatan bersama keluarga seperti makan bersama, nonton, tetap memiliki jadwal tersendiri,” imbuh Marwan.

Marwan pun tidak mengajak secara langsung anak-anak untuk berpolitik. Namun, terkadang si anak ingin tahu kesibukan ayahnya, yang dijelaskan Marwan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ia mengaku tidak mendoktrin anak-anak untuk harus menjadi politisi. Namun jika ternyata ada ketertarikan anak-anak untuk terjun di dunia politik, Marwan tidak akan membatasi hal itu.

Menurut Marwan, terjun ke politik dan menjadi wakil rakyat merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Ia ingin mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya. Sehingga, setiap orang dapat mengingat hasil jerih yang dilakukan Marwan.

“Saya ingin berbuat yang terbaik. Baik untuk lembaga ini maupun untuk konstituen saya. Saya ingin mewujudkan karya nyata yang bisa saya hadirkan di dapil saya, itu yang menjadi obsesi saya. Saya ingin orang melihat ini bahwa karyanya Pak Marwan dulu, dan mimpi-mimpi membangun Lampung dapat terwujud dalam lima tahun mendatang,” tutup Anggota Dewan dengan nomor anggota 410 itu. ■⁽⁹⁾



foto: Inam/inn

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf meninjau Embarkasi Asrama Haji Banda Aceh

PELAYANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI JADI PERHATIAN KOMISI IX

Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan menaruh perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan calon jamaah haji, baik dalam masa persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan musim haji. Oleh karena itu, Panitia Kerja Kesehatan Haji Komisi IX senantiasa melakukan pengawasan pada pelayanan kesehatan haji yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan.

Kunjungan spesifik yang dilakukan Panja Kesehatan Haji Komisi IX ini, adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan utuh tentang penyelenggaraan kesehatan haji di embarkasi dan juga pelayanan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Selain itu juga untuk mendapatkan

laporan tentang profil jamaah haji dari sisi kesehatan, kesiapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji.

Pada 21 September kemarin, Komisi IX DPR membagi Panja Kesehatan Haji menjadi tiga tim untuk melakukan pengawasan pelayanan kesehatan yang

sudah dilakukan pemerintah di tiga provinsi yaitu, Provisin Aceh, Sulawesi Selatan (Makasar) dan Jawa Timur (Surabaya).

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi yang memimpin tim Panja melakukan peninjauan di Embarkasi, Provisin Aceh merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi para calon jamaah haji.

“Secara keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan haji sudah cukup baik, seperti kita lihat tadi kamar tidur, kamar mandi, dapur dan ruang makan semuanya serba bagus dan bersih. Kalau bersih kan kesehatan jamaah terjaga,” ungkap Dede usai meninjau Embarikasi di Aceh.

Namun, politisi Demokrat itu menyayangkan belum adanya Poliklinik Kesehatan di Embarkasi Aceh untuk menangani gangguan kesehatan para jamaah calon haji, pasokan obat yang masih kurang serta belum adanya penambahan tenaga medis.

“Ini akan menjadi catatan Panja dan akan kita bahas nantinya di tingkat pusat bersama dengan pemerintah. Mengenai penambahan kuota tenaga medis nanti kita akan diskusi, agar penambahan kuota jangan diambil dari jamaah tetapi dari relawan,” pungkasnya.

Kesehatan CJH Penting dan Harus Diutamakan

Kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH) penting dan harus diutamakan, maka dari itu Tim Panja Kesehatan Haji yang melakukan peninjauan ke Asrama Haji Sukillo, Surabaya, Jawa Timur mengapresiasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang menerapkan peraturan Menteri Kesehatan No. 15/2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

“Pembinaan kesehatan jemaah haji sejak dini ditunjukkan PPIH di Embarkasi Surabaya untuk mewujudkan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri (tengah)

istithaah kesehatan haji. Bahkan mereka berhasil memotivasi calon jemaah haji untuk menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang tidak baik,” ungkap Ketua Tim Panja Kesehatan Haji Ermalena di Embarkasi Surabaya.

Lebih lanjut Politisi F-PPP itu menjelaskan Pemeriksa Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan dalam rangka Istithaah kesehatan haji dilaksanakan sesuai standar teknis pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji yang ditetapkan oleh menteri.

“Kami mengindahkan adanya pembinaan kesehatan jemaah haji sejak dini terhadap calon jemaah haji, agar sampai nanti keberangkatan dokumen kesehatan setiap jemaah haji itu bisa terkontrol dengan baik,” tegasnya.

Namun pihaknya menyayangkan, calon jemaah yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan hanya 45 persen. Padahal dalam mewujudkan istithaah harus sejalan dengan pelayanan kesehatan. Maka dari itu Komisi IX menghimbau salah satu persyaratan menjadi jemaah haji yaitu wajib memiliki Kartu BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan.

“Kita akan mendorong pihak terkait mengintegrasikan pelayanan yang sudah disediakan ini. Jadi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji, salah satu persyaratannya harus memiliki kartu BPJS. Agar permasalahan

mengenai pelayanan kesehatan jemaah haji bisa tertangani secara komprehensif,” pungkasnya.

Pemerintah Harus Satu Suara Tentang kasus CJH

Berbeda hal dengan Tim Panja yang memberikan apresiasi setelah meninjau Embarkasi Surabaya. Embarkasi di Makassar mendapat kritikan dari Ketua Tim Panja Kesehatan Haji yang juga Wakil Ketua Komis IX Syamsul Bachri, usai peninjauan pihaknya menemukan adanya pro-kontra rencana keberangkatan calon jemaah haji yang merupakan jemaah dengan status resiko tinggi (Risti).

“Tadi dipaparkan ada sebuah kasus calon jemaah haji beresiko tinggi, yakni penderita gagal ginjal berusia 49 tahun asal Maluku yang menempuh berbagai cara (sampai Ombudsman) untuk tetap bisa diberangkatkan ke tanah suci,” ujar Syamsul di Makassar.

Pada kesempatan itu, Panja melihat adanya dualisme keputusan dari pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Dinas Kesehatan Haji dari Kemenkes dengan merujuk pada Permenkes 15 tahun 2016 dimana penderita sakit gagal ginjal termasuk dalam salah satu calon jemaah haji penyakit berisiko tinggi yang tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci. Mengingat penderita harus menjalani cuci darah setiap tiga hari sekali dalam setiap minggunya.

Sementara, PPIH dari Kemenag tetap merekomendasikan calon jemaah haji yang berstatus Risti untuk tetap bisa berangkat ibadah haji dengan alasan kemanusiaan. Terlebih, saat mendaftar haji pria tersebut belum terkena penyakit gagal ginjal, dan ia pun sudah menunggu antrian daftar tunggu haji hingga bertahun-tahun, sangat tidak manusiawi ketika kesempatan itu datang tapi pemerintah tidak membolehkan. Terkait penyakit yang diderita, Kemenag meyakini bahwa usia seseorang ada di tangan Illahi. Pihak keluarga dan calon jemaah haji yang bersangkutan pun sudah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut apa-apa kepada PPIH jika terjadi sesuatu kejadian terburuk dengan calon jemaah haji Risti tadi.

“Dualisme keputusan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Pemerintah baik Dinas Kesehatan maupun Panitia Perjalanan Ibadah Haji Kementerian Agama harus satu suara terkait kasus seperti ini. Oleh karena itu ke depan kami akan kembali membahas hal ini kepada pemerintah pusat mengenai batasan-batasan dan perkecualian sebuah kasus calon jemaah haji Risti. Jangan sampai pemerintah daerah atau Panitia Perjalanan Ibadah Haji di daerah mengalami kebingungan. Dalam hal ini pemerintah harus satu suara,” pungkasnya. ■ (rnm, in, ayu)



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena berbincang dengan jemaah haji di embarkasi Surabaya

AKURASI DATA KEPENDUDUKAN DORONG PKH TEPAT SASARAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai masih menemui beberapa permasalahan, salah satunya mengenai akurasi data. Padahal, pengakurasian data kependudukan menjadi salah satu aspek pendorong PKH agar tepat sasaran. Komisi VIII DPR RI pun melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Lampung dan Semarang guna melihat implementasi PKH di lapangan, baru-baru ini.

Di Lampung, Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati selaku Ketua Tim Komisi Kunspek mengatakan, pendataan penduduk merupakan persoalan utama yang selalu menjadi sorotan. Karena jika tidak tepat, hal ini bisa berpengaruh pada rencana anggaran dan kebijakan.

Saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Sosial Lampung beserta jajaran, politisi F-PDI Perjuangan itu menyarankan terkait pendataan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), turut dibantu oleh aparat RT/RW setempat. Sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat.

“Pendataan itu terus terang amburadul. Data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut, bukan dilakukan dalam bentuk *sweeping* melainkan *survey*. *Survey* tersebut tidak dilakukan satu persatu individu sehingga hasilnya kurang tepat. Alangkah baiknya jika RT/RW setempat juga dilibatkan,” saran Itet.

Itet juga mengharapkan Lampung bisa menjadi provinsi pertama yang menerapkan keakuratan data penduduk, sehingga bisa menjadi contoh bagi provinsi lain. “Saya berharap *comprehensive data evacuation* bisa dilakukan di Lampung agar bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” imbuh politisi asal dapil Lampung itu.

Menganggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan setuju untuk melibatkan perangkat lain dalam pendataan penduduk, dan berharap ke depan pemerintah dapat terus memperbaiki hal ini.

“Untuk memperoleh data yang lebih akurat, ke depan, BPS akan melibatkan perangkat daerah lain seperti RT/RW atau kepala dusun karena mereka inilah yang lebih mengerti daerahnya sehingga bisa meminimalisir kesalahan, dan data yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Bachtiar.

Selain memantau pelaksanaan PKH, Komisi VIII DPR turut menyalurkan



Tim Kunspek Komisi VIII DPR foto bersama Wagub Lampung, Kadinsos Lampung, Bulog serta Direksi Bank BRI dan Mandiri

dana Kementerian Sosial (Kemensos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lampung.

Anggota Komisi VIII DPR RI Kuswiyanto (F-PAN) menekankan penyaluran bantuan tersebut dipastikan tepat sasaran dan diharapkan pengambilannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ia juga memastikan BPNT yang disalurkan dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

“Misalnya saja beras raskin, selama ini yang kami temui di lapangan kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, kami ingin ke depan tidak ditemukan lagi hal-hal tersebut dan kami ingin benar-benar memastikan apa yang diberikan Pemerintah kepada KPM ini betul-betul layak untuk dikonsumsi,” imbau politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebagaimana harapan Menteri Sosial RI bahwa pada bulan Agustus 2017 agar semua bantuan sosial (Bansos) sudah tuntas, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni optimis akan tercapai. “Saya optimis bahwa penyaluran Bansos PKH pada bulan Agustus akan selesai,” pungkasnya.

PKH Harus Mampu Sejahterakan Masyarakat

Dalam kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq menegaskan bahwa PKH harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta merubah perilaku dan kecakapan SDM. Hamka mengatakan kunjungannya dimaksudkan untuk mengetahui penyaluran PKH yang dilakukan Pemprov Jateng agar pelaksanaannya dapat optimal.

“Kami ingin mengetahui penyaluran PKH yang dilakukan Pemprov Jateng lewat Kadis Provinsi dan Kota, sehingga PKH diharapkan dapat tersalurkan dengan baik sampai ditingkat keluarga,”



Tim Kunspek Komisi VIII DPR meninjau pelaksanaan program e-Warong di Semarang

ungkap politisi F-PDI Perjuangan itu.

Komisi VIII juga berkesempatan mengunjungi e-Warong yang berada di Semarang yang didanai oleh PKH. Hamka berharap pembangunan e-Warong dapat ditingkatkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat di daerah. Saat ini sudah ada 56 e-Warong di Indonesia dan tahun depan akan diperbanyak lagi.

“Tahun ini akan dibentuk 56 e-Warong se-Indonesia. Tahun depan meningkat menjadi 100. Mudah-mudahan e-Warong menjadi lebih berkembang lagi,” harap politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto meminta Kemensos RI untuk memberikan pelatihan dan bimbingan khusus terhadap pendamping PKH. Pasalnya, ia menemukan keluhan yang disampaikan pendamping PKH tentang sulitnya memberikan bimbingan di masyarakat karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

“Seharusnya pendamping PKH diberikan pelatihan atau bimbingan teknis karena banyak masukan bahwa untuk membimbing di lapangan mereka merasa belum menguasai secara persis,” ujar Wenny.

Politisi F-PG itu menilai hal tersebut menjadi perhatian serius bagi

Kemensos, agar PKH dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang dimaksud yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Jadi baiknya diberi pelatihan yang benar sehingga membuat mereka paham tentang masalah di lapangan agar bisa diatasi,” dorongnya.

Saat melakukan sidak ke rumah warga, Wenny mendapat apresiasi dari masyarakat tentang PKH ini, salah satunya yakni keberadaan e-Warong, yang merupakan tindaklanjut melalui sinergi PKH dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sehingga kualitas dan pelayanannya perlu untuk lebih ditingkatkan.

“Terhadap pendirian e-Warong, di lapangan mendapat respon positif karena selain anggota bisa ikut memanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa belanja disitu,” jelas politisi asal dapil Jawa Barat itu usai melihat langsung e-Warong Mitra Sejahtera.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial Pemprov Jateng Tommy Yarmawan mengapresiasi langkah kunjungan Komisi VIII ke Jateng ini. Ia berharap akan terus menjalin sinergitas dengan DPR dalam upaya menjalankan programnya. “Kita berharap untuk terus membangun sinergi untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Tommy. ■ (tra,hs)

KOMISI XI TINJAU PENGENDALIAN MATA UANG RUPIAH DI BALI DAN INFRASTRUKTUR DI MENTAWAI

Provinsi Bali merupakan wilayah perputaran mata uang asing terbesar di Indonesia. Guna mengetahui strategi Bank Indonesia dalam mengawasi mata uang rupiah, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Bali dan Mentawai

“Bali merupakan tempat wisata favorit bagi turis manca negara, kesempatan bertransaksi dengan mata uang asing sangat besar. Ditambah maraknya money changer dan turis yang berbisnis di Bali,” ungkap anggota Komisi XI Wiligo Zainar di sela-sela pertemuan Tim Komisi XI dengan BI Cabang Bali, di Aula Kantor BI Bali, Senin (21/8/2017).

Melihat banyaknya kesempatan penggunaan mata uang asing itu, Wiligo berharap ada ketegasan dari pemerintah untuk mengatur perputaran mata uang asing tersebut. “Dalam keputusan pemerintah sudah jelas bahwa seluruh transaksi di NKRI harus menggunakan rupiah, jika ada beberapa kelompok atau sektor yang

masih menggunakan valuta asing musti ditertibkan,” terangnya.

Salah satu cara mengurangi penggunaan mata uang asing lanjut politisi Partai Gerindra itu adalah dengan menutup money changer yang tidak memiliki izin. “BI kan sudah punya list money changer yang terdaftar ya tutup saja itu yang tidak memiliki izin. Peran BI ini kan sangat penting untuk kedaulatan bangsa dalam menggunakan mata uang rupiah, agar merata dan meningkatkan nilai mata uang rupiah,” pungkasnya.

Selain meninjau masalah pengendalian mata uang rupiah dalam kesempatan tersebut, Tim Komisi XI juga meninjau pengendalian inflasi di Bali.

Tim Komisi XI mengapresiasi perekonomian di Pulau Dewata Bali yang memiliki angka di atas perekonomian nasional yaitu 5,87% pada Triwulan II tahun 2017, angka ini cukup tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang hanya 5,01%. Perekonomian Provinsi Bali dinilai sangat baik, hal ini terbukti dari banyaknya transaksi tunai dan non-tunai pada sektor pariwisata.

Meskipun perekonomian naik di atas rata-rata nasional, namun masih ada beberapa kendala dalam pengendalian Inflasi oleh kelompok volatile food di Propinsi Bali. Ungkap anggota Komisi XI Heri Gunawan.

Salah satu kendala pengendalian inflasi yaitu adanya alih fungsi lahan. Dahulu ada pertanian di Bali yang terkenal bernama subak, sekarang lahan tersebut alih fungsi menjadi tempat pariwisata sementara kebutuhan pangan makin hari makin bertambah. “Alih fungsi lahan pertanian ke pariwisata musti diwaspadai karena disatu sisi ada kesenjangan atau ketimpangan,” jelas Heri.

Selain kurangnya lahan pertanian, penyediaan tenaga kerja di sektor pertanian juga kurang diminati karena banyak yang beralih ke pariwisata. Sehingga ketergantungan supply dari luar Bali sangat besar dan menyebabkan harga bergejolak. Rantai pemasaran



Komisi XI Foto bersama OJK dan Bank Indonesia cabang BALI



Komisi XI foto bersama dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. di Kantor BI Padang, Sumatera Barat

distribusi yang relatif panjang dan akses jalan yang kurang mendukung juga menjadi kendala dalam supply bahan baku dari luar Bali.

Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Regional 3 Bank Indonesia Firmanzah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah untuk melakukan pengendalian inflasi di Provinsi Bali seperti pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten dan kota.

“Saat ini Provinsi Bali telah dibentuk TPID di seluruh kabupaten dan kota yaitu terdiri dari 1 TPID Propinsi Bali dan 9 TPID kabupaten dan kota, selain itu Pimpinan Daerah Bali juga telah menandatangani komitmen untuk sepakat mengarahkan segala daya upaya sesuai tugas dan wewenang untuk mengendalikan inflasi tersebut “ jelas Firmanzah.

Ke depan TPID Provinsi Bali diharapkan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi maupun melalui SKPD terkait.”Kebijakan musti dibatasi dan harus ada sinergi dari pihak BI, OJK dan TPID aktif melakukan rapat teknis sehingga dapat memperbaiki Provinsi

Bali ke depannya,” tutur Heri.

Tim Komisi XI DPR ke Bali antara lain, Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno, anggota Komisi XI Indah Kurnia, Eva Kusuma Sundari, Edison, Andi Achmad, Heri Gunawan, Haerul, Amin Santoso, Annarulita Muchtar dan Achmad Hatari. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank BTN, Bank BNI dan OJK.

Dorong Pembangunan Infrastruktur Mentawai

Selain mengunjungi Provinsi Bali, Komisi XI lainnya mengunjungi Mentawai Sumatera Barat. Berdasarkan data indikator makro ekonomi, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Komisi XI DPR RI mendorong dan mengajak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk bersama-sama memikirkan pembangunan infrastruktur Mentawai.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya,” ungkap Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI

Marwan Cik Asan saat pertemuan dengan Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di Kantor BI Padang, Sumatera Barat, Selasa (22/8/2017).

Politisi dari Fraksi Demokrat ini menyatakan, bahwa kunci dari pembangunan adalah infrastruktur jalan. “Jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360 km dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 3,8 triliun untuk progres yang sangat signifikan,” katanya.

Bank Indonesia sebuah lembaga negara, lanjutnya, memiliki resources yang cukup besar baik dari sisi anggaran maupun dari sisi potensi sumber daya manusia. “Kehadiran BI di daerah tidak hanya sekedar untuk mengendalikan membantu pemerintahan daerah dan mengendalikan inflasi tapi diharapkan BI bisa memberikan input yang strategis bagi pemerintah daerah agar bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur mentawai,” ungkap Marwan.

Menanggapi hal tersebut di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat. Bahkan data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai telah dilaporkan ke pemerintah pusat. “Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai,” katanya.

Pernyataan Nasrul Abit tersebut, langsung dijawab oleh Marwan, bahwa komitmen DPR sebagai wakil rakyat mewakili rakyat seluruh Indonesia salah satunya Kabupaten Mentawai. “Kami akan memperjuangkan ini agar segera terealisasi”, tutup Marwan. ■ (suj,

rjfe)



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau jembatan Tanipah di Kalimantan Selatan

SIMPAN POTENSI PARIWISATA JALAN LINTAS SELATAN DIHARAPKAN SEGERA RAMPUNG

Untuk melihat perkembangan sejumlah pembangunan infrastruktur, Komisi V DPR RI menyebarkan dua timnya, ke Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Di Jatim, Komisi V DPR berharap Jalan Lintas Selatan (JLS) segera rampung karena sebagai jalur arteri alternatif pantura yang akan membuka potensi ekonomi baru bagi warga di jalur selatan.

“Jalan-jalan itu membuka daerah-daerah terisolir dan ternyata hebatnya dari daerah terisolir itu membuka tempat wisata baru dan berpotensi menambah ekonomi masyarakat seperti Pantai Gemah ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Tulungagung, Jawa Timur, baru-baru ini.

Salah satu harta karun yang selama ini tersimpan di garis pantai selatan Tulungagung adalah Pantai Gemah. Pantai Gemah, sambungnya merupakan tempat wisata baru setelah dibukanya akses Jalan Lintas Selatan (Tulungagung - Trenggalek).

Sebagaimana diketahui, JLS adalah salah satu proyek strategis nasional yang akan menghubungkan delapan daerah di

wilayah selatan Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, proyek pembangunan jalan diperkirakan mencapai kurang lebih berjarak 600 Kilometer. Mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.

Sejak dibuka, Pantai Gemah yang berada di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 420 juta / 3 bulan. Sehingga, bila pembangunan JLS dituntaskan, tidak menutup kemungkinan akan muncul pantai-pantai Gemah lainnya.

“Kata pak Bupati tadi sepanjang JLS Tulungagung ini akan membuka 10 bahkan lebih tempat destinasi baru. Kalau dikelola dengan baik akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang baru, “

jelasan.

Masih diungkapkan Sigit, banyak kajian yang menunjukkan destinasi wisata mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, apabila dikelola dengan baik. Karena itu, politisi PKS ini komitmen akan mendorong pembangunan JLS yang menghubungkan delapan daerah di wilayah selatan untuk segera rampung. Walaupun tidak menutup kemungkinan, pembangunan JLS akan tersendat karena kondisi keuangan negara yang kurang bersahabat. Seperti trayek JLS (Tulungagung-Trenggalek) yang masih menyisakan 34,35 Km dari total panjang 55,1 Km.

“Mudah-mudahan program JLS ini tetap berlanjut seperti yang kita targetkan dalam RPJMN. Tahun 2019 kan semestinya sudah nyambung sampai



Foto: Anne/inn

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo

Malang tapi kondisi keuangan kita seperti ini, minimal Tulungagung-Trenggalek atau Blitar bisa terhubung,” tandasnya.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo meminta agar pembangunan JLS diprioritaskan, lantaran kedepannya bisa membuka sepuluh tempat wisata baru yang bisa mendongkrak PAD Kabupaten Tulungagung.

Pada tahun 2018 akan dilaksanakan pembangunan Ruas Klatak – Batas Trenggalek – Pantai Prigi dan Ruas Besuki – Besole. Ditargetkan pada tahun 2021 pembangunan seluruh ruas JLS selesai.

Pembangunan Embung Diharapkan Mampu Tingkatkan Ketahanan Pangan

Selain meninjau JLS, Tim Kunjungan Kerja Komisi V juga berkunjung ke beberapa tempat, antara lain: Jalan Lingkar Timur (JLT), Jembatan Mergayu dan Embung Nglampir.

Diketahui, pemerintah tengah membangun Embung Nglampir di Kabupaten Tulungagung. Rencananya, embung ini akan mengairi sekitar 100 hektar sawah di wilayah Tulungagung.

Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Budi Yuwono menyambut baik. Ia mendukung penuh pembangunan embung tersebut. Menurutnya, keberadaan embung ini bisa meningkatkan ketahanan pangan daerah setempat.

“Enggak usah bingung-bingung

pembangunan bendungan, cukup kecil-kecil seperti ini asalkan tiap tahun jadi malah lebih efektif, “ ungkap Budi didampingi anggota Komisi V lainnya saat meninjau lokasi pembangunan Embung Nglampir.

Ditinjau dari fungsinya, embung bisa dipakai untuk pembangunan sumber daya air seperti irigasi atau air baku. Selain itu, embung bisa juga digunakan untuk mengendalikan banjir.

Lebih lanjut, ia berkomitmen akan memperjuangkan anggaran pembangunan infrastruktur embung ini untuk masuk dalam APBN 2018 dalam Rapat Kerja Komisi V berikutnya.

“Minggu depan Komisi V akan mulai bicara masalah anggaran, kita pastikan pada tahun 2018 sudah beberapa yang fix bangun, tidak hanya embung tetapi juga infrastruktur lainnya,” jelasnya.

Desak Pemerintah Usut Tuntas Ambruknya Jembatan Tanipah

Diduga terjadi kegagalan bangunan, rombongan Kunjungan Spesifik yang dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemy Francis memberikan perhatian serius terhadap Jembatan Tanipah yang ambruk baru-baru ini.

Jembatan Tanipah menghubungkan Desa Bangkit Baru – Desa Tanipah berlokasi di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dibangun memakai dana DAK

APBN Perubahan 2015 senilai Rp 17.444.198.000.

Ambruknya jembatan tanipah pada tanggal 17 Agustus 2017 saat ini masih dalam investigasi Tim Penegak Hukum. Karena itu, dalam kunjungan spesifik ini, Komisi V DPR RI memastikan hal hal yang berkaitan dengan penerapan UU jasa konstruksi yang sudah di sahkan.

Fary juga melakukan mediasi dengan Bupati dan semua komponen aparat hukum untuk mencari solusi sebagai pengganti Jembatan yang Ambruk. Ia menjelaskan, dalam UU Jasa Konstruksi ada pasal-pasal yang mengatur, baik penyebab dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap jembatan dan bangunan yang dinyatakan gagal bangunan. Karena diduga terjadi kegagalan bangunan jembatan Tanipah.

“Kami fokus penanganan pasca runtuh. Kami ingin memastikan pembangunan jembatan darurat dipercepat. Guna mengantisipasi arus lalu lalang masyarakat sekitar, kami mengharapkan secepatnya pembangunan jembatan darurat sebagai bentuk alternatif yang ada,” sambung Fary Djemy.

Menanggapi itu, Bupati Batola H Hasanuddin Murad menyatakan akan berusaha mengikuti prosedur sesuai ketentuan dari pelaksanaan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan berkolaborasi dengan pihak Balai Besar Wilayah XI Banjarmasin, ia pun bersedia mengirimkan pemberitahuan serta permohonan ke Menteri PU dalam rangka penyediaan tim ahli serta langkah-langkah lainnya.

Terkait pembuatan jembatan darurat untuk kelancaran transportasi masyarakat, mantan anggota Komisi V DPR dua periode itu menyatakan, dalam waktu segera akan membangunkannya. “Insyah Allah dalam waktu segera kita akan buat jembatan sedikit bergeser. Paling tidak untuk kendaraan roda dua bisa lewat,” kata Batola. ■ *(ann,ds)*

DPR DESAK PEMERINTAH PRIORITASKAN EBT

Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto melakukan Kunjungan Muhibah ke Negara Islandia pada tanggal 8-14 Agustus 2017 lalu. Agus Hermanto didampingi H. Agung Budi Santoso (F-PD), Rooslynda Marpaung (F-PD), Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Sayed Abubakar A. Assegaf (F-PD), Muhammad Nasir (F-PD), Satya Widya Yudha (F-PG), Kardaya Warnika (F-P.Gerindra), Kurtubi (F-P Nasdem) dan Jazuli Juwaini (F-PKS).

Di dalam Kunjungan ini, delegasi memfokuskan kunjungannya ke sentra-sentra Geothermal (Panas Bumi) di Negara Islandia, seperti Iceland Geosurvey (ISOR), Green Energy Geothermal (GEG) dan Svartsengi Power Station. Selain meninjau Panas Bumi di Islandia, Delegasi juga melakukan pertemuan dengan Parlemen Islandia dan meninjau Power Station di sana.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk belajar bagaimana Pemerintah Islandia mengelola pusat penelitian

dalam mengembangkan Panas Bumi dan memaksimalkan penggunaan energi Panas Bumi (langsung dan tidak langsung).

Agus menegaskan, kesuksesan Islandia dalam mengembangkan sumber Panas Bumi adalah karena didukung oleh pusat penelitian berkelas dunia yang bergerak di bidang energi Panas Bumi.

“Di Islandia, penelitian tentang Panas Bumi telah dimulai sejak tahun 1945 dibawah Instansi pemerintah. Kini, Islandia Geo Survey melanjutkan penelitiannya sebagai lembaga negara

independen,” ujar Agus dalam sambutannya saat meninjau Iceland Geo survey (ISOR), di Islandia.

Oleh karena itu, lanjut Agus, memiliki pusat penelitian yang hebat adalah kunci untuk memperbaiki pemahaman mengenai Panas Bumi serta dapat menurunkan tingkat risiko dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan.

Dia menambahkan, pemerintah Islandia tengah menjalankan program pengeboran. dalam rangka membantu Indonesia mempercepat pengembangan Panas Bumi. Pada tahap awal, program



Wakil Ketua DPR Korinbang, Agus Hermanto memimpin Tim Muhibah ke Islandia



Wakil Ketua DPR Korinbang, Agus Hermanto dan rombongan gelar pertemuan dengan Parlemen Islandia

ini berfokus pada kegiatan eksplorasi sampai dengan pengeboran eksplorasi yang kemudian data yang diperoleh dari kegiatan ini akan menjadi dasar dokumen tender Wilayah Panas Bumi (GWA).

“Kami yakin akan ada proses pembelajaran untuk semua institusi yang terlibat dalam program tersebut, seperti Direktorat Jenderal Konservasi Baru, Terbarukan dan Energi, Badan Geologi, dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). selain itu, Kami juga berharap, semua anggota yang terlibat dalam program ini akan menjadi ahli nasional yang terbentuk sebagai Pusat Riset Panas Bumi Indonesia ke depannya, serupa dengan ISOR pada periode 1970-1980,” papar Agus

Dia menambahkan, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk belajar bagaimana Pemerintah Islandia mengelola pusat penelitian dalam mengembangkan Panas Bumi dan memaksimalkan penggunaan energi Panas Bumi (langsung dan tidak langsung).

Selanjutnya, politisi Partai Demokrat ini mendesak pemerintah memprioritaskan energi baru dan

terbarukan (EBT) khususnya Panas Bumi. Pasalnya, potensi energi panas bumi mencapai 30 Giga Watt namun baru lima persen saja energi panas bumi yang digarap yaitu sekitar 1700 MW.

“Pemerintah harus lambat laun

“Memang kita belum punya riset geothermal karena itu kita akan bangun embrio pusat riset geothermal. Untuk ISOR sendiri merupakan pusat penelitian panas bumi yang cukup besar dulu dibawah pemerintah pusat sekarang telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat”

meninggalkan fuel dan batubara dengan menguatkan energi baru dan terbarukan seperti Geothermal (panas bumi), hidro dan arus laut, serta panel surya,” paparnya.

Menurut Agus, untuk panel surya diakuinya sangat dibutuhkan bagi masyarakat perbatasan dan juga yang minim akses infrastruktur.

Menyinggung riset Panas Bumi, lanjut Agus, kedatangan delegasi untuk belajar dalam mengelola riset geothermal yang memiliki standar dunia. Karena itu kita juga pernah mengunjungi Selandia Baru dan sekarang mengunjungi Iceland Geothermal (ISOR) di Islandia.

“Memang kita belum punya riset geothermal karena itu kita akan bangun embrio pusat riset geothermal. Untuk ISOR sendiri merupakan pusat penelitian panas bumi yang cukup besar dulu dibawah pemerintah pusat sekarang telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat,”ujarnya.

Selain berkunjung ke sentra-sentra panas bumi, di Islandia delegasi DPR RI juga mengunjungi Konsul RI dan melakukan pertemuan dengan Warga Negara Indonesia yang bermukim disana.

Delegasi juga mengadakan pertemuan dengan Speaker of the Parliament of Icelandic Unnur Bra Konraosdottir, serta mengadakan courtesy call dengan Presiden Islandia H.E Guoni Th. Johannesson, dilanjutkan kunjungan ke United Nations University Geothermal Training Programme (UNU-TGP), kemudian dilanjutkan dengan meninjau United Nations University Fisheries Training Programme (UNU-FTP) dan melihat Industri Perikanan HB Grandi di Islandia.

Dari Islandia, kunjungan dilanjutkan Ke Denmark untuk bertemu langsung dengan Pihak KBRI Denmark dan WNI yang bermukim di Denmark. ■ (si)



Foto bersama seluruh Anggota Delegasi AIPA Caucus ke 9 di Jakarta

PERKUAT KERJA SAMA KELAUTAN DPR GELAR AIPA CAUCUS

DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9, yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 17-20 Juli lalu. AIPA Caucus merupakan mekanisme Parlemen negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memantau tindak lanjut pelaksanaan resolusi AIPA, membahas suatu isu tertentu, hingga menjadi ajang pembahasan upaya harmonisasi legislasi yang dapat memfasilitasi kerja sama regional.

Sidang dihadiri 74 orang delegasi dari seluruh Parlemen Anggota AIPA (kecuali Filipina), Kementerian Luar Negeri Filipina, Perwakilan Thailand untuk ASEAN, Perwakilan Sekretariat ASEAN, Sekretaris Jenderal dan Sekretariat AIPA, Sekretariat GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Sekretariat ASEAN, Freeland (organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan anti perdagangan ilegal satwa liar dan perbudakan manusia), dan perwakilan USAID.

Delegasi DPR RI pada Sidang ini terdiri dari: Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam), Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra), Juliari P. Batubara (Wakil Ketua BKSAP/Ketua Delegasi/F-PDIP), H. Rofi' Munawar (Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PKS), H. Syaifullah Tamliha (Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PPP), Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PDIP), Evita Nursanty (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-

PDIP), Dony Maryadi Oekon (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), Dave Akbarshah Fikarno (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PG), Dwie Aroem Haiatie (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PG), Rachel Maryam Sayidina (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-P Hanura), H. Syofwatillah Mohzaib (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PD), Sartono Hutomo (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PD), H. Jon Erizal (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PAN), Hj. Siti Masrifah (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PKB), H. Mahfuz Sidik (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PKS), Hj. Nurhayati (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-PPP), H. Hamdani (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-P Nasdem) dan Moh. Arief Suditomo (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/F-P Hanura).

Sidang ke-9 AIPA Caucus kali ini membahas dua tema besar secara mendalam yakni: Kerja Sama Maritim (Working Group 1) dan Penyelesaian Konflik Secara Damai (Working Group 2). Selain dua tema tersebut, Sidang juga membahas isu yang telah menjadi pembahasan regular di mekanisme

tersebut dalam *Working Group 3* yakni Pelaksanaan Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Flora dan Fauna yang Hampir Punah (Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna). Pembahasan ini merupakan hasil kerja sama yang telah dijalin oleh AIPA dengan *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN).

Wakil Ketua BKSAP, Juliari Batubara menyatakan bahwa hal ini juga merupakan wujud nyata AIPA membahas isu kelautan dalam upaya pencapaian Goal 14 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni *Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*. Pemanfaatan dan kerja sama dalam mengelola sumber daya kelautan sangat penting bagi kehidupan dan terkait erat dengan keamanan pangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Pada kesempatan ini, hadir pula 2 pembicara yakni Dr. Arif Havas Oegroseno (Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Maritim) yang berbicara mengenai isu *Regional Maritime Cooperation* mengingat 80% kawasan Indonesia terdiri dari laut. Dr. Arif menyoroti tantangan di bidang kelautan baik yang bersifat tradisional maupun



Wakil Ketua DPR, Fadli Zon memberikan rekomendasi kepada Sekjen AIPA

non-tradisional.

Pembicara lainnya adalah H.E. Dr. Marty Natalegawa (Mantan Menteri Luar Negeri RI) untuk berbicara isu Resolusi Konflik. Beliau menyampaikan relevansi ASEAN sebagai organisasi regional yang juga memajukan penyelesaian konflik secara damai.

Sidang juga membahas perkembangan *Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) pada *Working Group 3*. Para Delegasi telah melaporkan beberapa perkembangan pelaksanaan CITES dan menyampaikan bahwa telah ada beberapa mekanisme nasional yang dibangun untuk memastikan pelaksanaan CITES. Dalam pembahasan *Working Group 3*,

diketahui pula bahwa perdagangan satwa dan tumbuhan terancam juga bersifat lintas batas di kawasan ASEAN.

Dalam pembahasan, DPR RI dan Parlemen Singapura mendukung usulan Thailand untuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus di AIPA untuk penanganan perdagangan Flora dan Fauna yang hampir punah. Satgas Khusus ini akan mendukung kerja ASEAN *Working Group on CITES and Wildlife Enforcement* (AWG CITES-WE) dalam kerangka kerja lembaga legislatif.

Selain ketiga isu tersebut, DPR dilaksanakan pula sebuah sesi khusus terkait keorganisasian AIPA. Hal ini dipandang perlu mengingat sejak 40 tahun berdiri, AIPA, masih memiliki keterbatasan dalam merespon situasi global dan regional. Sidang menyepakati sejumlah rekomendasi untuk dibawa ke Sidang Umum AIPA diantaranya adalah: untuk mengembangkan AIPA menjadi mitra sejajar ASEAN; untuk mendorong mekanisme baru di luar mekanisme regular yang dapat secara efektif merespon perkembangan dan situasi urgen di kawasan; mereformasi sekretariat AIPA; menstandarisasi prosedur pelaksanaan dan pengawasan atas implementasi resolusi AIPA di level nasional. ■



Delegasi DPR pada sidang AIPA menandatangani rekomendasi AIPA Caucus ke 9

WAYAN KOSTER MEMPERKOKOH JATI DIRI KRAMA BALI



Anggota DPR RI Wayan Koster bersama konstituennya

Putra Bali dari Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng, Wayan Koster adalah anggota Komisi X DPR RI dan Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Provinsi Bali, memiliki visi memperkokoh jati diri krama Bali

dengan memperkuat adat, agama, budaya melalui pelaksanaan pola pembangunan nasional semesta berencana.

Wayan Koster juga dekat dan membaur dengan seluruh lapisan masyarakat Bali. Berbagai acara dan kegiatan mengisi waktu resesnya bertemu warga Bali. Seperti apresiasi dan dukung Parade Tektakan Nangluk Merana, wujud nyata pelaksanaan adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Serta melaksanakan upacara memdem pedagingan wantilan pure dalem Desa adat Semaon, Kecamatan Payangan, Gianyar.

Bagi Wayan Koster, Pendidikan adalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya, ia memperjuangkan

Universitas Hindu Negeri Jaya Pangus Bali menjadi Universitas Negeri pertama kebanggaan umat Hindu Indonesia, khususnya Bali. Dia juga menggagas percontohan TK/PAUD Hindu dan berbahasa Bali yang diharapkan menjadi percontohan dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa dikembangkan di Bali. Pendidikan dini adalah titik yang krusial dan sangat strategis untuk menanamkan pendidikan moral sejak dini.

Menggunakan tupoksinya untuk membantu mencerdaskan bangsa melalui Progam Beasiswa bagi pelajar Bali juga tidak luput dari perhatiannya.

Ia mensyukuri kepercayaan masyarakat, dan tak ingin mengecewakan para pemilihnya. Itulah sebabnya Wayan Koster tak berhenti bekerja. Dirinya akan ngayah sekala niskala dengan setulus-tulusnya dan sejujur-jujurnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. ■ (as)

SUDIN INGIN SEJAHTERAKAN PETANI DAN NELAYAN LAMPUNG

SUDIN adalah wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) memiliki visi khusus yakni mensejahterakan masyarakat petani dan nelayan Lampung. Keberpihakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dapat dilihat komitmennya yang selalu mendatangi rakyat Lampung secara berkala untuk mendengarkan keluh kesah mereka.

Keberpihakan Sudin pada petani dan nelayan Lampung sangat jelas. Ia tergolong anggota dan DPR yang vokal untuk memperjuangkan realisasi bantuan-bantuan seperti mesin traktor, mesin penggiling padi, pompa air, alat panen padi, alat tanam

padi, permodalan untuk nelayan, bibit tanaman yang kemanfaatannya langsung dapat dirasakan oleh petani dan nelayan.

Dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat pertanian dan kehutanan, di Kabupaten Pringsewu, di Kecamatan Palas dan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan mesin panen padi.

Penyerahan secara simbolis 38 unit alat mesin pertanian di Pematang Pasir, Lampung Selatan.

Dengan merangkul masyarakat kecil seperti nelayan dan petani maupun para tokoh-tokoh di Lampung, Sudin berharap Lampung semakin damai dan sejahtera. ■



Anggota DPR RI Sudin memberikan bantuan mesin traktor di kabupaten Lampung Selatan



DEDING GANDENG MASYARAKAT BENTUK KAMPUNG SIAGA BENCANA

Reses beberapa pekan lalu, dimanfaatkan Anggota DPR Deding Ishak untuk mengajak masyarakat di daerah pemilihannya Jawa Barat III membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB). Upaya itu dilakukan guna mencetak masyarakat yang siap dalam penanganan bencana, terlebih Cianjur merupakan daerah rawan bencana alam urutan pertama di Indonesia.

“Penting menyiagakan masyarakat dalam menghadapi bencana. KSB ini nantinya akan melatih masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan memiliki satuan tugas yang bekerja di setiap desa,” ungkapnya saat membuka KSB di Desa

Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Cianjur.

Politisi fraksi Golkar itu sangat mengapresiasi Program KSB yang dicanangkan Kementerian Sosial. Dia menilai program Kemensos itu sangat efektif menekan dampak bencana yang hebat. “Masyarakat juga harus mulai membiasakan diri untuk melaksanakan kegiatan yang mampu mengurangi resiko bencana, baik dengan memelihara lingkungan, melatih diri dalam deteksi bencana dan melatih kemampuan jika terjadi bencana,”tegsanya.

KSB bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko dan ancaman bencana, dengan

cara menyelenggarakan kegiatan penanggulangan berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan masyarakat setempat.

Dijelaskan Deding dalam kegiatan juga turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Sumitra beserta unsur Muspika setempat. Acara kunjungan ke Naringgul dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada masyarakat tidak mampu di Desa Wangujaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur. ■



Anggota DPR RI Deding Ishak

PENDIDIKAN PESANTREN LANGKAH ANTISIPASI MASUKNYA PAHAM RADIKALISME

Masa reses dimanfaatkan Anggota DPR Noor Achmad untuk menghadiri peresmian gedung baru Sekolah Menengah Kejuruan Roudlotul Muhtadin di Desa Gemiring Lor Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, yang tidak lain merupakan dapilnya.

Saat ini, terdapat 122 pendidikan SMK di Kabupaten Jepara. Dari jumlah tersebut separuhnya berbasis keagamaan yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Noor yang konsen pada pendidikan pesantren sangat mengapresiasi pembangunan gedung yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan.

“Sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mengembangkan pendidikan khususnya pesantren, sebagai langkah mengantisipasi masuknya paham radikalisme. Serta sebagai penanam modal akhlaqul karimah, wawasan islam yang moderat dan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendidikan kejuruan berbasis pesantren,”ungkap Noor

Politisi Partai Golkar ini menilai pendidikan pesantren sangat penting untuk dikembangkan, mengingat saat ini banyak paham-paham radikal yang masuk dari berbagai penjuru.

“Pendidikan kita semestinya

tidak hanya pendidikan formal, tetapi perlu ditanamkan pendidikan karakter kebangsaan, wawasan nusantara, sikap toleran dan Bhineka Tunggal Ika untuk mencegah masuknya paham radikalisme yang dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa,”tandasnya

Gedung yang baru diresmikan ini, kini dilengkapi dengan fasilitas gedung technopark, Sarana pengembangan sains and technology, diharapkan hal ini mampu mendorong budaya inovasi dan daya saing industri dan institusi berbasis pengetahuan. ■



Anggota DPR RI Noor Achmad

MENJAGA EKOSISTEM DAN LAHAN PERTANIAN

Produktivitas pertanian di Kota Bogor turun 20 %, faktor penyebabnya adalah keterbatasan irigasi. Kondisi saat ini lahan pertanian hanya tersisa 320 hektar dari luas wilayah Kota Bogor seluas 118.50 km². Degradasi atau penyusutan lahan pertanian di Kota Bogor cukup mengkhawatirkan, hal ini menjadi perhatian serius Anggota DPR RI

Dapil Jawa Barat III, Ahmad Riza Patria.

Dia mengharapkan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat dapat menjaga ekosistem alam dan lahan pertanian. Riza mengaku prihatin dengan semakin berkurangnya lahan terbuka hijau di Kota Bogor. “Setiap kota di seluruh dunia harus memperhatikan ekosistem, diantaranya lahan pertanian. Kota Bogor sebuah kota pemukiman tempat berinteraksi warga harus juga memperhatikan lahan pertanian ini,” ungkapnya, belum lama ini.

Untuk itu, pemerintah sebisa mungkin harus mempertahankan sumber daya lahan pertanian ini supaya ke depan tidak terus mengalami

penyusutan. Kata Riza, Faksi Partai Gerinda akan memperjuangkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian di Parlemen.

“Jadi, harapan kami Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor bisa mengesahkan Perda ini. Setidaknya lahan pertanian yang tersisa 320 hektar bisa dipertahankan,” paparnya.

Upaya-upaya pelestarian harus selalu digalakan, karena degradasi lahan dari tahun ke tahun terus meningkat dan saat ini telah sampai pada kondisi yang sangat parah. Penyebab degradasi yang terjadi pada lahan pertanian secara umum dapat berupa erosi, longsor, pencemaran tanah, menurunnya kesuburan tanah, dan masih ada faktor lain. Saat ini lahan kritis di Indonesia telah mencapai 30 juta HA. Dampak degradasi lahan antara lain, menurunnya produktivitas lahan-lahan pertanian, terjadinya bencana banjir, kekeringan pada musim kemarau, serta rusaknya ekosistem danau dan waduk. ■ (eko)



Anggota DPR Ahmad Riza Patria

MORENO KUKUHKAN KAMPUNG SIAGA BENCANA

Kesiapsiagaan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Sebaiknya suatu kabupaten kota melakukan kesiapsiagaan. Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur V Moreno Soeprapto melakukan pengukuhan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Gubuklakah, Kabupaten Malang.

Kegiatan ini dilakukan dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa serta jajarannya dan Bupati Kabupaten Malang Rendra Kresna. Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah suatu kondisi masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok

yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana.

“Pembentukan KSB sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Terutama di daerah-daerah yang terdeteksi memiliki kerentanan bencana alam. Masyarakat diajak mengenali bencana sehingga tidak mudah shock ketika bencana berlangsung,” papar Moreno belum lama ini.

Moreno mengajak masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam acara Kampung Siaga Bencana, kegiatan ini bekerjasama dengan Tagana (Taruna Siaga Bencana) di rest area Poncokusumo, Desa

Gubuklaka. Tujuan diadakan KSB ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa dan lain sebagainya.

“Simulasi bencana ini dilakukan agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait bahaya dan penanggulangan bencana saat terjadinya bencana,” ungkap Politisi dari F Partai Gerindra. ■ (eko)



Anggota DPR RI Moreno Soeprapto melakukan pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Malang



MICHAEL WATTIMENA TINJAU LOKASI BANJIR DI KOTA SORONG

Dalam kunjungan dapilnya ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Anggota DPR RI Michael Wattimena berkesempatan menemui Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua Barat. Michael juga melakukan peninjauan terhadap beberapa fasilitas umum yang dibiayai oleh APBN, termasuk kerusakan jalan trans nasional Basuki Rahmat tepatnya di Kilometer 9,5 dan 15 Kota Sorong.

Michael mengatakan, setelah meminta penjelasan dari Kepala Satker dan Kepala BWS, ternyata kendala-kendala yang dihadapi dalam memperbaiki drainase dan jalan khususnya di Kilometer 9,5 dan 15 Kota Sorong serta di beberapa titik-titik lainnya adalah akibat tingginya curah hujan.

“Karena pembiayaan jalan ini melalui APBN, makanya dalam masa reses kita datang ke sini, supaya apa yang jadi keresahan dan kegelisahan masyarakat bisa teratasi dalam waktu yang singkat,” ucap politisi F-Demokrat itu.

Ia juga menyampaikan bahwa Kota Sorong merupakan pintu gerbang Papua Barat, dimana pertumbuhan dan pembangunan yang ada di sana cukup tinggi, sehingga penataan kota tersebut semakin hari harus semakin bagus. Terutama dalam hal penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase, semuanya harus terintegrasi dengan sungai-sungai yang ada.

“Ada usulan dari Kepala BWS agar di kota ini dibangun satu lokasi penampungan air yang besar, jadi manakala hujan deras dan air laut pasang, maka air ditampung di tempat itu, sehingga tidak terjadi banjir lagi,” jelasnya. ■ (dep)



Anggota DPR RI Michael Wattimena Meninjau sejumlah fasilitas umum di kota Sorong

PERJUANGKAN KEMAKMURAN RAKYAT

Kedatangan Anggota DPR RI Muhammad Nasyit Umar menemui kelompok tani Tudang Sipakane II di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan pengarahan pertanian, sekaligus meninjau mesin penggiling padi (rice milling unit) bantuan Kementerian Pertanian untuk kelompok tani setempat.

Nasyit berharap, mesin penggiling padi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani guna memudahkan pengolahan padi menjadi beras.

“Bila Bulog tak mau membelinya, laporkan kepada saya. Ini sudah keputusan rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian,” tegasnya.

Ada sekitar 251 hektar lahan sawah di Mannanti. Para petani juga menyampaikan permintaan perbaikan infrastruktur pertanian di sekitar Mannanti, seperti perbaikan tanggul dan jalan yang rusak. Nasyit yang mendengar keluh kesah para petani ini, langsung menghubungi pejabat dinas setempat untuk segera memberi bantuan kepada kelompok petani di Mannanti.

Tidak saja bantuan RMU, Nasyit juga membantu kelompok tani di Sinjai untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk, bibit, dan peralatan pertanian lainnya. Politisi dari dapil Sulsel II itu telah memperlihatkan kepeduliannya pada rakyat kecil yang diwakilinya.

Nasyit kerap membangun kedekatan dengan rakyat di dapilnya yang meliputi sembilan kabupaten, yaitu Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Wajo, Soppeng, Bone, dan Sinjai. Bertemu dan singgah di rumah penduduk sekitar, menjadi rutinitasnya untuk mendengar aspirasi dan harapan masyarakat. Hampir tidak ada jarak antara dirinya dengan rakyat yang diwakilinya. ■ (dep)



Anggota DPR RI Nasyit Umar menemui kelompok tani Tudang Sipakane II di Kabupaten Sinjai

BLUSUKAN KE LIMA WILAYAH



Anggota DPR Daeng Muhammad memberi santunan kepada anak yatim

Setidaknya lima wilayah yang dikunjungi Anggota Komisi III DPR RI, Daeng Muhammad di masa resesnya kali ini. Sesuai dengan bidang kerja Komisi III yakni bidang hukum dan HAM, maka lawatan pertamanya saat reses adalah mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan kelas II Cikarang Kabupaten Bekasi. Disini ia mendapati permasalahan selain

over capacity warga binaan, yakni kekurangan akomodasi. Hal sangat mengganggu keseharian warga binaan.

Di masa resesnya Daeng juga mengunjungi Padepokan Talagawang Cikampek, Kabupaten Karawang. Disini ia memberikan bantuan sekaligus meresmikan

Sarana Olahraga dan perlengkapan. Hal ini sebagai tindak lanjut akan aspirasi masyarakat sekitar yang mengaku kekurangan fasos dan fasum.

Tidak lupa Daeng juga ikut menyaksikan prosesi Khitanan Massal bagi warga yang tidak Mampu. Acara ini di selenggarakan oleh Relawan “Srikandi Daeng Muhammad” di Kecamatan

Cibitung Kabupaten Bekasi. Usai mengunjungi acara tersebut ia pun segera bergeser untuk mengunjungi masyarakat di kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Disini ia memberikan santunan bagi anak yatim dan warga yang tidak mampu.

Kunjungan di masa resesnya kali ini ditutup Daeng dengan blusukan ke desa Segar Jaya kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Disini ia ikut mensosialisasikan dan mengampanyekan destinasi wisata lokal Pantai dan Pulau Putri desa Segar Jaya kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

“Masih banyak potensi wisata lokal yang sebenarnya sangat bagus dan bisa menjadi aset daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, namun belum tergali dan terekpose. Untuk itu perlu dukungan semua pihak untuk bisa mewujudkan itu semua,”pungkasnya.

■ (Ayu)

KUNJUNGI KORBAN KEBAKARAN SAMPAI IKUT BANTU SELESAIKAN SENGKETA ANTAR DESA

Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub termasuk dalam salah satu anggota DPR yang “rajin” bertemu dengan konstituen atau masyarakat di daerah pemilihannya. Terlebih lagi ketika masa reses tiba, Politisi dari Fraksi PAN ini tidak lupa untuk turun ke lapangan.

Di hari pertamanya ia mengunjungi kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara. Disini ia berdiskusi dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat setempat guna menampung dan menyerap aspirasi. Salah satunya terkait persoalan hukum, HAM, adat istiadat dan permasalahan lainnya termasuk sengketa atau perselisihan yang terjadi di sekitar kecamatan tersebut, yakni antara dua desa Gampong dan Mukim.

Untuk hal ini Muslim memberi masukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui peradilan adat.

Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kelestarian adat sekaligus sebagai langkahantisipasi dari semakin berkembangnya perilaku masyarakat modern. Namun untuk tindak pidana, agar dapat ditangani secara cepat, transparan, dan profesional oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Pada kesempatan itu Muslim juga mengingatkan agar warga pro aktif dalam pembangunan Aceh Tenggara. Adanya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah lagi dana desa, harus secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Tenggara.

Dalam masa resesnya yang bertepatan

dengan hari raya umat Islam, Muslim juga menyerahkan bantuan berupa delapan ekor sapi yang disebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dan sekitarnya. Hal itu semata dilakukan untuk berbagi kebahagiaan di hari yang bersejarah bagi umat muslim. ■ (Ayu)



Anggota DPR Muslim Ayub menyerahkan bantuan berupa sapi di Kabupaten Aceh Tenggara



INISIASI RESES BERSAMA BAGIKAN ALSINTAN

Anggota Komisi IV DPR yang juga Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menginisiasi Reses Bersama anggota FKB serta mengajak Ketua Umumnya sebagai upaya mengawasi kinerja anggotanya secara langsung.

“Kami bersama teman-teman anggota Fraksi PKB mengajak Ketum (melakukan Reses Bersama). Ketum juga memeriksa bagaimana kinerja anggota fraksi apakah mereka betul-betul menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan apa yang menjadi aspirasi rakyat itu,” terang pria yang akrab disapa Kang Cucun melakukan Reses Bersama, melakukan Panen Raya dan Pembagian Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) di Desa Sumpersari, Ciparay, Kabupaten Bandung belum lama ini.

“Mungkin baru hanya FPKB ya yang reses ketumnya turun, ketua fraksi turun, dan semua anggota turun, dan dihadirkan juga mitra dari anggota fraksi itu, hanya dari PKB. Apa lagi sekarang dalam masa panen, kita ikut berbahagia bersama petani, mereka bersyukur hasil tanamannya bisa dipanen dengan sempurna tanpa ada gangguan sedikitpun,” imbuhnya.

Sebagai partai advokasi, pembelaan kepada petani dilakukan secara penuh oleh PKB. Cucun menerangkan, sebagai anggota Komisi IV, berdampingan dengan mitranya Kementerian Pertanian RI (Kementan) menyalurkan berbagai alat pertanian.

Ini (bantuan) Alsintan. dilakukan setiap tahun anggaran. Ini yang tahun anggaran 2017 ada 140 traktor roda 2, 10 unit traktor roda 4, pompa, kultivator, alat panen, kemudian alat untuk komoditas lain juga untuk panen jagung, kita turunkan semua, kurang lebih ada 240 kelompok tani yang sekarang menerima bantuan ini, terang Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

Selain itu, untuk menghindari kerugian yang sering diterima petani, karena banjir dan hama, Cucun menambahkan, dibagikan juga Sertifikat asuransi Usaha Tani Padi. Menurutnya, Komisi IV menekankan kepada Kementan, agar jangan sampai petani rugi. Selain itu, petani juga diberikan sosialisasi. ■ (mp)



Anggota DPR Cucun Ahmad Syamsurizal

TAUFIQ R. ABDULLAH BERKOMITMEN DORONG KUALITAS DAN DEDIKASI PPL

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Taufiq R Abdullah berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi agar para PPL terutama di tiga Kabupaten (Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen) mempunyai kualitas dan dedikasi dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada para petani secara maksimal.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Taufiq R Abdullah adalah memfasilitasi kegiatan studi banding bagi para PPL se Kabupaten Banjarnegara ke lokasi percontohan pertanian modern (corporate farming) di Kabupaten Sukoharjo, bulan April 2017 lalu.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga aktif memberikan pemberdayaan dan pelatihan kepada para PPL di Kabupaten Purbalingga dengan mengenalkan metode salibu dan Superbodi.

Salibu merupakan metode tanam tanpa menggunakan benih dan tanpa pengolahan lahan. Teknik salibu menggunakan bonggol tanaman padi sisa panen musim pertama sehingga lebih cepat panen. Adapun metode superbodi adalah metode tanam kedelai dengan memasukkan biji kedelai di tengah bonggol padi.

Dengan penerapan metode tersebut, diharapkan produktivitas lahan meningkat daripada sebelumnya. Dengan begitu, peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas secara langsung berdampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. ■ (mp)



Anggota DPR RI Taufiq R Abdullah memfasilitasi pelatihan untuk PPL dan kelompok tani

MENGAJAK MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Momentum HUT Kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun dijadikan ajang untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Anggota DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memanfaatkan kemeriahan hari kemerdekaan dengan menggelar acara jalan sehat bagi warga Kelurahan Candi Baru, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Ini sekaligus ajakan untuk hidup sehat, agar kualitas hidup juga semakin tinggi. Jumlah pesertanya mencapai 450 orang, yang terdiri dari orangtua dan anak-anak, dari semua level usia. Ini adalah even tahunan yang sangat menghibur masyarakat setempat. Ada

dua buah sepeda sebagai *doorprize* yang diberikan Kharis kepada peserta yang beruntung.

“Marilah kita terus menjaga kesehatan diri kita dengan rutin melaksanakan olahraga. Seiring berjalannya waktu, tingkat kesehatan masyarakat semakin menurun. Terbukti, beberapa penyakit yang dulu menyerang orang di atas usia 45 tahun, kini sudah menjangkiti anak muda. Gaya hidup sehat dengan berolahraga dan dengan makanan yang sehat merupakan upaya memperoleh harapan hidup lebih panjang,” seru politisi PKS tersebut.

Pukul 06.00 pagi, warga sudah antusias berkumpul. Sebelum jalan sehat dimulai, Kharis yang berasal dari dapil Jateng V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten) ini, mengajak warga bersenam dan makan bubur bersama. Jarak tempuh jalan sehat kali ini sekitar 3.5 km dengan mengelilingi beberapa komplek perumahan setempat. ■ (ml)



Anggota DPR Abdul Kharis Almasyhari makan bubur bersama sebelum memimpin Jalan Sehat bersama masyarakat Sukoharjo, Jateng

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA

Melihat Papua haruslah utuh. Manusia Papua adalah orang asli Papua dari suku Malanesia. Leluhurnya adalah Homo Sapiens. Dan pembangunan di Papua selama 72 tahun terakhir belum

sepenuhnya dikelola secara baik untuk mensejahterakan rakyat setempat. Visi inilah yang diemban Muhammad Yudi Kotouky saat terjun ke tengah masyarakat Papua.

Berasal dari dapil Papua (mewakili 29 kabupaten/kota), Yudi mengerti betul bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat Papua. Ia juga tahu sumber alam Papua yang begitu besar belum tergali untuk kesejahteraan rakyat Papua. Aset-aset yang dimiliki masyarakat Papua

selama ini masih bersifat aset mati (*death capital*). Untuk itu, Pemerintah harus hadir dengan merubahnya menjadi aset hidup (*life capital*).

Untuk menghidupkan aset tersebut, Yudi ikut menggalakkan pemberdayaan masyarakat melalui hak adat masyarakat. Setidaknya ada tujuh suku yang tersebar di Papua maupun Papua Barat. Modal sosial ini harus dihargai untuk membangun Papua. Yudi melihat, di kawasan Papua Tengah, belum ada perguruan tinggi negeri. Sekolah-sekolahnya juga terlihat sangat sederhana. Rumah sakit rujukan belum tersedia.

Begitu juga bandara dan terminal transportasi darat belum dikembangkan. Memasuki pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata Yudi, pemberdayaan masyarakat Papua jadi keniscayaan. “Diperlukan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan holistik,” ucapnya kepada Parlementaria. ■ (ml)



Anggota DPR M. Yudi Kotouky berfoto bersama para siswa SD di Papua



GURU RA TIDAK PERNAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pengurus Ikatan Guru Raudhatul Athfal (RA) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mengaku tidak pernah lagi menerima bantuan dari pemerintah maupun dana APBN dan APBD dalam menjalankan tugasnya mengajar anak bangsa. Selama ini, dana bantuan dari pemerintah yang dikucurkan ke desa hanya disalurkan kepala desa untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Muhammad Romahurmuziy dalam Seminar Nasional IGRA Kabupaten Banjarnegara, baru-baru ini mengaku telah berbicara dengan Menteri Agama Lukman Hakim terkait dengan persoalan guru RA itu. Menurut Romahurmuziy, bantuan pemerintah dalam bentuk dana desa memang dialokasikan dari dua sumber, yakni kementerian dan nonkementerian.

“Para kepala desa memahami ketentuan dana desa secara beragam. Pemahaman para kepala desa ini juga bergantung pada hasil konsultasi mereka dengan dinas pendidikan daerah serta bupati setempat. Solusinya, para anggota DPRD perlu berkomunikasi dengan bupati setempat agar memfasilitasi anggaran bagi pendidikan RA,” jelas politisi F-PPP itu.

Di sisi lain, Romahurmuziy mendorong agar guru-guru RA segera menempuh pendidikan hingga strata satu. Berdasarkan data yang ada, dari total guru RA se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 300 ribu tenaga pengajar, saat ini terdapat 47,71 persen yang belum bergelar S-1.

“Padahal, kualitas pendidikan guru sangat penting dan menentukan kualitas anak didik kelak. Kita harus meningkatkan dahulu kualitas pendidikan guru, baru kualitas didik anak meningkat,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen itu. ■ (g)



Anggota DPR RI Muhammad Romahurmuziy memberikan cenderamata kepada pengurus IGRA

SUARAKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAPIL

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 pada akhir Juli pertengahan Agustus lalu, dimanfaatkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim untuk mengunjungi daerah pemilihannya, Jawa Tengah VIII, yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Bertempat di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Mustaqim bertemu dengan perwakilan warga dan tokoh masyarakat dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Purwojati dan Kedungbanteng. Dalam kesempatan itu, Mustaqim pun menyerahkan waqaf Al Qur'an secara simbolik kepada pengurus masjid dan musholla serta menyampaikan beberapa hal.

“Saya menyampaikan soal pelaksanaan Haji 2017 dari soal biaya haji yang makin tahun diharapkan makin turun seiring subsidi dari dana haji nasional yang terkumpul. Selain itu, kualitas pelayanan haji dari proses di dalam negeri sampai seluruh proses ibadah haji di tanah haramain Madinah dan Mekkah yang terus ditingkatkan, sampai dengan upaya penambahan kuota haji Indonesia sebagai negara pengirim calon haji terbesar di dunia,” jelas Mustaqim.

Berbagai aspirasi dari masyarakat yang selama ini diperjuangkan Mustaqim pun sudah diterima oleh masyarakat, diantaranya pembangunan dan bantuan kepada pondok pesantren, madrasah, masjid hingga musholla. Kemudian program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

“Selama ini secara langsung pada saat Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja Komisi VIII, saya suarakan bagi kepentingan warga dan konstituen di dapil. Khususnya bantuan untuk pondok pesantren dan madrasah dan program KUBE. Dengan KUBE, dapat meningkatkan roda ekonomi keluarga menuju kesejahteraan yang lebih bermartabat,” komitmen politisi F-PPP itu. ■ (g)



Anggota DPR RI Achmad Mustaqim menyapa masyarakat di dapilnya

DANA DESA JANGAN NGANGGUR DI BANK



Foto: dkk.pri/in

Anggota DPR Johnny G. Plate bersama konstituennya

Anggota DPR RI Johnny G. Plate menyoroti pemanfaatan semua keuangan yang masuk ke desa, khususnya dana desa. Menurutnya, dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat dalam APBN bertujuan agar rakyat di desa semakin produktif.

Demikian diungkapkannya saat melakukan reses ke Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarau Barat, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

“Saya berharap, semua uang yang masuk ke desa khususnya dana desa digunakan untuk kepentingan desa. Digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa”, ungkap Johnny di hadapan ratusan masyarakat Daleng.

Karena itu, dana desa dan semua keuangan yang masuk ke desa hendaknya dimanfaatkan dengan baik demi

meningkatkan ekonomi masyarakat desa. “Jangan sampai ada uang rakyat yang tidak digunakan dengan baik,” tegas politisi NasDem ini.

Selain itu, dia juga menyampaikan, pemerintah desa harus bisa menggunakan dana desa dengan cepat agar tidak mandeg dalam sirkulasi keuangan negara.

“Dana ini jangan sampai nganggur di bank atau lama terpakai”, jelasnya.

Diakhir pertemuan, Johnny juga menekankan agar pemanfaatan dana desa dalam hal pembangunan infrastruktur diselaraskan dengan kualitas yang bagus. “Dana desa harus menghasilkan proyek-proyek atau harta negara yang bermanfaat bagi rakyat,” tandasnya. ■ (am)

INDUSTRI KAKAO TIDAK MENGUNTUNGAN PETANI

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Luthfi A Mutty menyayangkan industri kakao sebagai penghasil devisa terbesar ketiga sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet, justru tidak membawa keuntungan besar bagi para petani kakao.

Demikian diungkapkan Luthfi saat berbagi tips budidaya kakao kepada puluhan petani kakao asal Kalimantan Utara di Luwu Utara, dalam masa reses baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, mantan Bupati Luwu Utara ini berbagi ilmu teknik sambung pucuk dan bagaimana menghasilkan biji kakao fermentasi yang bagus.

Menurutnya, keuntungan terbesar dari budidaya kakao justru dapat diperoleh saat pasca panen atau proses fermentasi. “Jika

fermentasi bagus, maka harganya jauh diatas harga kakao yang non fermentasi,” papar Luthfi.

Hal ini yang kemudian menjadi akal bulus pengusaha kakao, yang mana mereka mengiming-imingi para petani mendapatkan uang cash dengan cepat agar mereka menjual biji kakao basah. Dengan begitu, perusahaan bisa meraup keuntungan besar dengan pembelian timbangan basah, karena mengolah sendiri kakao fermentasi.

“M e m a n g sekilas ini mengurangi beban petani karena

tidak ada lagi tenaga untuk menjemur atau fermentasi, tetapi sebenarnya margin keuntungan justru pada kakao fermentasi. Petani bisa memperoleh harga yang jauh lebih tinggi,” terangnya.

Seharusnya, sambung Luthfi, perlu ada intervensi Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan maupun Pusat untuk membuat regulasi yang melarang perusahaan besar membeli biji kakao basah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan stimulan ekonomui kepada petani. ■



Foto: dkk.pri/in

Anggota DPR Luthfi A Mutty bersama Petani Kakao asal Kalimantan Utara

MASYARAKAT NTT KELUHKAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN

Anggota Komisi VII Ferry Kase menemui masyarakat di Desa Oeolo dan Oelneke Kec. Musi Kab. TTU, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya itu, ia memperoleh aspirasi terkait lemahnya infrastruktur pendidikan di NTT. Ia pun akan memperjuangkan keluhan ini untuk disampaikan dalam rapat dengan Pemerintah.

“Pemerintah harus serius tangani masalah pendidikan di NTT. Urusan pendidikan tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mutu pendidikan itu sendiri,” ujar Ferry.

Selain infrastruktur pendidikan, Ferry juga meminta pemerintah lebih serius dalam membenahi mutu

pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. “Untuk membenahinya, sangat bergantung pada kondisi guru, mulai dari kualitas dan mutu guru tersebut,” tuturnya.

Ia juga meminta kesejahteraan guru bisa lebih ditingkatkan agar mutu pendidikan di NTT semakin baik. Ia akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di dapilnya di tingkat pemerintah pusat.

“Sebaran yang merata ke setiap



Anggota DPR RI Ferry Kase menemui masyarakat di desa Oeolo dan Oelneke, NTT

daerah juga harus diimbangi dengan kesejahteraan guru. Jika belum bisa diimbangi maka hal ini menjadi persoalan,” ujar politisi F-Hanura itu.

■ (hs)

NURDIN TAMPUBOLON HADIRI FAMILY FUN WALK USU



Anggota DPR RI Nurdin Tampubolon menghadiri Family Fun Walk yang diadakan oleh IKA USU

Anggota Komisi I Nurdin Tampubolon menghadiri Family Fun Walk yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA

USU) pada Minggu (20/08/2017). Kegiatan ini adalah rangkaian untuk meningkatkan persaudaraan diantara alumni USU.

Sebagai legislator, dirinya

berupaya untuk semaksimal mungkin untuk dekat dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya kebersamaan ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

“Saya merasa bangga melihat antusias para alumnus yang ikut hadir acara fun walk ini dan semoga kebersamaan para alumnus ini terus terjalin dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, bangsa dan negara,” ujar Nurdin.

Diketahui, Nurdin Tampubolon adalah Anggota DPR yang merupakan alumni Fakultas Teknik di Universitas Sumatera Utara tahun 1981. Sepanjang perjalanan hidupnya ia selalu berupaya dekat dengan banyak masyarakat. ■ (hs)

KECERIAAN LOMBA MEWARNAI GAMBAR

Berbondong-bondong para orangtua menuntun putra putrinya ke Gedung Nusantara III Komplek Parlemen. Di lobi sudah berkumpul anak-anak usia TK hingga SD. Duduk-duduk di lobi Nusantara III, wajah anak-anak itu sangat ceria sambil bercengkrama dengan orangtuanya.

Hari itu, Korpri Setjen DPR RI menggelar lomba mewarnai dan menggambar. Ramai penuh tawa dan canda, anak-anak yang menjadi peserta lomba begitu antusias mengikutinya. Gedung DPR RI jadi objek gambar dan mewarnai dalam lomba tersebut. Lomba yang digelar akhir Agustus lalu itu, menghadirkan tiga kelompok peserta. Kelompok A adalah peserta usia TK. Kelompok B usia kelas I hingga III SD. Sementara kelompok C usia kelas IV hingga VI SD.

Anak-anak itu sudah siap dengan pensil warna warni dan perlengkapan menggambar lainnya. Para orangtua juga sibuk mengarahkan anak-anaknya, agar mampu sebaik mungkin mengikuti lomba. Kelompok A dan B mengikuti lomba mewarnai gambar Gedung DPR RI. Sementara Kelompok C menggambar Gedung DPR RI.

Perhelatan lomba ini merupakan rangkaian kemeriahan menyambut HUT Kemerdekaan RI sekaligus HUT DPR RI ke-72 tahun. Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk membuka acara ini. Dalam sambutannya, ia mengatakan, ini adalah kegiatan rutin di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR setiap kali menyambut kemerdekaan dan ulang tahun DPR.

Dengan menggelar lomba menggambar dan mewarnai, ada semangat perjuangan yang coba ingin diwarisi sejak dini kepada anak-anak. “Dengan melukis gedung DPR, nanti anak-anak akan bertanya, ada apa di dalam gedung tersebut. Suatu saat nanti tidak hanya tahu, tapi mungkin ada yang akan menjadi anggota atau pegawai

DPR RI,” ujarnya usai membuka acara.

Johnson juga mengemukakan, lewat lomba sederhana dan digemari anak-anak ini, ada pemahaman yang ingin disampaikan kepada anak-anak, yaitu pentingnya sejarah. Lewat lomba menggambar, pesan untuk memahami sejarah bangsanya tersampaikan dengan baik. Kelak, anak-anak mungkin akan mempelajari momentum 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan dan juga gedung parlemen ini yang sarat dengan nilai-nilai sejarah.

Peserta lomba yang hampir mencapai 500 anak ini menyajikan beragam hadiah. Ada sepeda, piala, piagam, hingga tabungan bagi para pemenang. Anak-anak tentu menyambutnya dengan gembira. Mereka tak terlihat tegang atau takut. Justru anak-anak yang menjadi peserta tetap tenang seperti menikmati lomba ini.

Jelang pukul 12 siang, satu per satu peserta menyudahi tugasnya. Mereka bergegas menyerahkan hasil karyanya

itu kepada panitia lomba. Warna warni gambar hasil karya anak-anak ini sangat unik dan menarik. Para orangtuanya juga terlihat bangga dengan hasil karya putra putrinya itu. Lomba ini selain menyimpan pesan edukasi juga menjadi wahana rekreasi dan interaksi sosial bagi peserta dari seluruh wilayah Jabodetabek.

Johnson berharap, tahun depan Setjen DPR bisa lebih banyak lagi menggelar lomba agar semakin semarak. Beragam lomba bisa jadi pilihan untuk menyemarakkan HUT RI dan DPR tahun depan. Gedung DPR ini perlu didatangi rakyat banyak untuk berbagi suka cita sekaligus juga informasi.

Memasuki tengah hari, lobi Nusantara III sudah sepi. Peserta lomba sudah meninggalkan DPR. Senang dan bangga disampaikan para orangtua yang seharian mendampingi putra putrinya. Souvenir pun dibagikan kepada para peserta sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. ■ (mb)



Suasana lomba mewarnai dan menggambar di Lobby Nusantara III DPR RI



Puluhan peserta lomba panjat bambu betung berkumpul di lapangan golf, kompleks parlemen

MENGGAPAI MERAH PUTIH DI PUNCAK BAMBU

Puluhan pria sudah berkumpul di lapangan golf, kompleks parlemen. Wajahnya sumringah penuh kegembiraan. Mereka berdendang dan berjoget bersama. Canda tawa mewarnai pagi yang cerah. Ada pesta rakyat yang mengundang perhatian semua pegawai dan masyarakat sekitar.

Matahari bersinar terang pagi itu. Kursi-kursi tamu sudah berjejer rapi di bawah tenda. Di hadapan tenda sudah berdiri 72 bambu betung yang dicat hitam. Di puncak bambu itu ada bendera merah putih kecil berkibar. Tergantung pula beragam hadiah menarik. Inilah lomba panjat bambu betung yang dihelat untuk memeriahkan HUT RI ke-72 tahun.

Jumat pagi, sehari setelah upacara kemerdekaan dihelat, kompleks parlemen tak kalah meriahnya. Peserta maupun penonton sudah berkerumun di lokasi lomba panjat bambu betung. Bertelanjang dada, para peserta itu dihibur dahulu dengan lagu-lagu patriotik untuk memacu semangat. Bahkan, sebelumnya sudah melakukan pemanasan dengan bersenam ria.

Kegembiraan tumpah ruah hari itu.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menginisiasi lomba ini, hadir membuka acara. Sekjen DPR Ahmad Djuned dan Kepala BKD DPR Jonhson Rajagukguk juga ikut hadir menyaksikan kemeriahan acara. Fadli menuturkan, bila dahulu yang digunakan pohon pinang, kini batang bambu yang digunakan. Keberadaan pohon pinang sudah langka.



foto: Enofin

Suasana kemeriahan lomba panjat bambu betung

Pinang juga butuh waktu lama untuk tumbuh. Jenis pohon ini justru harus dikonservasi untuk menjaga kelestariannya.

“Pohon pinang untuk bisa tumbuh setinggi satu meter memerlukan waktu tiga tahun. Sedangkan bambu betung relatif lebih cepat tumbuh,” jelas Fadli. Rumpun bambu ini hampir di setiap daerah selalu ada dan mudah ditemukan. Akhirnya,

bambulah yang digunakan pada kemeriahan Pesta Rakyat di kompleks parlemen. Warga dari Jabodetabek ramai-ramai menjadi peserta panjat bambu yang sudah digelar tiga kali di DPR.

Dasar bambu sudah disiram air sebelum dipanjat. Bahkan, batangnya dilumuri minyak. Tentu saja ini semakin membuat licin bambu saat dipanjat. Para peserta harus berjuang

Rumpun bambu ini hampir di setiap daerah selalu ada dan mudah ditemukan. Akhirnya, bambulah yang digunakan pada kemeriahan Pesta Rakyat di kompleks parlemen. Warga dari Jabodetabek ramai-ramai menjadi peserta panjat bambu yang sudah digelar tiga kali di DPR.

ekstra keras memanjatnya. Hitungan mundur pun dimulai. Tiga, dua, satu....

Para peserta lomba berlarian ke arah bambu. Satu batang bambu dipanjat oleh empat orang. Pada 10 menit pertama, hanya tiga orang yang boleh memanjat. Setelah itu, satu orang lagi menyusul, menaklukkan bambu yang licin itu. Jadi ada 72 grup pemanjat untuk 72 bambu yang berarti ada 288 orang peserta. Tawa penonton tumpah menyaksikan perjuangan para pemanjat.

Jatuh bangun jadi perjuangan tersendiri menuju puncak bambu. Strategi para pemanjat biasanya menempatkan satu orang di bawah sambil memeluk erat bambu. Ini juga sebagai tangga hidup bagi temannya yang ingin memanjat di atasnya. Dengan menginjak pundak temannya, orang kedua naik sambil memeluk erat bambu agar tak terjatuh. Teman ketiga dan keempat

begitu pula manaiki tubuh temannya sebagai tangga.

Yang lucu, ada peserta yang menginjak kepala temannya untuk meraih hadiah yang tergantung di puncak bambu. Dasar bambu yang berlumpur dan basah, membuat kaki para peserta penuh lumpur. Bambu pun tak mudah ditaklukkan. Melorot, lalu jatuh ramai-ramai ke dasar bambu. Butuh kesabaran dan kegigihan menaklukkan bambu betung yang satu ini.

Tepuk tangan dan teriakan penonton memantik semangat para peserta. Berkali-kali jatuh tak menyurutkan semangat para peserta. Jatuh bangun sama-sama. Saling menguatkan terus dilakukan untuk merebut merah putih di puncaknya. Panitia sudah menyediakan sepeda motor bagi peserta yang mampu mengambil bendera dan langsung memberikannya ke panitia. Yang

di balik lomba panjat bambu ini ada filosofi yang tak bisa dilupakan, yaitu gotong royong yang menjadi tradisi sekaligus kultur bangsa Indonesia. Kesulitan yang dihadapi bisa lebih ringan dengan bergotong royong. Inilah yang tersirat dari lomba panjat bambu betung.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Sekjen dan Kepala BKD menyaksikan lomba panjat bambu betung

paling cepat memberikan bendera, itulah yang berhak mendapatkan sepeda motor.

Akhirnya, satu orang peserta berhasil menggapai bendera merah putih dan langsung turun, seraya berlari memberinya kepada panitia. Fadli Zon pun memberi hadiah istimewa ini bagi satu kelompok peserta. Tepuk tangan riuh para penonton menyambut peraih sepeda motor. Sementara peserta lainnya masih terus berjibaku dengan bambu yang licin untuk mengambil hadiah yang tergantung.

Sekjen DPR Achmad Djuned mengemukakan, di balik lomba panjat bambu ini ada filosofi yang tak bisa dilupakan, yaitu gotong royong yang menjadi tradisi sekaligus kultur bangsa Indonesia. Kesulitan yang dihadapi bisa lebih ringan dengan bergotong royong. Inilah yang tersirat dari lomba panjat bambu betung.

“Ini merupakan tradisi bangsa Indonesia bahwa kita adalah masyarakat yang mengindahkan gotong royong,” ungkapnya.

Kedua, lanjut dia, bambu betungnya dilumuri minyak, sehingga untuk memperebutkan hadiah memerlukan sebuah perjuangan keras. “Jadi, hadiah yang tergantung di atas adalah apa yang dicita-citakan bagi peserta. Dalam memperoleh cita-cita membutuhkan kerja keras, kerja sama, dan kerja cerdas,” tandasnya lagi.

Disampaikan Djuned, Pesta Rakyat ini sekaligus ingin menyatukan rakyat dengan lembaga DPR. Lewat acara ini, masyarakat berbondong-bondong datang ke kompleks parlemen dengan suka cita. DPR sendiri menggelar berbagai lomba dan pameran untuk memperingati HUT Kemerdekaan sekaligus HUT DPR RI yang jatuh pada 29 Agustus. Sepanjang Agustus lalu, selain panjat bambu, ada lomba mewarnai gambar bagi anak-anak dan pameran foto Warna Warni DPR. Hanya saja yang paling menyita perhatian masyarakat adalah panjat bambu. ■ (mh)



Gedung Parlemen Selandia Baru di Wellington

www.espedia.or.id

MENGENAL SISTEM PEMILU SELANDIA BARU

Selandia Baru adalah negara demokratis yang mana Anggota Parlemennya (Member of Parliament) dipilih dalam pemilihan yang bebas dan adil. Sebagai salah satu negara maju persemakmuran Inggris yang terletak di selatan Samudera Pasifik. Dengan populasi hanya empat juta orang, negara yang berbentuk pemerintahan Monarki Konstitusional ini termasuk negara dengan jumlah penduduk kecil.

Setelah kedaulatan Inggris di wilayah ini berakhir pada tahun 1841, Selandia Baru atau New Zealand secara resmi memisahkan diri dari pemerintahan Inggris di Australia dan mendeklarasikan dirinya sebagai negara bagian tersendiri. Kendati demikian, Selandia Baru hingga kini masih mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya yang diwakili Gubernur Jenderal bertugas memberi pertimbangan kepada Perdana Menteri.

Lazimnya negara - negara Persemakmuran Britania Raya

(Commonwealth Realms), pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh Perdana Menteri yang dipilih Parlemen. Parlemen memiliki andil yang sangat besar dalam mengangkat seorang Perdana Menteri atau sebaliknya, mampu menggulingkan pemerintahan.

Sistem legislatif dari Parlemen Selandia Baru berbentuk unikameral dalam *House of Representative*. HoR terdiri dari 120 anggota parlemen dengan 4 kursi istimewa untuk perwakilan Maori (penduduk asli Selandia Baru). Anggota Parlemen

dipilih dengan menggunakan sistem tata cara pemilihan umum *Mixed Member Proportional* (MMP) atau varian proporsional campuran seperti yang diterapkan di Jerman, Meksiko dan Venezuela.

Dalam sistem MMP, proporsi suara partai politik akan mencerminkan jumlah kursi yang ada di parlemen. Sebagian calon wakil rakyat dipilih secara pluralitas, dan sebagian caleg lainnya dipilih secara proporsional daftar tertutup. Pemilihan legislatif dilakukan setiap tiga tahun.

Registrasi calon pemilih

bersifat wajib di Selandia Baru, tapi partisipasinya dalam pemilihan merupakan sukarela atau tidak diwajibkan. Pemilih yang diperbolehkan adalah yang berusia minimal 18 tahun, warga negara atau penduduk tetap yang telah tinggal selama 1 tahun, dan penduduk dari distrik pemilihan yang telah tinggal setidaknya satu bulan.

Setiap pemilih mendapat dua hak suara, yakni pemilihan perwakilan distrik dan yang lainnya untuk partai politik. Pemungutan suara pertama adalah untuk memilih partai politik yang akan menentukan jumlah kursi di parlemen atau biasa disebut pemilihan partai.

Pemungutan suara kedua adalah memilih Member Parliament (MP), voters memilih MP yang mereka inginkan untuk mewakili district atau daerah pemilihan. Ini disebut pemungutan suara pemilih (electorated seats). Kandidat yang mendapat suara terbanyak akan mendapatkan kursi dan tidak harus memperoleh lebih dari setengah suara.

Dua partai politik terbesar adalah Partai Nasional dan Partai Buruh. Kedua partai ini secara tradisi mendominasi perpolitikan Selandia Baru, masing-masing bersaing untuk mengendalikan legislatif. Sebelumnya, sistem pemilu Selandia Baru menggunakan sistem First Past the Post. Namun, sistem ini dirasa tidak efektif karena membatasi jumlah partai kecil dan menjadi ladang monopoli partai besar.

Demi mengurangi pengaruh sistem dua partai ini, pemerintah Selandia Baru kemudian mengadakan referendum untuk menerapkan sistem MMP. Sistem MMP membantu partai-partai kecil memenangkan lebih banyak kursi legislatif, yang kemudian mengurangi kecenderungan kekuasaan partai

tunggal. Partai-partai yang lebih kecil lebih sering masuk kedalam ajang koalisi dengan Partai Buruh dan Partai Nasional, yang kemudian berlanjut menjadi partai yang paling berpengaruh. Partai-partai penting lainnya adalah New Zealand First, ACT New Zealand, United Future, dan Green Party.

Sementara, untuk mendapatkan kursi di parlemen, sebuah partai politik harus memperoleh 5% suara dari suara nasional dalam pemilu legislatif atau setidaknya memenangkan 1 kursi dalam pemungutan suara pemilih. Sedangkan, untuk jumlah kursi di parlemen akan disesuaikan dengan perolehan suara partai.

Misalnya, sebuah partai politik mendapat 30% suara dalam pemilihan partai, maka partai tersebut akan memperoleh sekitar 36 MPs di Parlemen (30 persen dari 120 kursi). Artinya, jika partai tersebut memenangkan 20 kursi pemilih, maka akan ada 16 MPs tambahan diluar 20 anggota parlemen terpilih.

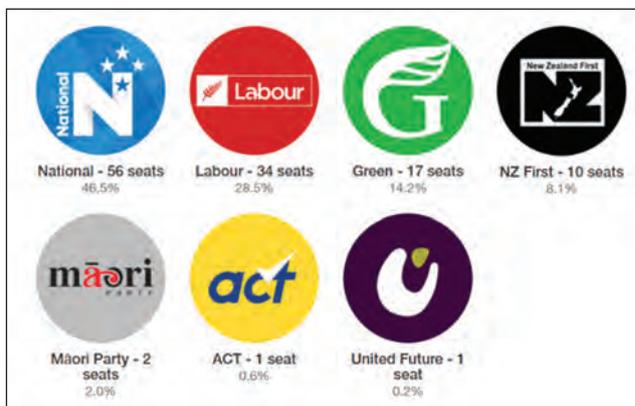
Sebaliknya, jika sebuah parpol mendapatkan perolehan suara diatas 5%, tetapi tidak memenangkan pemungutan suara terpilih (electorated seats), maka parpol tersebut masih berhak mendapatkan alokasi kursi di parlemen, namun calon legislatifnya akan dipilih dari proportional party list atau secara proportional tertutup.

Sebagai contoh, partai A memperoleh 10 persen suara nasional, maka ia berhak menempatkan 12 MPs di Parlemen (10 persen dari 120) yang akan dipilih berdasarkan ranking di daftar partai.

Demi mengurangi pengaruh sistem dua partai ini, pemerintah Selandia Baru kemudian mengadakan referendum untuk menerapkan sistem MMP. Sistem MMP membantu partai-partai kecil memenangkan lebih banyak kursi legislatif, yang kemudian mengurangi kecenderungan kekuasaan partai tunggal

Selanjutnya, usai pemilu legislatif biasanya dibentuk kesepakatan atau koalisi antarpartai politik untuk membentuk suatu pemerintahan.

■ (ann)



Jajak pendapat perkiraan hasil pemilu Selandia Baru 2017 yang dirilis pada bulan April 2017

Mulutku Sehat Tubuhku Kuat

Problematika kesehatan gigi dan rongga mulut banyak sekali ragamnya. Di sini akan dibahas tiga problematika terpenting dan tersering dijumpai di dalam keseharian, yakni sariawan, napas berbau, dan karang gigi.

Sariawan

Sariawan merupakan gangguan respon imun yang dimediasi oleh sel dimana sel-sel T dan *tumor necrosis factor* (TNF)-alfa terlibat. TNF- α merupakan sitokin proinflamasi yang merekrut sel-sel T dan leukosit-leukosit lainnya ke lesi, menciptakan papul (terasa sangat menyakitkan), lalu kemudian mengalami ulserasi sebelum menyembuh. Faktor predisposisi mencakup trauma lokal, stres, makanan tertentu, fluktuasi hormon yang terkait dengan siklus menstruasi, dan merokok tembakau. Pasta gigi yang mengandung sodium lauryl sulfat juga memicu sariawan pada individu tertentu. Selain itu, kekurangan zat besi, asam folat atau vitamin B12 telah berkorelasi dengan munculnya sariawan.

Beberapapilihan/kombinasi terapi yang umumnya direkomendasikan oleh dokter keluarga atau dokter gigi

antara lain: amlexanox 5% paste, dexamethasone 0,1% ointment, silver nitrate cautery, montelukast atau prednison sistemik, suplementasi vitamin B12, asam lemak omega-3. Beberapa terapi seperti: thalidomide, dapsone, levamisole, pentoxifylline, atau colchicine terbukti efektif mengatasi sariawan, namun mengingat efek samping, maka tidak lagi direkomendasikan.

Apa saja terapi topikal yang tersedia dan kapan obat-obat itu dapat digunakan? Setiap kali obat diperlukan, karena kejadian terus-menerus dan rasa sakit telah memengaruhi kualitas hidup seseorang, pilihan pertama adalah pengobatan topikal. Jika penderita mengalami manifestasi prodromic (gejala awal) dari penyakit, agen anti-inflamasi seperti amlexanox 5%, atau kortikosteroid topikal seperti triamcinolone acetone 0,1%, secara khusus diindikasikan untuk mencegah pembentukan lesi. Dalam kasus sariawan sudah terjadi, obat tersebut dapat digunakan untuk mengurangi peradangan, meskipun dalam kombinasi dengan antiseptik seperti chlorhexidine dan triclosan, antibiotik seperti tetrasiklin, asam hyaluronic atau minyak rambut (pomades) mengandung zat alami seperti myrtle atau quercetin, dimaksudkan untuk mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan ulkus.

Apa saja terapi sistemik yang tersedia dan kapan dapat dipergunakan? Terapi sistemik diindikasikan ketika wabah berlangsung secara konstan dan agresif, sariawan terasa sangat sakit dan berkelanjutan, dan terapi topikal tidak dapat meredakan gejala. Terapi berbeda dapat digunakan untuk mengendalikan gejala, seperti colchicine 1,5 mg / hari, dapson 50 mg / hari, klofazimin 100 mg / hari atau pentoxifylline 400 mg tiga kali sehari, meskipun penatalaksanaan yang terbanyak digunakan terdiri dari kortikosteroid sistemik seperti prednison 25 mg / hari dan modulator imun seperti thalidomide 50-100 mg / hari, mampu remisi lengkap atau hampir lengkap, Meskipun demikian, kemungkinan efek samping harus benar-benar dipertimbangkan.

Napas Berbau

Napas berbau (halitosis) boleh jadi petunjuk atau indikator gangguan kesehatan, seperti: infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia atau bronkitis, infeksi sinus kronis, diabetes, gangguan ginjal atau hati, refluks asam kronis, dan sebagainya. Halitosis juga merupakan pertanda penyakit periodontal (gum, gusi), yang disebabkan oleh plak di gigi. Bakteri menyebabkan pembentukan toksin, yang mengiritasi gusi. Bila penyakit gusi dibiarkan begitu saja tanpa diobati, maka gusi dan tulang rahang menjadi rusak. Penyebab



Sumber: www.fitnessformen.co.id

halitosis lain adalah kurangnya perawatan gigi yang paripurna, infeksi jamur di mulut, dan karies (lubang) di gigi. Bibir kering (xerostomia) juga menyebabkan halitosis. Saliva (air liur, ludah) diperlukan untuk melembabkan mulut, menetralkan asam yang dihasilkan oleh plak, dan membasuh sel-sel mati yang terakumulasi di lidah, gusi, dan pipi. Jika tidak diangkat, maka sel-sel ini membusuk dan menyebabkan bau mulut. Mulut kering dapat merupakan efek samping terapi, problematika kelenjar ludah, atau pernapasan terus-menerus melalui mulut.

Bau mulut dapat dikurangi, bahkan dicegah dengan cara: menerapkan higiene oral yang baik. Caranya dengan menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi mengandung *fluoride* untuk menghilangkan sisa makanan dan plak. Lakukan menyikat gigi 15 menit setelah makan (simpanlah sikat gigi di tempat kerja atau sekolah untuk dipakai usai makan siang). Lakukan pula sikat lidah. Gantilah sikat gigi Anda setiap 2-3 bulan. Gunakan benang gigi untuk menghilangkan partikel makanan dan plak di sela-sela gigi sekali sehari. Bilas dengan obat kumur antibakteri dua kali sehari. Gigi palsu sebaiknya dilepas pada malam hari, dibersihkan, lalu dipakai lagi keesokan harinya.

partikel makanan dan bakteri. Pilihlah permen karet dan mint yang mengandung xylitol. Di dunia medis, xylitol dipakai untuk mencegah pembusukan gigi dan bibir kering, mencegah infeksi telinga tengah (otitis media) pada anak-anak, pengganti gula bagi penderita diabetes. Obat kumur antiseptik dapat membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut. Berkonsultasilah ke dokter gigi untuk menentukan produk terbaik.



Karang Gigi

Karang gigi bermula dari plak gigi yang tidak segera dibersihkan, sehingga mengeras, dan menumpuk secara bertahap. Karang gigi mengganggu proses menyikat gigi dan membersihkan gigi dengan benang (dental flossing), karena enamel gigi rentan pecah akibat asam yang diproduksi bakteri di rongga mulut. Akibatnya, gigi mudah berlubang atau menjadi rusak. Efek lain karang gigi adalah halitosis, gusi bengkak, radang gusi (gingivitis), gigi goyang dan mudah tanggal akibat menurunnya gusi, dan periodontitis (kantong nanah yang muncul di antara gigi dan gusi), gusi berdarah terutama saat menyikat gigi. Karang gigi melekat erat dengan gigi, dapat dibersihkan dengan *scaller* atau alat ekstraktor oleh dokter gigi. Mula-mula karang gigi berwarna kuning, lambat laun berubah menjadi coklat atau kehitaman sesuai kebiasaan (konsumsi kopi atau merokok). Efek berbahaya karang gigi terkait dengan stroke dan penyakit jantung. Penyebabnya belum diketahui pasti, namun diduga karena mikroorganisme (termasuk bakteri) di plak gigi memasuki aliran

darah. Oleh mekanisme tertentu, arteri tersumbat sehingga terjadilah stroke dan penyakit jantung.

Salah satu upaya mencegah karang gigi adalah dengan meminum banyak air bening usai makan. Air bening akan membersihkan sisa-sisa makanan dan mencegah penimbunan plak. Usaha lain juga dapat dilakukan. Sikatlah gigi 2x sehari minimal selama 2 menit untuk mencegah munculnya karang gigi. Pakailah pasta gigi yang mengandung fluoride (pencegah plak berkembang menjadi karang gigi) dan triclosan (antibakteri). Batasi konsumsi makanan manis dan terlalu asam. Hindari asap rokok. Bila Anda perokok, segeralah hentikan kebiasaan itu. Kesehatan mulut dan gigi perlu diperhatikan dan penting dijaga dengan seksama. Meskipun terlihat sepele, namun problematika mulut dan gigi amat terkait erat dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan mulutku sehat, tubuhku kuat. ■ (Dito Anurogo)



Kunjungi dokter gigi Anda setidaknya dua kali dalam satu tahun. Berhentilah merokok, sebagai gantinya, kunyahlah produk berbasis tembakau. Minumlah banyak air bening untuk melembabkan bibir. Kunyahlah permen karet (tanpa gula) atau hisaplah permen (tanpa gula) untuk menstimulasi produksi saliva yang membantu membersihkan

karang gigi berwarna kuning, lambat laun berubah menjadi coklat atau kehitaman sesuai kebiasaan (konsumsi kopi atau merokok). Efek berbahaya karang gigi terkait dengan stroke dan penyakit jantung. Penyebabnya belum diketahui pasti, namun diduga karena mikroorganisme (termasuk bakteri) di plak gigi memasuki aliran

Dito Anurogo, dokter digital/online di detik.com, penulis lebih dari 18 buku dan 333 karya tulis terpublikasi, CEO/Pendiri Sahabat Literasi Indonesia, gelar MSc diperoleh Oktober 2017 dari S-2 IKD Biomedis FK UGM Yogyakarta, email: ditoanurogo@gmail.com

Menikmati Eksotisnya Labuan Bajo

KUNJUNGI KOMODO BERLANJUT KE KANAWA

Foto: Eka/Inf

Indonesia surganya pulau-pulau nan eksotis. Terutama di wilayah Timur. Salah satunya, Labuan Bajo, Flores, NTT. Alamnya luar biasa cantik. Penduduknya amat ramah. Bersiaplah mendapatkan memori perjalanan yang sempurna.

Jelang mendarat di Bandar Udara Komodo, dari jendela pesawat sudah terlihat gugusan pulau nan hijau yang dikelilingi birunya laut. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera menjejakkan kaki di sana. Akhirnya sampai juga di pintu masuk menuju Labuan Bajo dan pulau-pulau cantik di sekitarnya yang sudah tersohor di kalangan traveler mancanegara itu.

Untuk menuju ke Labuan Bajo, bisa ditempuh melalui penerbangan direct dari Jakarta. Atau, transit Denpasar yang pilihan skedulnya lebih banyak. Waktu saya mendarat, hari sudah sore. Setelah beristirahat sejenak di penginapan, saya bergegas menuju Paradise Bar.

Venue tersebut letaknya di atas tebing dengan view langsung ke lautan.

Tempat ini sering disebut sebagai the best spot untuk menikmati sunset di Labuan Bajo. Duduk menikmati semilir angin sambil memandang Pulau Bajo, Pulau Rinca, Pulau Kelor, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Tak lama kemudian, senja pun datang. Matahari beranjak terbenam, menyemburkan kemilau jingga di lautan. Menghadirkan perasaan syahdu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Entah berapa lama saya tertegun menikmati lukisan alam itu sampai disapa pramusaji yang mengantarkan pesanan makan malam.

Puas mengisi perut, saatnya kembali ke penginapan untuk beristirahat, merechargetenaga. Keesokan paginya, petualangan dimulai. Pukul 07.30, pemandu sudah menjemput. Agenda

hari itu, mengunjungi komodo di Pulau Rinca lalu menikmati cantiknya Pulau Kanawa yang dijuluki "surga tersembunyi" di Nusa Tenggara Timur.

Perjalanan menuju Pulau Rinca ditempuh selama sekitar 2 jam dengan kapal. Satu kapal bisa memuat hingga 15 orang. Saya satu kapal dengan beberapa wisatawan domestik dan beberapa turis dari Thailand serta Singapura. Di tengah perjalanan, kami bertemu kapal lain yang memuat turis Eropa.

Perjalanan dua jam itu tidak terasa lama. Kita bisa memilih duduk di dek ditemani semilir angin. Atau, naik ke bagian atas sembari tiduran memandang birunya langit.

Makin dekat ke Pulau Rinca, guide kami menyampaikan beberapa informasi dan warning. Pulau Rinca merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo yang menjadi habitat si "naga purba". "Komodo adalah binatang buas. Jangan sampai terpisah dari rombongan, jangan jauh-

jauh dari ranger,” pesannya. Dan, masih ada sederet warning lainnya yang bikin kami deg-degan, tapi juga tidak sabar.

Di dermaga, kami dijemput beberapa orang ranger. Gapura bertuliskan Selamat Datang di Taman Nasional Komodo Loh Buaya Pulau Rinca yang diapit dua patung komodo dalam ukuran aslinya, menyambut kami. Setiap wisatawan yang berkunjung wajib melapor kepada petugas dan membayar tiket masuk.

Selanjutnya, dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok yang terdiri atas 10-12 orang didampingi dua orang ranger. Ranger kembali mengingatkan beberapa aturan kepada pengunjung. Di antaranya, berjalan dengan tenang, tidak boleh terpisah dari rombongan, tidak boleh membuat gerakan cepat yang membuat komodo menyergap.

Warning itu sukses membuat detak jantung makin cepat. Baru berjalan sekitar 150 meter, ranger menunjuk ke arah bawah rumah panggung. Wow! Ada beberapa komodo sedang ngumpul. Sepertinya mereka sedang arisan. Hahaha.

Antara penasaran ingin melihat dari dekat, tapi juga takut-takut. Tak sedikit anggota rombongan yang berfoto dekat komodo. Tentu, dengan pengawasan ranger. Akhirnya saya memberanikan diri. Berada di jarak sekitar 2 meter dari komodo sensasinya benar-benar...

harus dirasakan sendiri sih. Hehehe.

Setelah puas mengamati si naga purba yang sebelumnya hanya dilihat di buku, kami melanjutkan perjalanan. Karena hanya punya waktu sekitar satu setengah jam trekking di Pulau Rinca, kami mengambil track yang paling pendek. Jalurnya cukup terjal ditambah matahari yang terasa menyengat di kulit. Tapi, begitu naik ke perbukitan, pemandangan dari atas memang worth it. Sangat fotogenik.

Turun menyusuri bukit, kami kembali melewati rumah panggung yang jadi ”basecamp”nya komodo-komodo. Kalau tidak jeli, bisa-bisa tidak melihat si komodo sudah di sebelah. Karena warna kulit mereka seolah menyatu dengan tanah dan kayu. Itulah kenapa harus selalu didampingi ranger yang sudah mengenal betul karakter dan kebiasaan komodo.

Setelah menguji adrenalin dengan trekking di habitat komodo, kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Kanawa. Spot yang tepat untuk ”cooling down” setelah dibikin deg-degan oleh para komodo.

Dari dermaga Pulau Kanawa, sejauh mata memandang, air laut dengan warna biru kehijauan yang bening berpadu dengan pasir putih. Dibingkai oleh langit nan biru dan hijaunya pepohonan. Benar-benar lukisan alam yang amat menawan.



foto: Hendra/ib

Yang bikin makin sempurna, pulau cantik ini belum banyak dikunjungi orang. Siang itu, selain rombongan kami, hanya ada sekitar sepuluh pengunjung lain yang semuanya turis asing. Ada yang dari Italia serta Kanada. Kebanyakan dari mereka datang ke Labuan Bajo karena ingin melihat komodo langsung di habitat aslinya sekaligus menikmati suasana pulau yang masih sepi. Serasa di pulau pribadi.

Wisatawan bisa menyewa peralatan snorkeling, berenang, atau berjemur di tepi pantai. Duduk santai menikmati semilir angin, kaki menginjak pasir, atau melakukan yoga dengan suasana yang berbeda, juga bisa.

Tak berlebihan pujian yang banyak disematkan untuk Pulau Kanawa. Pulaunya memang amat cantik, pantainya sangat jernih, dan warna airnya turquoise.

Namun, matahari mulai beranjak ke barat. Saatnya berpisah dengan Pulau Kanawa dan kembali ke Labuan Bajo. Rasanya kaki berat melangkah ke kapal. Separuh hati tertinggal di sana, namun memorinya terbawa dalam hati dan ingatan. Suatu hari nanti, saya akan kembali ke tempat ini. Ingin menjajal live on board, menginap di kapal. Apalagi, masih banyak pulau-pulau di sekitarnya yang belum dikunjungi. ■

Ditulis oleh:
Hendra
Jurnalis Foto Jawa Pos

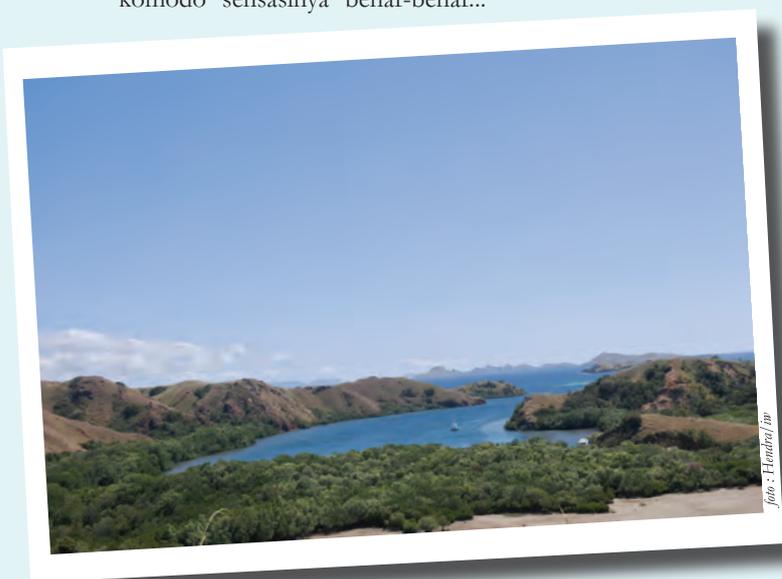


foto: Hendra/ib

MENIKMATI KICAUAN PERKUTUT DAN MEMBERI PAKAN KOI DAN ARWANA

Jika group band Rock Seurieus yang digawangi vokalis berambut keriting Candil mengatakan “Rocker juga manusia”, begitupun halnya dengan Anggota Komisi IV DPR RI, Endro Hermono yang juga mengaku memiliki hobi seperti insan lainnya. Apa Hobinya? Berikut penelusuran Rahayu Setiowati dan Kresno D. Moemponi dari Parleментарia.

Ya, dibalik sederet aktivitasnya sebagai wakil rakyat Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini setiap paginya selalu menyempatkan diri menjalani serangkaian hobi lamanya, mulai dari memberi makan Ikan Koi, Arwana dan berternak burung perkutut.

Pagi hari, ketika sang fajar perlahan mulai menampakkan dirinya, setelah menjalani sholat shubuh, hal yang pertama

perkutut, salah satunya Pakubuwono cup. Tidak hanya itu, Endro juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum P3SI (Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia) sejak tahun 2001 hingga tahun 2012 silam.

Sayangnya, beberapa tahun setelah itu perkutut kesayangannya yang diberinama Kilimanjaro itu meninggal, ia pun memilih untuk menghentikan sejenak hobinya memelihara sekaligus berternak perkutut. Sebagai perkutut yang ada ia jual kepada koleganya, dan sebagian lagi ia hibahkan kepada sanak kerabatnya.

“Ketika tidak ada perkutu sama sekali di rumah memang terasa sepi sekali, apalagi itu hobi yang sudah menyatu dalam kehidupan saya hingga bertahun-tahun. Untungnya, saat itu saya juga disibukkan dengan kegiatan lain,”aku Endro.

Meski kini kembali ke hobi lamanya memelihara sepuluh ekor perkutut, namun Pria kelahiran Blitar, 10 Oktober 1958 ini pun beralih ke hewan ternak lainnya, yakni Ikan Koi. Hal itu mengingat kota kelahirannya, Blitar terkenal sebagai penghasil bibit unggul Ikan Koi. Lho Ikan Koi kan aslinya dari Jepang? Iya, ikan Koi memang berasal dari Jepang. Namun, konon para pecinta dan peternak Koi banyak berasal dari Blitar. Mereka berusaha mengawinkan dua Koi terbaik sehingga menghasilkan Koi dengan bibit unggul. Sementara, pecinta Koi dari daerah lain terkadang

untuk mendapatkan Koi bibit unggul mengawinkannya dengan jenis ikan lain, seperti ikan Mas. Sejatinya hal itu malah mengurangi keaslian dari Ikan Koi itu sendiri.

Jika burung perkutut ia nikmati lewat suaranya yang merdu dan berirama, khusus untuk hobi barunya, memelihara ikan Koi ini, Endro mengaku ada kenikmatan sendiri ketika memberi makan dan melihat gerak Koi dengan gesit. Ya, Endro sengaja memberi makan sendiri Ikan Koi setiap paginya. Ia sengaja meletakkan telapak tangannya yang sudah berisi Pelet (pakan ikan-red) di atas permukaan air. Seketika itu juga puluhan Koi tersebut berebut untuk memakannya. Saat itu diakui Endro, tidak hanya Koi saja yang senang mendapat makan. Saat-saat itulah Endro merasakan sebuah kebahagiaan, kenikmatan dan ketentraman tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

“Kalau yang kasih makan orang lain, kenikmatannya dimana? Pelihara ikan itu kenikmatannya adalah ketika kita memberi makan ikan dengan tangan kita sendiri. Sama seperti Koi, saya juga memiliki beberapa ikan arwana, namun tentu cara memberi makan Ikan Koi dengan arwana berbeda. Kalau Arwana, kita hanya menggantungkan makanannya di atas permukaan air, secepat kilat Arwana langsung menyambarnya. Saat-saat itulah menjadi kenikmatan tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata,” jelas Endro. ■ (Ayu)



Foto: duk.prfi.in

Anggota Komisi IV DPR RI, Endro Hermono

dilakukannya adalah memandangi dan mendengarkan kicauan beberapa perkututnya yang saling bersahutan seolah berlomba “unjuk gigi” memperdengarkan suaranya di hadapan sang tuan.

Dikatakan Endro, begitu mantan wakil bupati Blitar ini biasa disapa, saat ini ia hanya memiliki sepuluh ekor burung perkutut, padahal sebelumnya ia memiliki 56 ekor perkutut. Bahkan, beberapa perkututnya sempat menyanggah gelar juara nasional dari berbagai kompetisi

BISIKAN HALUS LEBIH MUJARAB KETIMBANG TERIAK

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Noor Achmad ke IAIN Palu Provinsi Sulawesi Tengah dalam reses masa persidangan V tahun 2016/2017 belum lama ini mendapat sambutan yang “menghibur”. Dalam kunjungan ke kampus yang digawangi Rektor Zainal Abidin banyak ungkapan dengan kalimat bernada guyonan dan candaan.

Menurut sang Rektor, IAIN Palu memiliki visi unggul dalam kajian Islam klasik, ingin sejajar dengan perguruan Islam negeri yang maju sampai tahun 2020. Karena itu pihaknya melakukan upaya maksimal untuk bangun kampus dan melakukan yang terbaik kepada para mahasiswanya.

Mulai tahun 2017 ini, kata dia, dengan dana SBSN itu sedang membangun kampus baru di Kabupaten Sigi arah selatan bandara. Rencana itu sudah disetujui Bupati Sigi dan akan menghibahkan tanah

100 ha kepada IAIN Palu. Karena ingin sejajar maka harus memiliki kampus yang bagus dan sedang usul Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang ditandatangani oleh Sekjen Keemenag sudah sampai di Bappenas.

Namun sambungnya, untuk merealisasikan pembangunan kampus baru itu perlu ada penguatan dan bisikan. “ Karena bisikan-bisikan halus biasanya lebih mujarab dari pada teriak-teriak. Syetan itu tidak berteriak, tapi lewat bisikan syetan itu menggoda kita,” tegasnya

bernada canda disambut tepuk tangan. Lalu disambung lagi, rupanya yang tepuk tangan itu sering digoda syetan”.

Dengan adanya kampus 2 seluas 125 ha pihaknya berharap ada bantuan Kemenag dan dukungan Komisi VIII dapat segera terwujud. Apalagi di Indonesia Timur baru satu UIN. Karena baru satu maka IAIN Palu ingin menjadi nomor duanya. “Tidak perlu isteri dua yang penting UIN Palu sebagai UIN kedua,” candanya.

Sang Rektor menambahkan, laporan itu tidak bermaksud mempersulit Komisi VIII, karena ajaran menekankan jangan persulit orang, jangan persulit anggota Dewan ini. **Bassiru wala tunassiru**, beri orang kabar gembira jangan dipersulit. “ Kami tidak akan mempersulit anggota DPR, cuma minta tolong sama bapak. Sesuai dengan ayat Al-quran mengajarkan minta tolonglah pada saudaramu, **ta,aawanu ,alal birri wattaqwa, wala ta,aawanu a,alal istmi wa ,udwaan**. Berdasarkan ayat itu kami minta tolong kepada bapak dan ibu,” katanya disambut lagi tepuk dan tawa panjang para hadirin.

■ (mp)



Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Noor Achmad bertukar cenderamata dengan Rektor IAIN Palu Zainal Abidin



HARI KESAKTIAN PANCASILA

1 OKTOBER 2017

*" Bangsa Yang Besar
Adalah Bangsa Yang Menghormati
Jasa Pahlawannya "*

Ir. Soekarno

